



**Direktorat Jenderal
Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem**

LAPORAN KINERJA 2019



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2019

DAFTAR ISTILAH

A

ABKT : Areal Bernilai Konservasi Tinggi
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN : Aparatur Sipil Negara

B

BBKSDA : Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
BBTN : Balai Besar Taman Nasional
BMN : Barang Milik Negara
BKSDA : Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BTN : Balai Taman Nasional

C

CA : Cagar Alam
CITES : *Convention on International Trade in Endangered Species*

E

EKF : Evaluasi Kesesuaian Fungsi

F

FP : Forest Program

H

Ha : Hektar
HLN : Hibah Luar Negeri
HLLN : Hibah Langsung Luar Negeri

I

IIUPSWA : Iuran Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam
IIUPA : Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Air
IIUPEA : Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air
IKK : Indikator Kinerja Kegiatan
IKP : Indikator Kinerja Program
IPA :Izin Pemanfaatan Air
IPJLPB : Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi
IUCN : *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*
IUPA : Izin Usaha Pemanfaatan Air
IUPSWA : Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam

IUPJWA : Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam

K

KEE : Kawasan Ekosistem Esensial
Kehati : Keanekaragaman Hayati
KIIC : Karawang International Industrial City (KIIC)
KK : Kawasan Konservasi
KPA : Kawasan Pelestarian Alam
KPHK : Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi
KSA :Kawasan Suaka Alam
KSDA : Konservasi Sumber Daya Alam
KSDAE : Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

L

LH : Lingkungan Hidup
LHK : Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LIPI : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LKj : Laporan Kinerja
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

M

MDPL : Meter Diatas Permukaan Laut
METT : *Management Effectiveness Tracking Tool*
MOWA : Masuk obyek wisata alam

N

NSPK : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

O

ODTWA : Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam
OSS : *Online Single Submission*

P

PHUPSWA : Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam
PIPJLPB : Pungutan Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi
PK : Perjanjian Kinerja
PP : Peraturan Pemerintah
PTSP : Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PUPA : Pungutan Usaha Pemanfaatan Air

PUPR : Pekerjaan Umum dan
Perumahan rakyat

R _____

Renstra : Rencana Strategis

RM : Rupiah Murni

RPJP : Rencana Pengelolaan Jangka
Panjang

RPJPN : Rencana Pengelolaan Jangka
Pendek

S _____

SBSN : Surat Berharga Syariah Negara

SDH : Sumber Daya Hutan

SDM : Sumber Daya Manusia

SK : Surat Keputusan

SM : Suaka Margasatwa

T _____

T : Triliun

Tahura : Taman Hutan Raya

TB : Taman Buru

TN : Taman Nasional

TNGC : Taman Nasional Gunung
Ciremai

TSL : Tumbuhan dan Satwa Liar

TWA : Taman Wisata Alam

U _____

UPT : Unit Pelaksana Teknis

UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah

UU : Undang-Undang

W _____

Wisman : Wisatawan Mancanegara

Wisnus : Wisatawan Nusantara

WRU : *Wildlife Rescue Unit*

PENGANTAR

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM



Laporan kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 disusun sebagai implementasi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pencapaian 2 sasaran program dan 9 indikator

kinerja program Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sasaran program pertama adalah meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati yang diukur melalui 5 indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program yaitu: (a) 100 unit KK yang telah mempunyai nilai efektivitas mencapai minimal 70 (kategori baik), (b) 106 unit KPHK telah beroperasi, (c) populasi satwa terancam punah meningkat sebesar 3,67%, (d) 20 kelembagaan KEE telah terbentuk, dan (e) tersedianya 7 paket data keanekaragaman hayati. Sasaran program kedua adalah meningkatnya penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati. Pencapaian sasaran program ini diukur melalui 4 indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program yaitu: (a) nilai ekspor TSL mencapai Rp 10,037 Triliun, (b) kawasan konservasi telah dikunjungi sebanyak 466.460 orang wisman (c) kawasan konservasi telah dikunjungi sebanyak 7.464.028 orang wisnus, dan (d) terdapat 142 unit kemitraan pengelolaan kawasan konservasi.

Upaya pengelolaan kawasan konservasi senantiasa terus berlanjut. Diharapkan dalam laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran lingkup Direktorat Jenderal KSDAE dan semua pihak yang berperan serta dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Jakarta, Januari 2020

Direktur Jenderal KSDAE,



RATNO, M.Sc.

NIP. 19620328 198903 1 003

PENGUKURAN KINERJA DITJEN KSDAE 2019



Bukit Seribu Bintang_TN Gunung Ciremai
@BTN Gunung Ciremai

CAPAIAN KINERJA PROGRAM



141,67%

REALISASI ANGGARAN

97,63%



RATIO EFISIENSI



1,45

Sasaran Program 1

Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman hayati



Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati

Sasaran Program 2



RINGKASAN CAPAIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Direktorat Jenderal KSDAE sebagai pengelola 554 unit kawasan konservasi seluas 27,13 juta hektar, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya dengan sasaran akhir yang ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, berasaskan keserasian dan keseimbangan. Mandat pengelolaan kawasan konservasi Direktorat Jenderal KSDAE dilaksanakan melalui program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan 2 sasaran dan 9 indikator kinerja program. Mandat tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahunan antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan target 2 sasaran yaitu: (1). peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati; (2). peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati.

Pencapaian target capaian sasaran program diukur melalui 9 indikator kinerja program, yaitu: (1) nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan; (2) KPHK non Taman Nasional yang terbentuk dan beroperasi; (3) peningkatan populasi 25 spesies prioritas; (4) nilai ekspor pemanfaatan TSL dan *bioprospecting*; (5) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara; (6) jumlah kunjungan wisatawan nusantara; (7) kemitraan pengelolaan kawasan konservasi; (8) kawasan ekosistem esensial yang terbentuk; dan (9) ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati. Dalam periode 5 tahun terakhir, capaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE semakin meningkat.

- 1) Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi telah dilaksanakan pada 419 unit kawasan konservasi atau 75,63% dari 554 unit kawasan. Berdasarkan hasil penilaian efektivitas pengelolaan KK selama 5 tahun terakhir (2015-2019), yang memiliki nilai $\geq 70\%$ sebanyak 255 unit kawasan atau 98,08% dari target 260 unit kawasan. Pada tahun 2019 ditargetkan peningkatan efektivitas pada 80 unit kawasan dan terealisasi sebanyak 100 unit kawasan. Pencapaian efektivitas pengelolaan KK tahun 2019 melebihi target PK disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: UPT/UPTD Tahura telah melaksanakan rekomendasi hasil penilaian efektivitas pengelola tahun sebelumnya, peningkatan yang signifikan pada penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) dan alokasi dan distribusi anggaran dan pegawai menuju proporsional melalui strategi pembentukan dan operasionalisasi KPHK.
- 2) Salah satu upaya untuk mendorong pengelolaan kawasan konservasi semakin efektif melalui pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). Pembentukan dan operasionalisasi KPHK pada tahun 2015 sebanyak 12 unit KPHK. Secara kumulatif, meningkat sebanyak 46 unit KPHK pada tahun 2016, sebanyak 81 unit KPHK pada tahun 2017 dan 103 unit KPHK pada tahun 2018. Pada tahun 2019 terdapat penambahan 3 unit KPHK, sehingga selama 5 tahun terdapat 106 unit KPHK telah terbentuk dan beroperasi.

- 3) Salah satu upaya konservasi keanekaragaman hayati yaitu dengan menetapkan target peningkatan populasi 25 satwa prioritas. Selama 5 tahun terakhir, populasi satwa meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 peningkatan populasi satwa sebesar 26,89%, pada tahun 2016 peningkatan sebesar 30,84% atau 2,91% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2017 populasi satwa meningkat sebesar 36,28% atau 5,44% dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2018 meningkat sebesar 36,94% atau 0,82% dibandingkan tahun 2017, dan pada tahun 2019 meningkat sebesar 40,77% atau 3,67% jika dibandingkan tahun 2018. Beberapa satwa yang bertambah populasinya antara lain harimau sumatera (71,83%), gajah sumatera (9,90%), badak (16,88), dan banteng (15,88%).
- 4) Meningkatkan nilai ekspor pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) serta *bioprospecting* dari target yang telah ditetapkan sebesar 5 Triliun Rupiah setiap tahunnya mencerminkan bahwa pemanfaatan keanekaragaman hayati ini mampu memberikan sumbangsih penerimaan negara. Selama 5 tahun terakhir, total nilai ekspor TSL mencapai 43,327 Triliun Rupiah, lebih besar dari target sebesar 25 Triliun Rupiah. Pada tahun 2019 saja nilai ekspor TSL sebesar Rp 10,037 Triliun Rupiah. Negara yang menjadi tujuan utama ekspor TSL yaitu China, Singapura, Saudi Arabia, Amerika, dan Taiwan. Nilai ekspor pemanfaatan TSL yang termasuk apendiks CITES tahun 2019 dihasilkan dari 10 jenis komoditas yaitu 6 komoditas dari kelompok satwa dan 4 komoditas dari kelompok tumbuhan. Sonokeling menempati urutan terbesar penyumbang nilai ekspor TSL tahun 2019 (59,23%). Lima komoditas yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap nilai ekspor pemanfaatan TSL dan *bioprospecting* selama 5 tahun terakhir adalah Sonokeling (Rp. 19,57 T), Reptil (Rp. 5,742 T), Ikan (Rp. 3,54 T), Gaharu (Rp.2,7 T) dan mamalia (Rp. 2,27 T).
- 5) Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke kawasan konservasi terus meningkat. Selama kurun waktu 2015-2019, dari target 1.500.000 telah terealisasi sebanyak 2.059.343 orang wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 466.460 orang wisatawan mancanegara atau 186,58% dari target yang ditentukan pada tahun 2019 yaitu 250.000 orang. Dibandingkan tahun 2018, jumlah kunjungan wisman tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 19.780 orang atau 20,19%. Adanya penutupan sementara beberapa obyek wisata akan berpengaruh pada penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung, contohnya pada TWA Tangkuban Perahu mengalami erupsi dan pendakian Gunung Semeru di TN Bromo Tengger Semeru karena adanya kebakaran hutan dan lahan pada kawasan tersebut.
- 6) Selain wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke kawasan konservasi juga terus meningkat. Selama kurun waktu 2015-2019, dari target 20.000.000 telah terealisasi 31.866.677 orang wisnus yang berkunjung ke kawasan konservasi. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 7.464.028 orang wisatawan nusantara yang berarti meningkat sebesar 7,88% atau 544.920 Orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2019 target jumlah wisnus yang berkunjung pada kawasan konservasi yang ditetapkan Ditjen KSDAE sebanyak 4.500.000 Orang sehingga sampai akhir tahun 2019 jumlah wisnus telah mencapai 165,87% dari target.

- 7) Dalam kurun waktu 2015-2019 telah telah tercapai 462 unit dari target 130 unit usaha kemitraan pengelolaan kawasan konservasi yang terdiri dari 318 unit dari target 100 unit usaha pemanfaatan pariwisata alam, 150 unit dari target 25 unit pemanfaatan jasa lingkungan air, dan 4 unit dari target 5 unit pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi. Pada tahun 2019 telah bertambah sebanyak 142 unit kemitraan yang terdiri atas 98 unit usaha pemanfaatan pariwisata alam, 42 unit pemanfaatan jasa lingkungan air, dan 2 unit pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi. Dengan adanya kemitraan pengelolaan kawasan konservasi ini diharapkan berdampak pada meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sebagai bentuk dari pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari.
- 8) Salah satu upaya konservasi keanekaragaman hayati yang berada di luar kawasan konservasi, Direktorat Jenderal KSDAE melakukan fasilitasi pembentukan kelembagaan kawasan ekosistem esensial bersama-sama dengan stakeholder terkait, antara lain pemerintah daerah, lintas Kementerian, LSM, perguruan tinggi dan sektor swasta. Selama kurun waktu 2015-2019, telah dilakukan pembentukan kelembagaan pada 61 unit KEE atau 127,08% dibandingkan target 5 tahun (48 unit KEE). Pada tahun 2019 kelembagaan yang dibentuk adalah sebanyak 20 unit KEE, capaian ini merupakan capaian terbanyak selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2015, terbentuk kelembagaan 13 unit KEE, tahun 2016 terbentuk 8 unit KEE, tahun 2017 terbentuk 14 unit KEE, dan tahun 2018 telah terbentuk 6 unit KEE.
- 9) Dengan tingginya kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia, penting untuk melakukan inventarisasi data dan informasi sebaran keanekaragaman hayati sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi penyusunan kebijakan di bidang keanekaragaman hayati. Pada tahun 2015-2019 telah tersedia 7 paket data keanekaragaman hayati yang tersebar pada semua ekoregion (kumulatif). Pada tahun 2015 tersedia 3 paket data, pada tahun 2016 tersedia 6 paket data, pada tahun 2017 juga tersedia 6 paket data, tahun 2018 tersedia 7 paket data, dan pada tahun 2019 juga tersedia 7 paket data. Data-data tersebut antara lain terkait tanaman *bioprospecting*/tanaman obat, data biota laut dan profil keanekaragaman hayati daerah.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.647.881.906.000,-. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari Rp 1.017.047.844.000,- atau 61,72% anggaran belanja operasional dan Rp 630.834.062.000,- atau 38,28% anggaran belanja non operasional. Anggaran belanja operasional digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan layanan perkantoran yang meliputi belanja pegawai dan operasional perkantoran sedangkan belanja non operasional digunakan untuk membiayai kegiatan teknis yang bersifat prioritas nasional dan kegiatan lainnya sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2019.

Penyerapan anggaran tahun 2019 merupakan penyerapan anggaran tertinggi selama 5 tahun terakhir jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 102,45%, tahun 2017 sebesar 105,71%, tahun 2016 sebesar 111,37% dan tahun tahun 2015 sebesar 108,04%. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2019, realisasi anggaran Direktorat

Jenderal KSDAE sebesar Rp1.608.881.836.978,- atau 97,63% (Laporan Keuangan Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 *unaudited*). Realisasi anggaran belanja operasional sebesar Rp 1.002.665.961.046,- atau 98,59% dan realisasi anggaran belanja non operasional sebesar Rp 606.215.875.932,- atau 96,10%. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada Direktorat Jenderal KSDAE dilakukan dengan membandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 141,67% dengan realisasi anggaran sebesar 97,63%. Hasilnya menunjukkan bahwa rasio efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,45 yang dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 berjalan secara efisien.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISTILAH	i
PENGANTAR	iii
RINGKASAN CAPAIAN KINERJA	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. KAWASAN KONSERVASI.....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
C. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	4
D. BARANG MILIK NEGARA (BMN)	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019	7
B. RENCANA KERJA TAHUN 2019	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	10
B. REALISASI ANGGARAN.....	69
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlat unit Kawasan konservasi tahun 2019	2
Tabel 2. Capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2019 ..	10
Tabel 3. Data populasi 25 satwa terancam punah tahun 2019.....	25
Tabel 4. Monitoring populasi satwa terancam punah 2015-2019	26
Tabel 5. Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman Spesies dan Genetik 2019....	37
Tabel 6. Negara importir TSL periode tahun 2015 s/d 2019	46
Tabel 7. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir	49
Tabel 8. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Kawasan Konservasi 2015-2019.....	60
Tabel 9. Jumlah IPJLPB di Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase Luasan Kawasan Konservasi Berdasarkan Fungsi	2
Gambar 2. Struktur organisasi Ditjen KSDAE	4
Gambar 3. Jumlah PNS tahun 2015-2019	4
Gambar 4. Komposisi PNS Perjabatan	5
Gambar 5. Sebaran PNS Per Lokasi	5
Gambar 6. Jumlah Aset Direktorat Jenderal KSDAE 2015-2019 (dalam juta rupiah).....	6
Gambar 7. Milestone program Ditjen KSDAE 2015-2019.....	8
Gambar 8. Perjanjian Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2019	9
Gambar 9. Rekapitulasi Kegiatan Penilaian METT berdasarkan fungsi kawasan	13
Gambar 10. Kawasan Konservasi dengan Nilai METT $\geq 70\%$ Tahun 2019	15
Gambar 11. Distribusi Fungsi Kawasan Konservasi yang belum dan telah dinilai Efektivitas Pengelolaannya	16
Gambar 12. Grafik Komposisi Capaian METT berdasarkan fungsi Kawasan	17
Gambar 13. Capaian METT 2015-2019.....	17
Gambar 14. Proses Penilaian METT di Pulau Seram.....	19
Gambar 15. Peta Sebaran KPHK Non Taman Nasional.....	21
Gambar 16. Milestone Pencapaian Target Operasionalisasi KPHK.....	22
Gambar 17. Kondisi operasional KPHK.....	23
Gambar 18. <i>Cacatua alba</i> di TN Aketajawe dan Harimau Sumatera yang terekam kamera <i>trap</i> di TN.....	27
Gambar 19. <i>Nisaetus bartelsi</i> yang dipantau di HL Gunung Slamet.....	27
Gambar 20. Owa Jawa yang dipantau di HL Petungkriyono	27
Gambar 21. Pemasangan kamera <i>trap</i> untuk pemantauan Macan Tutul Jawa di CA Nusakambangan	28
Gambar 22. Orangutan Kalimantan yang dipantau di TN Bukit Baka Bukit.....	28
Gambar 23. Kakatua Kecil Jambul Kuning yang dipantau di Ai Manis, TB Pulau Moyo	28
Gambar 24. Harimau Sumatera yang terekam kamera <i>trap</i> di TN Bukit Tiga Puluh	29
Gambar 25. Banteng yang dipantau di TN Kayan Mentarang	29
Gambar 26. Capaian Pembentukan KEE Tahun 2015-2019.....	30
Gambar 27. Lokasi KEE Tahun 2019	35
Gambar 28. Capaian jumlah paket data 2015-2019	39
Gambar 29. Dokumentasi Tim Survey Tanaman Obat Balai KSDA Kalimantan Tengah Tahun 2019	39
Gambar 30. Julang Sumba dan peta sebaran	41
Gambar 31. Perkembangan PNBP Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL Tahun 2015-2019.....	41
Gambar 32. Jenis Penerimaan PNBP Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL Tahun 2019	42
Gambar 33. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dan Bioprospecting 2015 (dalam Trilyun Rupiah)	44
Gambar 34. Capaian Nilai Ekspor 2015-2019	44
Gambar 35. Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL Perkomoditas Tahun 2019.....	45
Gambar 36. Perbandingan Nilai Ekspor pemanfaatan TSL dan bioprospecting Per-Komoditi Tahun 2015-2019.....	45
Gambar 37. Jumlah Investasi Usaha Ekspor Bidang Pemanfaatan TSL 2015-2019	46

Gambar 38. Pemanfaatan TSL Gaharu	47
Gambar 39. Pemanfaatan TSL Sonokeling	47
Gambar 40. Pemanfaatan TSL Buaya, Arwana dan Katak sawah	47
Gambar 41. Perbandingan Jumlah Wisman yang Berkunjung di Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019	50
Gambar 42. Sepuluh Kawasan Konservasi Terbanyak yang Dikunjungi Wisman 2019	50
Gambar 43. Jumlah Wisnus Tahun 2015-2019	53
Gambar 44. Sepuluh Kawasan Konservasi Terbanyak yang Dikunjungi Wisnus pada Tahun 2019	53
Gambar 45. Rincian Jumlah Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi per-IKK Tahun 2019	55
Gambar 46. Sebaran Lembaga Usaha Jasa yang Izinnya Telah Diterbitkan pada Tahun 2019 pada setiap UPT.....	57
Gambar 47. Perkembangan IUPSWA dan IUPJWA Tahun 2015-2019.....	57
Gambar 48. Taman Wisata Alam Telaga Patenggang	59
Gambar 49. Perkembangan IUPA dan IPA Tahun 2015-2019	60
Gambar 50. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha Wisata Alam dan Pemanfaatan TSL Tahun 2017-2019.....	64
Gambar 51. Prioritas Nasional Ditjen KSDAE tahun 2019.....	65
Gambar 52. Capaian Kegiatan SBSN Ditjen KSDAE Tahun 2019	67
Gambar 53. Sarana dan prasarana wisata BTN Ujung Kulon	68
Gambar 54. Sarana dan prasarana wisata BTN Gunung Halimun Salak	68
Gambar 55. Sarana dan prasarana wisata BTN Alas Purwo	69
Gambar 56. Perbandingan Realisasi Ditjen KSDAE 2015-2019	70
Gambar 57. Realisasi anggaran Ditjen KSDAE per kegiatan tahun 2019	71
Gambar 58. Realisasi Ditjen KSDAE per jenis belanja tahun 2019	71
Gambar 59. Realisasi Ditjen KSDAE per sumber dana tahun 2019	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE 2019	77
Lampiran 2. Data Capaian Nilai Indeks Efektivitas Peningkatan Kawasan Konservasi.	79
Lampiran 3. Data Capaian KPHK Non TN yang beroperasi 2015-2019	87
Lampiran 4. Data peningkatan populasi 25 satwa prioritas	94
Lampiran 5. Data Kawasan Ekosistem Esensial.....	95
Lampiran 6. Data dan Informasi Keanekaragaman Spesies dan Genetik	97
Lampiran 7. Pagu dan Realisasi Anggaran Satker Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2019 (Berdasarkan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2019 <i>unaudited</i>)	107

BAB I PENDAHULUAN

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki mandat dalam agenda pembangunan nasional yang dirumuskan dalam melalui tujuan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 - 2019. Strategi pencapaiannya ditetapkan melalui pelaksanaan 13 program untuk tahun 2015-2019. Salah satu program yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal KSDAE adalah Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Untuk memetakan keterkaitannya dengan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka ditetapkan 2 sasaran program yaitu: (1) peningkatan efektifitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati; (2) peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati.

Sesuai perjanjian kinerja antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Direktur Jenderal KSDAE tahun 2019, pengukuran tingkat capaian sasaran program didasarkan pada 9 indikator kinerja, yaitu: (1) nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan; (2) KPHK non Taman Nasional yang terbentuk dan beroperasi; (3) peningkatan populasi 25 spesies prioritas; (4) nilai ekspor pemanfaatan TSL dan bioprospecting; (5) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara; (6) jumlah kunjungan wisatawan nusantara; (7) kemitraan pengelolaan kawasan konservasi; (8) kawasan ekosistem esensial yang terbentuk; dan (9) ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati.

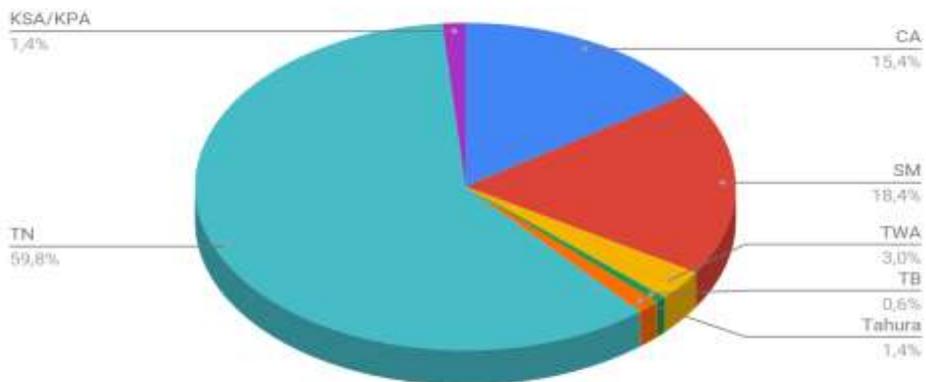
Sesuai Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019, pencapaian indikator kinerja program yang dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; (6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; (7) Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional; serta (8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

A. KAWASAN KONSERVASI

Dalam menyelenggarakan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Direktorat Jenderal KSDAE antara lain menjalankan mandat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Luas kawasan konservasi di Indonesia saat ini mencapai 27.134.394,78 Ha yang terbagi dalam 554 unit kawasan konservasi. Rekapitulasi fungsi dan luas kawasan konservasi disajikan dalam data berikut:

Tabel 1. Jumlah unit Kawasan konservasi tahun 2019

No	Fungsi	Jumlah	Luas (Ha)
1	Cagar Alam (CA)	212	4.179.453,69
2	Suaka Margasatwa (SM)	79	4.988.843,13
3	Taman Wisata Alam (TWA)	133	825.526,10
4	Taman Buru (TB)	11	171.250,00
5	Taman Hutan Raya (Tahura)	34	371.124,39
6	Taman Nasional (TN)	54	16.224.801,17
7	Kawasan Suaka Alam (KSA)/ Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	31	373.396,31
TOTAL		554	27.134.394,79



Gambar 1. Persentase Luasan Kawasan Konservasi Berdasarkan Fungsi
(Sumber: Dit. PIKA, 2019)

B. STRUKTUR ORGANISASI

Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE diarahkan untuk memenuhi tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan KSDAE dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK- II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

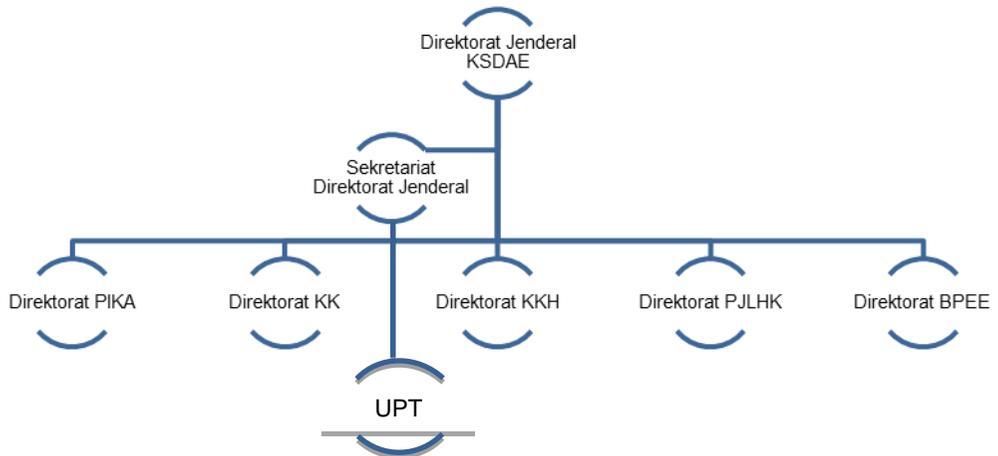
Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; serta;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Direktorat Jenderal KSDAE terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal dan 5 Direktorat. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional (TN), Direktorat Jenderal KSDAE memiliki 74 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri atas Balai Besar (setingkat Eselon II) dan Balai (setingkat

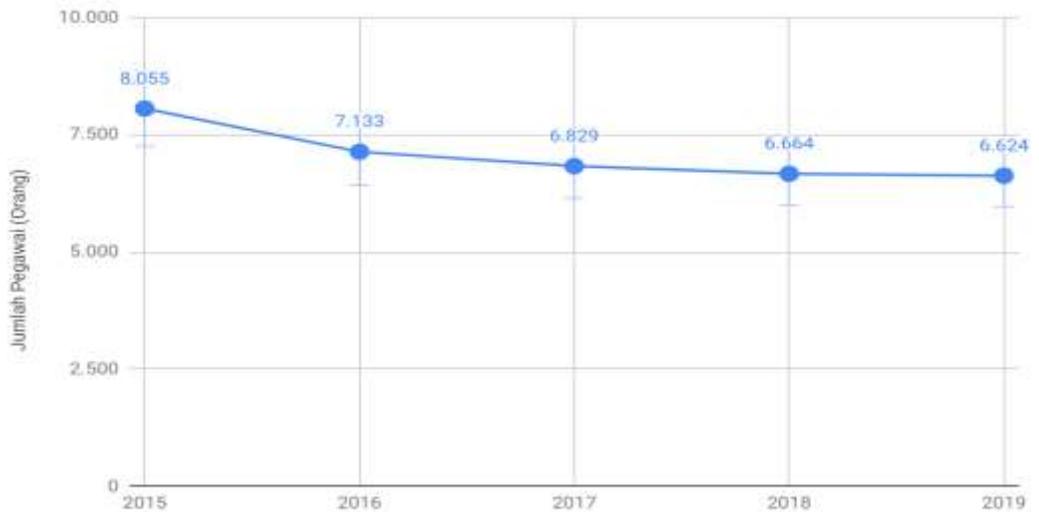
Eselon III), meliputi 8 UPT Balai Besar Taman Nasional, 8 UPT Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, 18 UPT Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan 48 UPT Balai Taman Nasional.



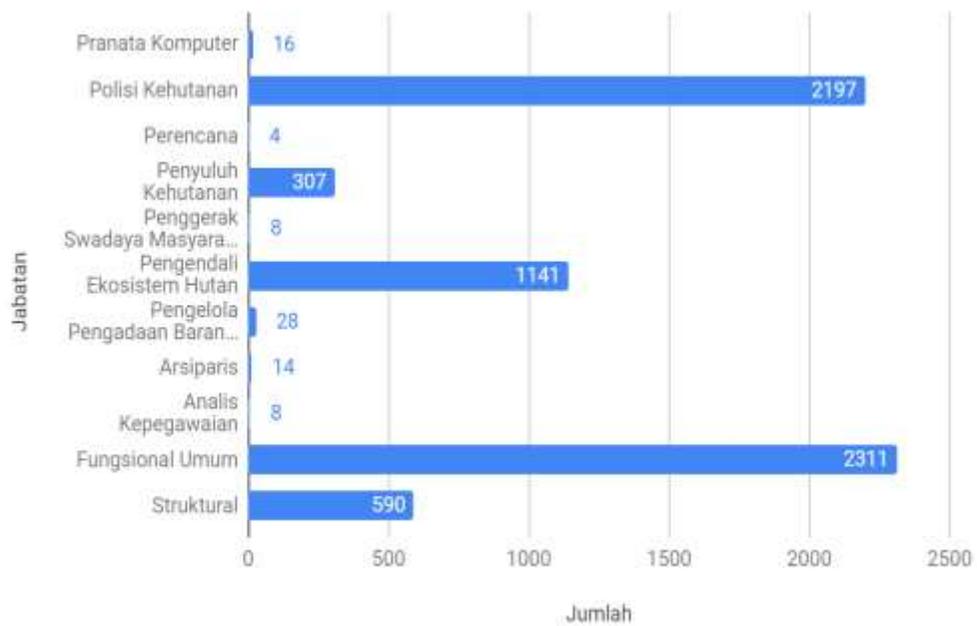
Gambar 2. Struktur organisasi Ditjen KSDAE

C. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

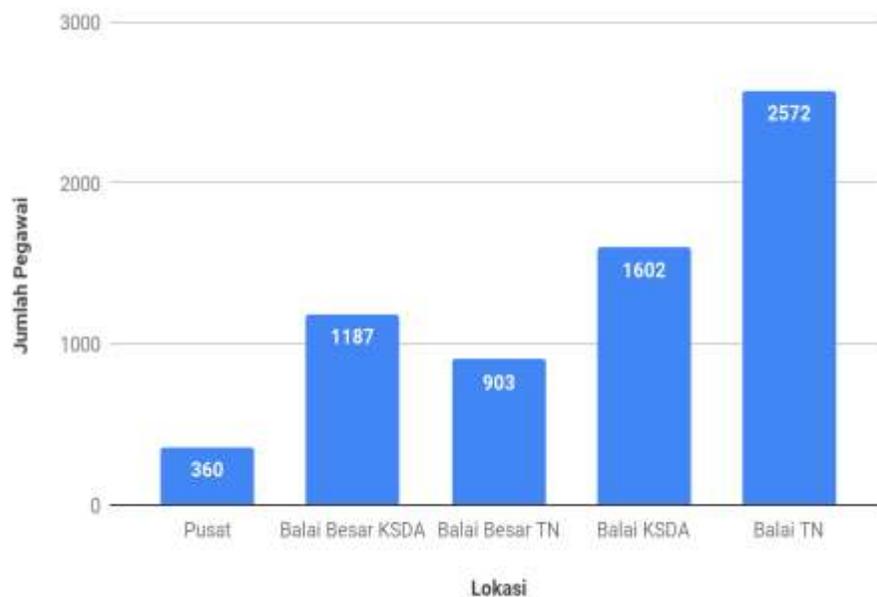
Untuk menjalankan struktur organisasi tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 6.624 pegawai yang terbagi dalam 11 komposisi jabatan. Pegawai Direktorat Jenderal KSDAE tersebar di Pusat sebanyak 360 pegawai dan UPT sebanyak 6.264 pegawai.



Gambar 3. Jumlah PNS tahun 2015-2019
(Sumber: Setditjen KSDAE, 2019)



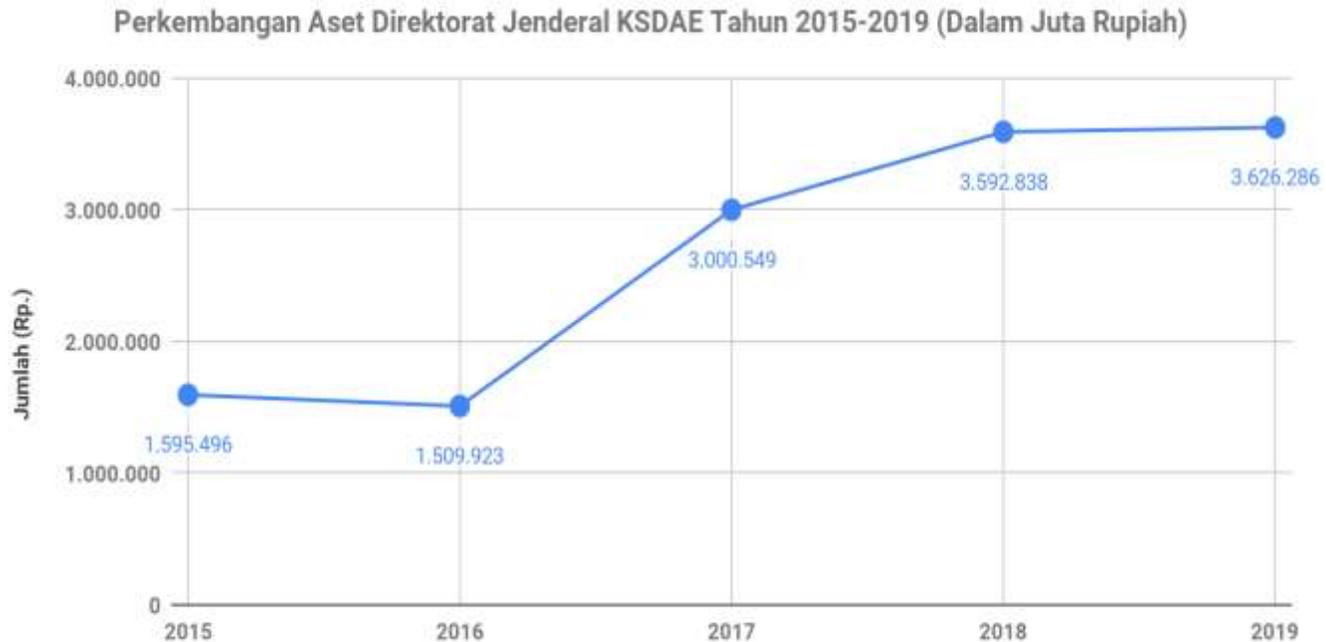
Gambar 4. Komposisi PNS Perjabatan
(Sumber: Setditjen KSDAE, 2019)



Gambar 5. Sebaran PNS Per Lokasi
(Sumber: Setditjen KSDAE, 2019)

D. BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Aset atau Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal KSDAE relatif meningkat selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai nilai aset yaitu sebesar Rp.3.626.286.040.149,-. Perkembangan aset Direktorat Jenderal KSDAE selama lima tahun disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 6. Jumlah Aset Direktorat Jenderal KSDAE 2015-2019 (dalam juta rupiah)
(Sumber: Setditjen KSDAE, 2019)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”**. Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, pembangunan dilaksanakan dengan **7 misi**, yaitu: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdayasaing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan pembangunan bidang KSDAE adalah Mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Dari 3 sasaran strategis Kementerian LHK, Direktorat Jenderal KSDAE mendukung 2 **sasaran strategis** yaitu 1) Memanfaatkan potensi SDH dan LH secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, 2) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Direktorat Jenderal KSDAE menjadi penanggung jawab pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem dengan sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati; serta (2) peningkatan penerimaan devisa dan PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati. Tahapan upaya pencapaian sasaran program sebagaimana diuraikan dalam milestone pada gambar berikut.

<p>2015</p>	<p>Indikatif arahan rancang bangun hingga penetapan KPHK terselesaikan; Tersedianya informasi hasil self assesment METT oleh UPT KSDA dan TN; SDM, tools dan rancangan sistem IKA telah disiapkan; Rancangan lembaga pengelola KEE, koridor KK dan HCVF telah dikoordinasikan deng</p>	<p>Baseline data, serta hasil identifikasi dan inventarisasi telah tersedia.</p>	<p>Peningkatan jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi; Peningkatan PNBP dan penerimaan devisa dari ekspor TSL.</p>
<p>2016</p>	<p>Rancangan kelembagaan KPHK, serta sarana dan prasarana operasional KPHK telah tersedia secara memadai; Hasil assesment METT telah terverifikasi dan tersedia rekomendasi upaya peningkatan efektivitas pengelolaan sesuai dengan isu dan kriterianya; Sistem dan jaringan IKA telah terbangun; Rencana aksi pengelolaan KEE, koridor KK & HCVF telah disusun.</p>	<p>Ketersediaan data hasil identifikasi, inventarisasi dan/atau sensus</p>	<p>Peningkatan jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi; Peningkatan PNBP dan penerimaan devisa dari ekspor TSL.</p>
<p>2017</p>	<p>KPHK beroperasi; Hasil assesment METT telah terverifikasi dan tersedia rekomendasi upaya peningkatan efektivitas pengelolaan sesuai dengan isu dan kriterianya; Sistem dan jaringan IKA berfungsi; Rancangan penataan pengelolaan KEE, koridor KK & HCVF telah tersedia.</p>	<p>Pembinaan habitat, pembinaan populasi, restocking, pelepasliaran, monitoring populasi terlaksana</p>	<p>Peningkatan jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi; Peningkatan PNBP dan penerimaan devisa dari ekspor TSL.</p>
<p>2018</p>	<p>KPHK beroperasi; Hasil assesment METT telah terverifikasi dan tersedia rekomendasi upaya peningkatan efektivitas pengelolaan sesuai dengan isu dan kriterianya; Data dan informasi keanekaragaman hayati yang valid dan reliable telah tersedia dalam platform yang accesible; Kelembagaan pengelola KEE, koridor KK & HCVF telah beroperasi.</p>	<p>Pembinaan habitat, pembinaan populasi, restocking, pelepasliaran, monitoring populasi terlaksana.</p>	<p>Peningkatan jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi; Peningkatan PNBP dan penerimaan devisa dari ekspor TSL.</p>
<p>2019</p>	<p>Operasional 100 Unit KPHK yang efektif (establish); 260 Unit KK memperoleh nilai METT dengan kategori baik (efektif); Sistem dan jaringan IKA yang stabil, data dan informasi yang up to date; Pengelolaan KEE, koridor KK & HCVF yang efektif.</p>	<p>Peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sebesar 10% dari baseline data tahun 2013.</p>	<p>Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi sebanyak 20 Juta Wisnus dan 1,5 Juta Wisman; Penerimaan devisa dari ekspor TSL sebesar Rp. 25 T.</p>
<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati</p>		<p>Kelestarian Spesies dan Sumberdaya Genetik</p>	<p>Pemanfaatan Berkelanjutan</p>

Gambar 7. Milestone program Ditjen KSDAE 2015-2019

Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui 8 kegiatan, yaitu:

1. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
2. Pengelolaan Kawasan Konservasi
3. Konservasi Spesies dan Genetik
4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
5. Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial
6. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
7. Pengelolaan Taman Nasional
8. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE

B. RENCANA KERJA TAHUN 2019

Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun ke-lima pelaksanaan Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2015-2019. Renja Direktorat Jenderal Tahun 2019 disusun Ditjen KSDAE sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang.



Gambar 8. Perjanjian Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019. Terdapat 2 sasaran dan 9 indikator kinerja yang diemban oleh Direktorat Jenderal KSDAE sebagaimana yang tertuang dalam dokumen PK yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil pengukuran, capaian kinerja indikator kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2019

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati	Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (2721 Juta hektar)	Unit	80	100	125,00
		Jumlah KPHK non TN yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit	Unit	60	106	150,00
		Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai The IUCN Red List of Threatened Species) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	%	2	3,67	150,00
		Jumlah unit kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 10 unit	Unit	5	20	150,00
		Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi (Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Nusa Tenggara Maluku dan Papua)	paket	7	7	100,00
2	Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNPB dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp 25 Trilyun	T	5	10,04	150,00

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 15 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	Orang	250.000	466.460	150,00
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	Orang	4.500.000	7.464.028	150,00
		Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 unit pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 25 unit dan pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal sebanyak 5 unit)	Unit	27	142	150,00
	Rata-rata capaian kinerja					141,67

Sasaran 1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati

Kawasan konservasi memiliki peran yang tidak tergantikan sebagai benteng perlindungan spesies dan bagi upaya konservasi keanekaragaman hayati. Dalam upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, diperlukan sebuah pengelolaan yang efektif pada kawasan konservasi. Salah satu metode penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia yang digunakan oleh Kementerian LHK yaitu *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT). Sampai dengan tahun 2019 telah dilakukan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan sebanyak 422 unit (75,17%) dari 554 kawasan, dan sebanyak 255 unit kawasan telah mempunyai nilai efektivitas minimal 70. Skor tersebut menggambarkan bagaimana pengelolaan kawasan konservasi dilakukan, dengan penggunaan sumberdaya yang dimiliki, yaitu sumber daya anggaran, sumber daya manusia, serta sarana prasarana. Salah satu upaya mengatur distribusi sumber daya manusia pada kawasan konservasi menuju proporsional melalui strategi pembentukan dan operasionalisasi KPHK. Pembentukan KPHK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan kawasan konservasi dan mengisi kekosongan kelembagaan di tingkat tapak dan menyediakan sarana pengelolaan hutan langsung di lapangan, sehingga permasalahan-permasalahan di lapangan dapat diatasi secara lebih cepat dan tepat. Sampai tahun 2019 KPHK yang telah terbentuk KPHK sebanyak 112 unit, sedangkan yang telah beroperasi sebanyak 106 unit KPHK.

Selain KSA dan atau KPA, terdapat ekosistem yang mempunyai nilai secara ekologis karena adanya keunikan dan keanekaragaman hayati di dalamnya serta mempunyai keterikatan dengan ekosistem luar yaitu Kawasan Ekosistem Esensial. Kawasan tersebut penting dikelola untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan lestari. Pada

tahun 2019 Direktorat Jenderal KSDAE telah memfasilitasi untuk pembentukan kelembagaan pada KEE, sehingga telah terbentuk kelembagaan sebanyak 20 unit. Hal tersebut dilakukan Direktorat Jenderal KSDAE sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Dengan melimpahnya keanekaragaman hayati, Pemerintah harus menetapkan prioritas dalam pengelolaannya. Selama tahun 2015-2019, terhadap 25 satwa prioritas, Direktorat Jenderal KSDAE menetapkan target peningkatan populasinya sebanyak 10% dan populasi 25 satwa prioritas tersebut telah meningkat sebanyak 12,84%. Dengan kenaikan populasi satwa terancam punah semestinya disertai kelengkapan data dan informasi keanekaragaman hayati. Selama 5 tahun telah tersedia 7 paket data informasi keanekaragaman hayati pada 7 ekoregion. Bentuk data dan informasi yang disampaikan berupa data dan informasi terkait tanaman obat, tanaman bioprospecting dan dokumen profil keanekaragaman hayati daerah. Penjelasan secara rinci masing-masing IKP pada sasaran ini disampaikan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 1

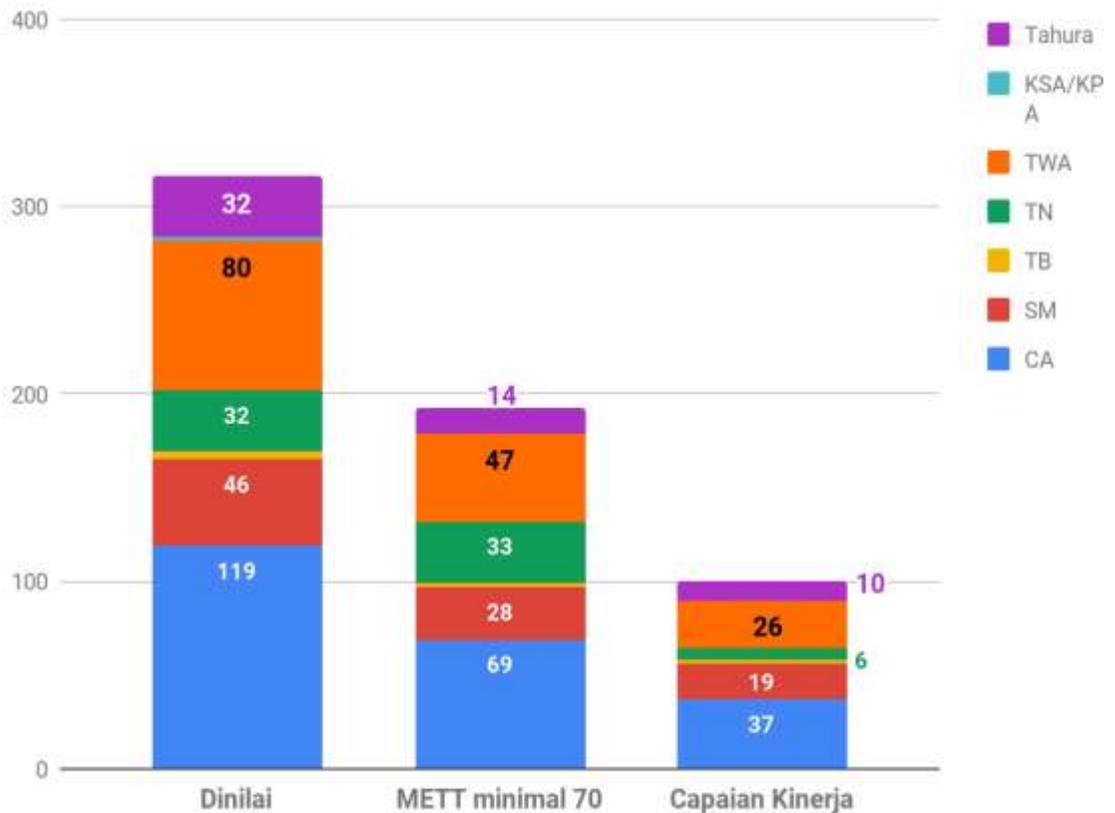
Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia



Penilaian efektivitas dimaksudkan untuk mengkaji seberapa besar tingkatan pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan, terutama terhadap perlindungan nilai-nilai dan tujuan yang ditetapkan. Salah satu metode penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia yaitu *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT). Pada tahun 2015 Indonesia mengadopsi METT secara resmi menjadi kebijakan nasional sebagai salah satu indikator kinerja utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

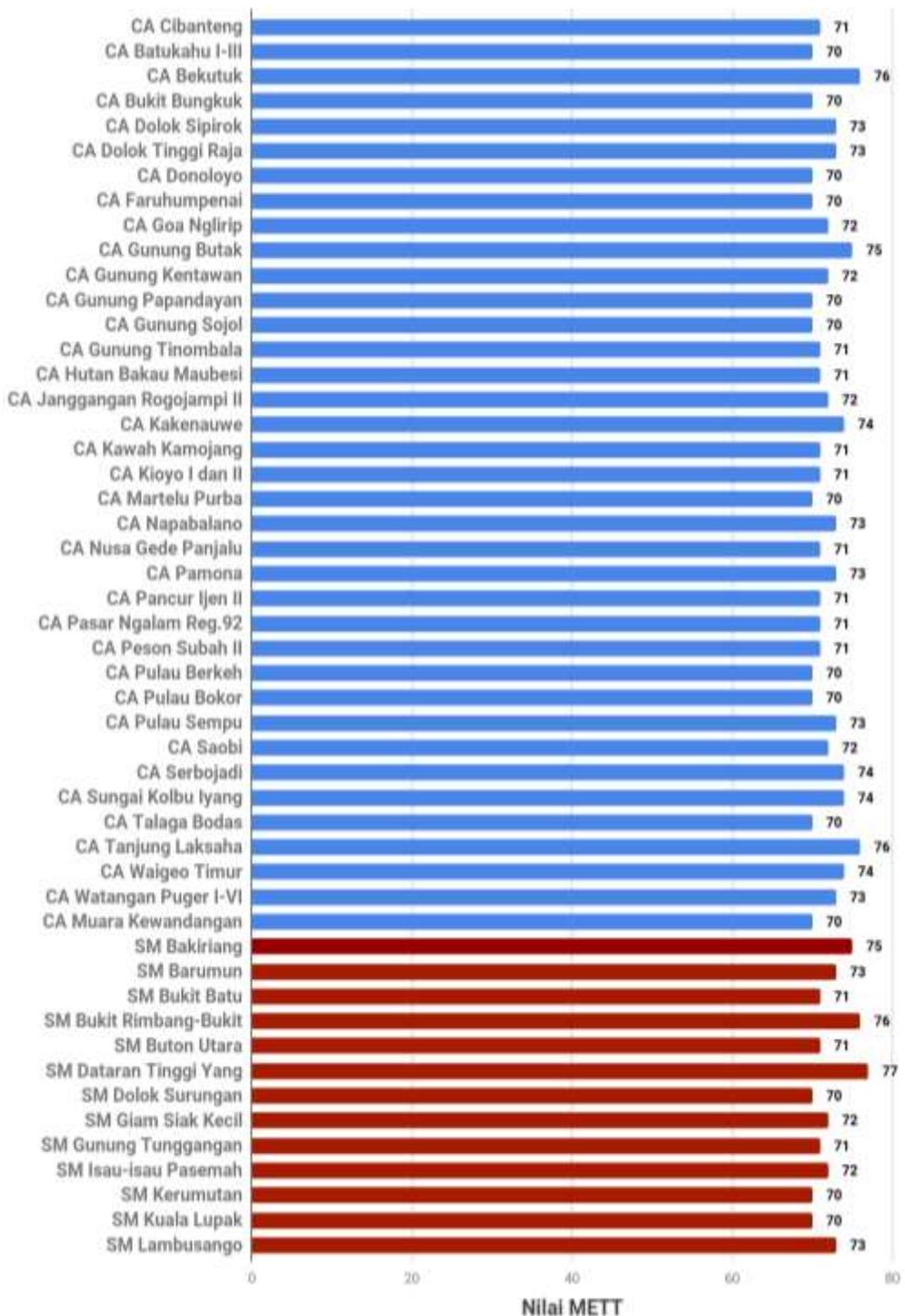
Jumlah KK yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 80 unit. Target tersebut sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2019. Pada tahun 2019 telah dilakukan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 344 unit, terdiri atas 131 unit CA, 49 unit SM, 34 unit TN, 91 unit TWA, 32 unit Tahura, 5 unit TB dan 2 unit KSA/KPA. Dari sejumlah kawasan tersebut 30 unit diantaranya merupakan kawasan yang baru pertama kali dinilai, sedangkan 286 unit merupakan penilaian ulang.

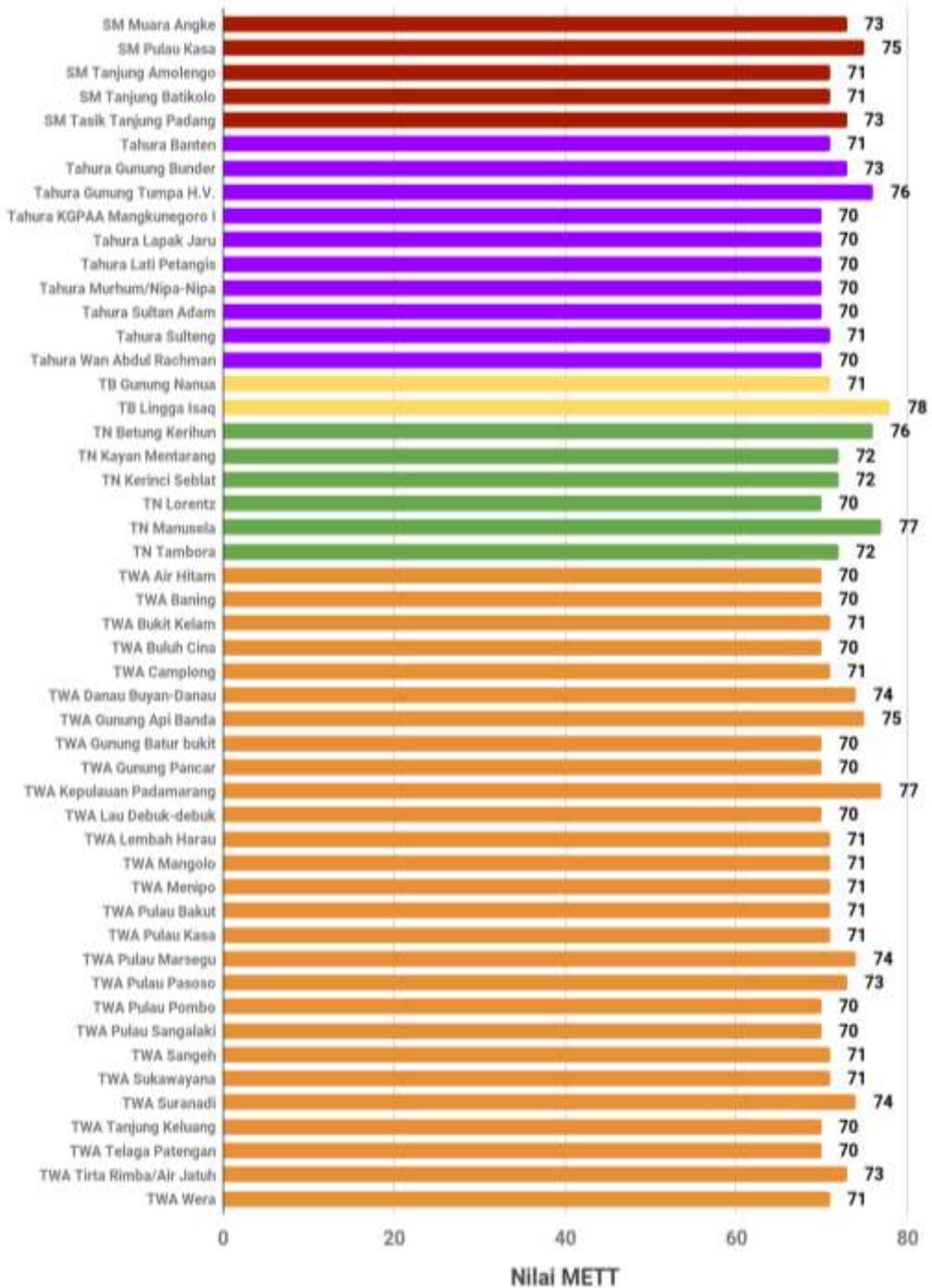
Dari hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan sebanyak 344 unit kawasan, diketahui nilai METT pada 198 unit kawasan telah mencapai hasil penilaian 70. Dari jumlah tersebut sebanyak 98 unit telah tercatat sebagai capaian di tahun-tahun sebelumnya, sehingga hanya 100 unit kawasan yang menjadi capaian tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka capaian kinerja pada IKK ini adalah 125%. Berdasarkan fungsi kawasan, 100 unit kawasan yang menjadi capaian terdiri atas 37 unit CA, 19 unit SM, 6 unit TN, 2 unit TWA, 10 unit Tahura, dan 26 unit KSA/KPA.



Gambar 9. Rekapitulasi Kegiatan Penilaian METT berdasarkan fungsi kawasan
(Sumber: Direktorat. KK, 2019)

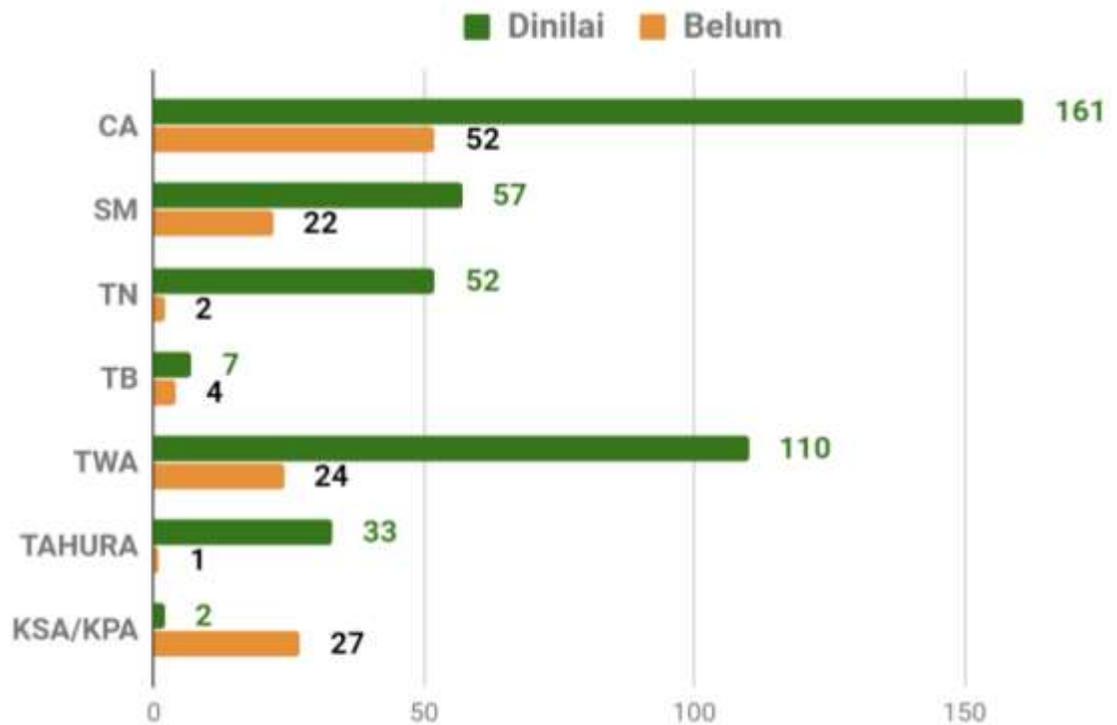
Hasil penilaian efektivitas pengelolaan dengan METT pada 100 unit kawasan tersebut sebagaimana Gambar 10.





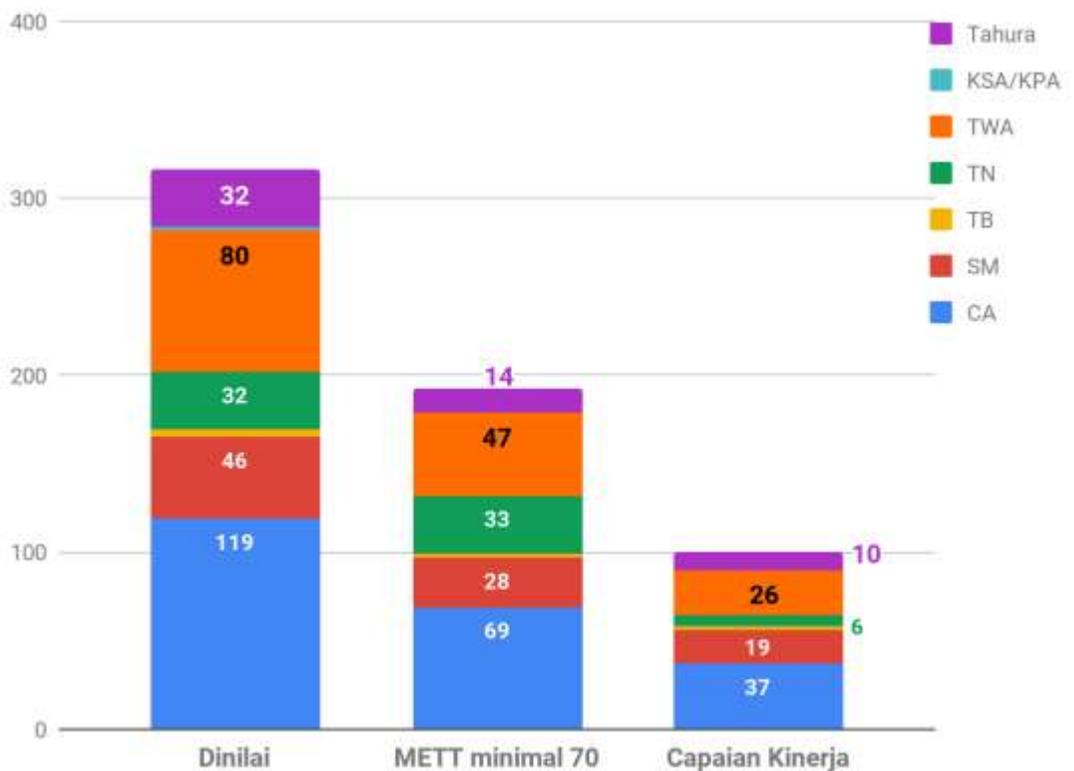
Gambar 10. Kawasan Konservasi dengan Nilai METT $\geq 70\%$ Tahun 2019
(Sumber: Direktorat. KK, 2019)

Selama 5 tahun periode Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, dari 554 unit kawasan konservasi yang ada di Indonesia, total sebanyak 422 unit kawasan telah dilakukan penilaian efektivitas pengelolaannya. Hal ini berarti 75,17% kawasan telah memiliki nilai efektivitas pengelolaan, dan sisanya sebanyak 132 unit atau 24,83% belum memiliki *baseline* nilai karena belum pernah dilakukan penilaian. Distribusi fungsi kawasan baik yang sudah dinilai maupun yang belum dinilai, disajikan pada Grafik berikut:



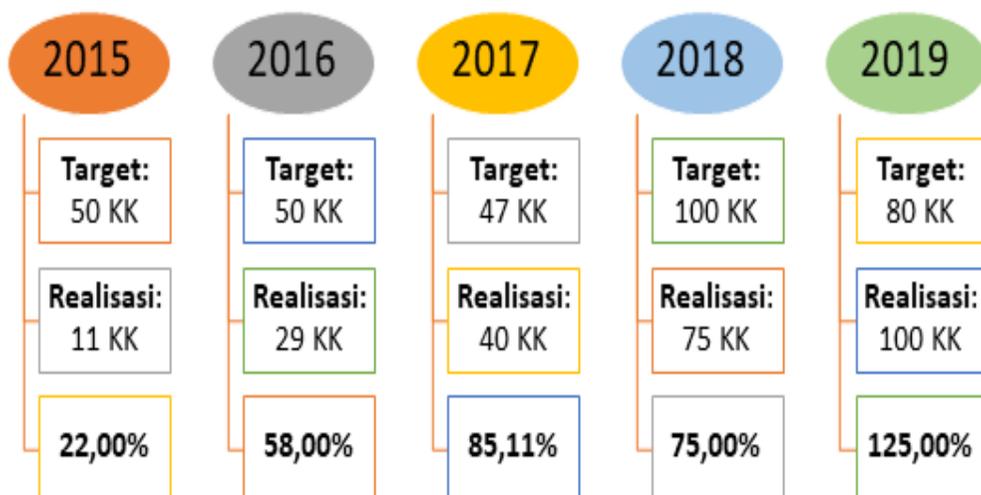
Gambar 11. Distribusi Fungsi Kawasan Konservasi yang belum dan telah dinilai Efektivitas Pengelolaannya
(Sumber: Direktorat. KK, 2019)

Secara akumulatif capaian kinerja peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi sampai dengan akhir periode Renstra 2015-2019 adalah sebesar 98,08%, karena dari target 260 unit kawasan dengan nilai METT minimal 70%, hanya tercapai sebanyak 255 unit. Capaian penilaian METT yang dilakukan setiap tahun menurut fungsi kawasan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 12. Grafik Komposisi Capaian METT berdasarkan fungsi Kawasan
(Sumber: Direktorat. KK, 2019)

Perbandingan capaian Kinerja Peningkatan efektivitas pengelolaan KK tahun 2015-2019 sebagaimana Gambar berikut:



Gambar 13. Capaian METT 2015-2019
(Sumber: Direktorat. KK, 2019)

Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan proses dan merupakan resultante dari berbagai upaya mulai dari tingkat tapak (UPT), pusat (Direktorat Jenderal KSDAE) dan Eselon I lainnya, pemerintah daerah serta masyarakat. Pencapaian efektivitas pengelolaan KK tahun 2019 melebihi target PK disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya karena UPT/UPTD Tahura telah melaksanakan rekomendasi hasil penilaian efektivitas pengelolaan tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 2019 telah banyak kawasan konservasi yang menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang efektif dengan menindaklanjuti hal – hal yang perlu dilakukan sesuai temuan-temuan tindak lanjut pada penilaian sebelumnya. Misalnya pada elemen perencanaan terdapat peningkatan yang signifikan pada penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP). Pada tahun 2019 terdapat 55 dokumen RPJP yang telah disahkan, ini berdampak cukup signifikan bagi efektivitas pengelolaan. Dengan adanya RPJP yang telah disahkan terdapat indikator yang juga meningkat, seperti tujuan pengelolaan yang sudah fokus pada nilai penting kawasan, dan keterlibatan masyarakat. Efektivitas pengelolaan kawasan juga ditentukan dengan adanya alokasi dan distribusi anggaran, distribusi sumber daya manusia menuju proporsional melalui strategi pembentukan dan operasionalisasi KPHK. Sampai tahun 2019 KPHK yang telah dievaluasi dan beroperasi sebanyak 106 KPHK atau 259 unit KK. Dukungan mitra dalam pengelolaan kawasan menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan peningkatan nilai efektivitas pengelolaan.

Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan pencapaian target peningkatan efektivitas pengelolaan tahun 2019, antara lain: 1) kurangnya *ownership* terhadap upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, sehingga seolah-olah kegiatan terkait upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi menjadi tanggung jawab Direktorat Kawasan Konservasi; 2) terdapat kawasan yang belum memiliki fungsi yang jelas (KSA/KPA), yang menyebabkan kegiatan pengelolaan kawasan belum dapat dilakukan secara optimal; 3) Kawasan belum memiliki dokumen RPJP dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) sebagai acuan dalam menentukan arah tujuan pengelolaan; 4) Alokasi anggaran tahun 2019 di beberapa UPT menurun, sehingga beberapa kegiatan untuk mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan tidak dapat terlaksana.

Keluaran (Output) peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah skor/nilai, yang terdiri 6 elemen, yaitu *Context, Planning, Input, Proses, Output, Outcome*. Skor tersebut menggambarkan bagaimana pengelolaan kawasan konservasi dilakukan, dengan penggunaan sumberdaya yang dimiliki. Hasil (outcome) dari hasil peningkatan efektivitas pengelolaan adalah meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Dampak (impact) dari peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah meningkatnya pengelolaan dan penggunaan sumberdaya secara efektif, misalnya distribusi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing seksi atau resort, atau mendistribusikan pegawai sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan pada setiap seksi atau resort.

Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Lingkup Balai KSDA Maluku

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan metode METT lingkup Balai KSDA Maluku merupakan contoh pelaksanaan penilaian yang ideal. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE No. P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi, tahapan dalam melakukan penilaian adalah prakondisi, proses penilaian, penyusunan resume dan rekomendasi, dan verifikasi.



Gambar 14. Proses Penilaian METT di Pulau Seram



Pada tahap prakondisi dilakukan dengan pembentukan tim penilaian oleh kepala balai, menyiapkan data dan hasil analisis sementara, serta menyiapkan proses penilaian. Penilaian dilakukan pada tanggal 23-27 September 2019 di dua lokasi yaitu di Pulau Seram (CA Tanjung Sial, SM Pulau Kasa, TWA Pulau Kasa TWA, Pulau Marsegu) dan Kota Ambon (TWA Gunung Api Banda, TWA Pulau Pombo). Pertimbangan pembagian dua lokasi adalah untuk mengakomodasi keterwakilan *stakeholder* yang terlibat sebagai salah satu prinsip penilaian yaitu partisipatif.

Keputusan pada proses penilaian didasarkan pada data dan informasi yang telah disiapkan oleh tim. Dengan proses ini, proses penilaian relatif lebih mudah karena setiap argumen didasarkan pada data dan fakta, dan bukan berdasarkan pendapat individu. Proses penyiapan data sebagai dasar penentuan skor pada masing-masing pertanyaan pada METT memenuhi prinsip penilaian, yaitu obyektif.

Hasil penilaian efektivitas pengelolaan dengan metode METT pada enam kawasan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Penilaian yang dilakukan pada tahun 2017 untuk kawasan CA Tanjung Sial, TWA Pulau Kasa TWA, Pulau Marsegu, TWA Gunung Api Banda, dan TWA Pulau Pombo dari masing-masing adalah 20%, 28%, 33%, 48%, dan 36% menjadi 55%, 71%, 74%, 75% dan 70% serta tambahan kawasan SM Pulau Kasa adalah 75%. Beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan nilai adalah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan resume dan rekomendasi hasil penilaian 2017. Dengan hal tersebut, Balai KSDA Maluku melakukan strategi pengelolaan pada kawasan prioritas dengan mempertimbangkan beberapa aspek, terutama aksesibilitas, tingkat kerawanan dan ketersediaan SDM. Salah satu indikator pertanyaan METT yang akan berimplikasi signifikan terhadap peningkatan nilai METT adalah penyusunan dokumen perencanaan dan implementasinya, selain pelaksanaan kegiatan esensial lainnya

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 2

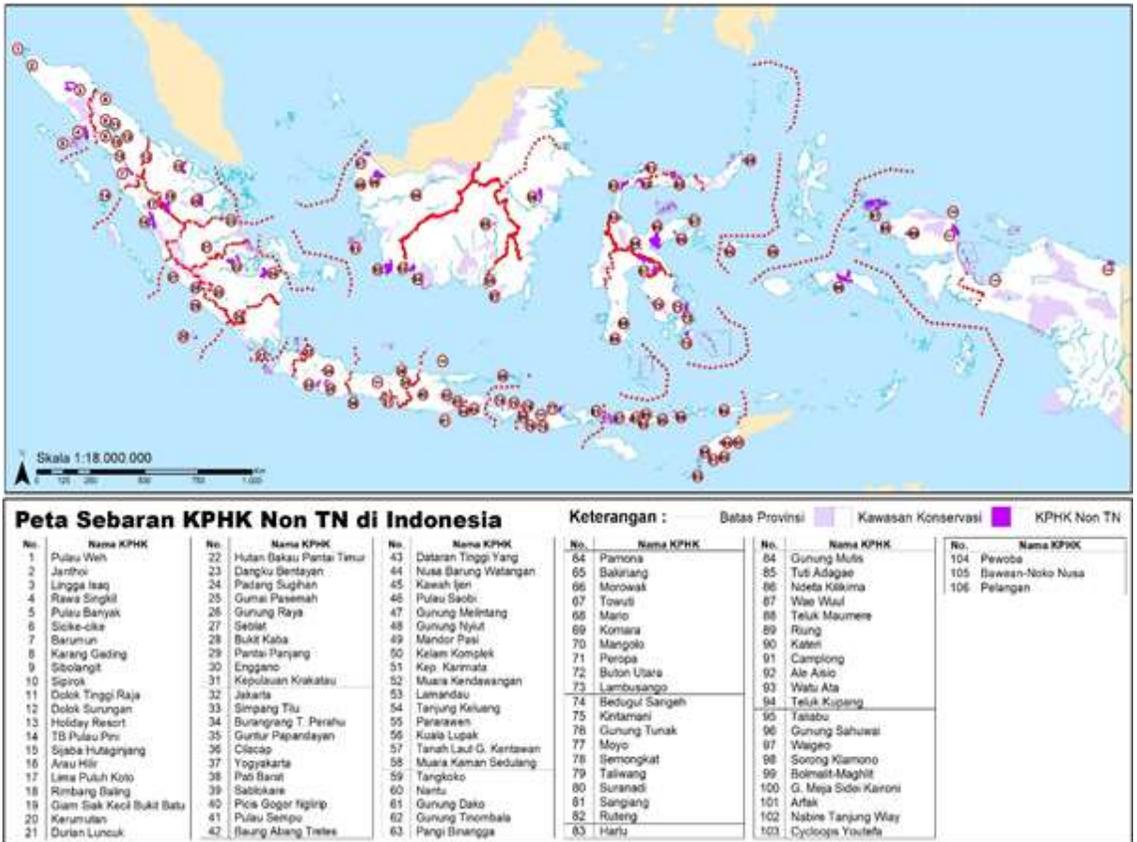
Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 unit



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal KSDAE diberi amanah untuk mengelola kawasan konservasi secara efisien dan lestari sesuai UU No 41 Tahun 1999 melalui pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). Meskipun secara organisasi seluruh kawasan konservasi tersebut sudah dikelola oleh UPT Direktorat Jenderal KSDAE yaitu Balai Besar/Balai KSDA dan Balai Besar/Balai TN, namun fakta di lapangan menunjukkan sebagian besar kawasan konservasi terutama non TN belum dikelola secara optimal sampai tingkat tapak.

Pembentukan KPHK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan kawasan konservasi dan mengisi kekosongan kelembagaan di tingkat tapak dan menyediakan sarana pengelolaan hutan langsung di lapangan, sehingga permasalahan-permasalahan di lapangan dapat diatasi secara lebih cepat dan tepat. KPHK juga memiliki peran sebagai resolusi konflik di lapangan, baik masalah-masalah yang menyangkut tenurial, hubungan masyarakat dengan pemegang izin maupun akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. KPHK dapat berfungsi sebagai operator pengelolaan kawasan konservasi sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik, dan dapat mendukung jaminan kepastian usaha dan juga keadilan bagi masyarakat lokal.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015-2019, pembentukan dan operasionalisasi KPHK non TN ditargetkan sebanyak 100 unit KPHK selama 5 tahun. Sampai dengan tahun 2019, telah terbentuk 112 unit KPHK dan dari 112 unit KPHK tersebut telah beroperasi 106 unit KPHK.



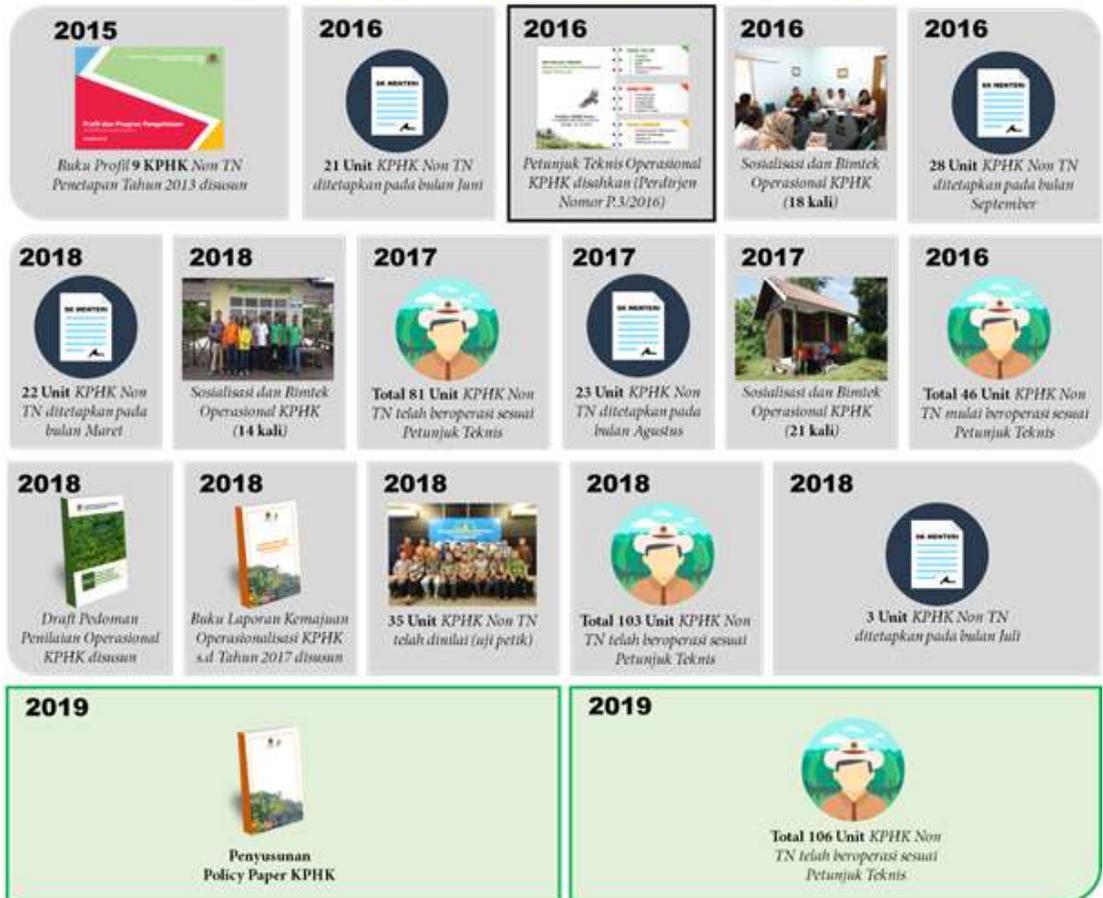
Gambar 15. Peta Sebaran KPHK Non Taman Nasional

Capaian operasionalisasi KPHK non TN sangat bergantung kepada penyelesaian tahapan penetapan wilayah KPHK non TN oleh Direktorat PIKA dan Direktorat Jenderal PKTL, sehingga jumlah capaiannya dapat terus bertambah seiring dengan penetapan unit KPHK non TN. Hingga akhir tahun 2019 telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri LHK tentang Pembentukan KPHK Non Taman Nasional sebanyak 109 unit KPHK, namun demikian yang diproses ke tahap operasional hanya sebanyak 106 unit saja. KPHK yang belum beroperasi sebanyak 3 unit yaitu KPHK Tambora, KPHK Jayawijaya, dan KPHK Morowali.

Berbeda dengan operasionalisasi KPHL dan KPHP, operasionalisasi KPHK cenderung lebih cepat, karena unit-unit kawasan konservasi yang ditetapkan sebagai KPHK sebelumnya memang sudah dikelola oleh UPT Direktorat Jenderal KSDAE, terlepas dari tingkat efektivitas pengelolannya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut maka pada prinsipnya seluruh unit KPHK yang telah ditetapkan dapat dikatakan telah beroperasi. Untuk mendukung tercapainya indikator KPHK ini, telah disusun Pedoman Penilaian Operasional KPHK. Pedoman tersebut menilai “kesiapan” dari operasional KPHK yang sebagian besar memang dilihat dari pemenuhan aspek-aspek yang bersifat manajemen dan administratif dan bukan menilai “kinerja” ataupun “efektivitas”, karena untuk mengukur kedua hal tersebut telah ada alatnya tersendiri yaitu METT.

Menindaklanjuti tahapan pelaksanaan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Direktorat Jenderal KSDAE Nomor P.14/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program KSDAE Tahun 2015-2019, berikut adalah milestone pencapaian target operasionalisasi KPHK Non TN.

MILESTONE PENCAPAIAN TARGET OPERASIONALISASI KPHK NON TN



Gambar 16. Milestone Pencapaian Target Operasionalisasi KPHK
(Sumber: Direktorat. KK, 2019)

Berdasarkan pelaksanaan pencapaian target hingga tahun 2019, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Direktorat KK kedepan untuk membuat kinerja lebih baik lagi, diantaranya yaitu mendorong penyelesaian penyusunan *policy paper* KPHK yang akan membahas *redesign* kebijakan KPHK baik dari aspek pembentukan, kelembagaan, dan sebagainya. Hal tersebut dikarenakan dibutuhkan untuk kebijakan keberlanjutan operasional KPHK.

Peta Sebaran



Jumlah (Unit) **106** Jumlah KK **265**
 Luasan (Ha) **3.477.360**

Kelembagaan



Bentuk Penunjukan KaKPHK oleh Kepala BB/BKSDA



Komposisi SDM

Unsur Jumlah Orang

PNS **724**

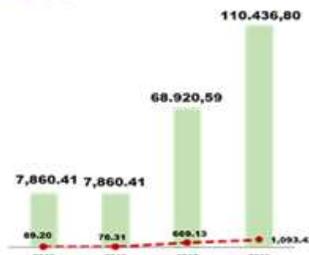
Bakti Rimbawan **147**

Tenaga Kontrak **448**

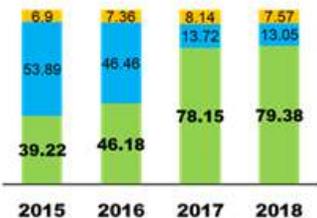
TOTAL 1316

Rerata per KPHK **15-20** orang

Alokasi anggaran per tahun (Rp. x 1.000.000)



Proporsi komposisi alokasi anggaran operasional KPHK Non TN (%)



* Seluruh kegiatan yang diberi label KPHK dan semua kegiatan yang lokusnya berada di KPHK dihitung sebagai alokasi pendanaan KPHK.

Operasional Kantor dan Pegawai
 Sarpras dan Peralatan
 Kegiatan Minimal

Gambar 17. Kondisi operasional KPHK

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 3

Persentase peningkatan populasi 25 spesies satwa terancam punah prioritas (sesuai *The IUCN REd List of Threatened Species*) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013



Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia merupakan aset negara yang menjadi tanggung jawab bersama untuk dikelola secara optimal dan berkelanjutan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kelimpahan serta jumlah jenis yang banyak dari tumbuhan dan satwa liar Indonesia menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi ke-3 di dunia. Dengan keanekaragaman hayati yang begitu besar, Pemerintah harus menetapkan prioritas dalam pengelolaan dengan mempertimbangkan keterancamannya spesies tersebut yang dapat menyebabkan penurunan jumlah populasi. Kementerian LHK melalui Direktorat Jenderal KSDAE telah menetapkan 25 satwa terancam punah prioritas untuk ditingkatkan populasinya sebesar 10% selama tahun 2015-2019 dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 180/IV-KKH/2015.

Berdasarkan keputusan tersebut, terdapat 272 site monitoring yang diukur peningkatan populasi satwa terancam punah. Peningkatan populasi diartikan sebagai bertambahnya jumlah individu dalam suatu kelompok/sub populasi dari suatu populasi satwa prioritas. Pertambahan jumlah populasi selain kelahiran di alam yang termonitor (langsung maupun tidak langsung), anakan dari hasil penangkaran yang dilepasliarkan (*restocking*) ke habitat alaminya, dan anakan hasil pelepasliaran satwa dari suatu pusat rehabilitasi/ perawatan.

Pada tahun 2019, telah dilakukan monitoring satwa di 196 site monitoring atau 72% dari total 272 site monitoring, dengan rata-rata peningkatan populasi satwa sebesar 3,67%. Data peningkatan populasi 25 satwa terancam punah tahun 2019 disampaikan sebagai berikut.

Tabel 3. Data populasi 25 satwa terancam punah tahun 2019

No	Satwa	Baseline (jml)	2019 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2019 (%)
1	Harimau Sumatera	71	122	51	71,83
2	Gajah Sumatera	313	344	31	9,90
3	Badak	77	90	13	16,88
4	Banteng	277	321	44	15,88
5	Owa	431	1.236	805	150
6	Orangutan	1.441	2.408	967	67,11
7	Bekantan	1.957	2892	935	47,78
8	Komodo	5.933	2.932	-3.001	-50,58
9	Jalak Bali	147	105	-42	-28,57
10	Maleo	6.397	2.816	-3.581	-55,98
11	Babirusa	822	551	-271	-32,97
12	Anoa	513	285	-228	-44,44
13	Elang	65	108	43	66,15
14	Kakatua	1.188	12.042	10.854	150
15	Macan Tutul Jawa	7	49	42	150
16	Rusa Bawean	275	304	29	10,55
17	Cendrawasih	66	93	27	40,91
18	Surili	15	27	12	80
19	Tarsius	82	108	26	31,71
20	Monyet Hitam Sulawesi	319	469	150	47,02
21	Julang Sumba	30	92	62	15
22	Kasturi Ungu Tengku	8	12	4	50
23	Penyu	7.036	7.467	431	6,13
24	Kanguru Pohon	10	2	-8	-80
25	Celepuk Rinjani	27	263	236	150

(Sumber: Direktorat. KKH, 2019)

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data laporan peningkatan populasi 25 satwa prioritas tersebut, diketahui bahwa sebanyak 20 satwa prioritas mengalami kenaikan populasi, sedangkan sebanyak 5 satwa prioritas mengalami penurunan populasi. Penurunan terbesar terjadi pada satwa maleo, babi rusa, anoa dan kanguru pohon. Beberapa hal yang menjadi penyebab turunnya populasi satwa tersebut yaitu kerusakan habitat, adanya aktivitas manusia di site monitoring, terdapatnya sumber pakan lain di luar site monitoring dan terdapatnya pesaing dalam mencari pakan di site monitoring sehingga menyebabkan satwa prioritas mencari mangsa di lokasi lain. Selama 5 tahun terakhir, telah dilakukan monitoring satwa dan diperoleh nilai rata-rata peningkatan populasi satwa terancam punah prioritas sebesar 12,84%, dengan data perkembangan tiap tahun sebagai berikut.

Tabel 4. Monitoring populasi satwa terancam punah 2015-2019

No	Tahun	Capaian peningkatan populasi satwa (%)	% Peningkatan Populasi Dibandingkan Tahun Sebelumnya
1	2015	26,89	
2	2016	30,84	2,91
3	2017	36,28*)	5,44
4	2018	37,10	0,82
5	2019	40,77	3,67
		Rata-rata capaian 2015-2018	12,84

(Sumber: Direktorat. KKH, 2019)

Keterangan: *) data berbeda dengan data pada LKj tahun 2017 karena data pada LKj tahun 2017 belum semua site monitoring mengumpulkan data, hanya 171 site monitoring dari 272 site monitoring yang telah mengumpulkan data.

Jika dibandingkan dengan target peningkatan populasi satwa selama 5 tahun (10%), maka capaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE telah melebihi target (128,40%). Keberhasilan peningkatan populasi spesies di site monitoring yang dilihat dari penambahan individu baru, juga didukung dengan upaya konservasi yang lain sebagai intervensi pengelolaan, antara lain pembinaan habitat, penyadartahuan, perlindungan pengamanan, penanggulangan konflik, penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepasliaran.

Peningkatan populasi spesies di suatu habitat atau site monitoring dilihat karena adanya kelahiran maupun penambahan individu di dalam suatu populasi. Lama waktu perkembangbiakan spesies satu dengan spesies lainnya tidak sama, karena banyak faktor yang menentukan diantaranya seks rasio, struktur umur pada populasi tersebut dan juga gangguan luar seperti kerusakan habitat, ketersediaan pakan dan sebagainya. Sebagian besar satwa yang masuk ke dalam 25 satwa prioritas yang akan ditingkatkan populasinya sampai dengan tahun 2019 pada umumnya memerlukan waktu lama untuk berkembangbiak. Badak betina memerlukan waktu hampir 3 tahun sebelum bisa memproduksi lagi termasuk waktu bunting selama 15 – 16 bulan, waktu bunting gajah yaitu 18 – 22 bulan sementara untuk orangutan 9 – 11 bulan.

Sebagian UPT yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring tersebut tidak bisa melaksanakan kegiatannya dikarenakan alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan populasi 25 satwa prioritas dialihkan untuk kegiatan lain. Hal tersebut menyebabkan UPT hanya melaksanakan kegiatan pada sebagian site monitoring yang ada sehingga hasil data yang diperoleh tidak optimal. Sebagian UPT tidak melaksanakan kegiatan monitoring populasi 25 satwa prioritas di seluruh site monitoring di wilayah kerjanya. Dari total 272 site monitoring, pada tahun 2019 hanya 196 site monitoring yang dilaporkan data populasinya oleh 53 UPT.

Sebagian besar anggaran untuk kegiatan monitoring spesies bersumber dari dana PNPB sehingga kegiatan peningkatan populasi 25 satwa di sebagian UPT baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun anggaran sekitar bulan November. Hal tersebut menyebabkan keterlambatan UPT melaporkan data hasil monitoring populasi yang dilakukan.



Gambar 18. *Cacatua alba* di TN Aketajawe dan Harimau Sumatera yang terekam kamera *trap* di TN



Gambar 19. *Nisaetus bartelsi* yang dipantau di HL Gunung Slamet



Gambar 20. Owa Jawa yang dipantau di HL Petungkriono



Gambar 21. Pemasangan kamera *trap* untuk pemantauan Macan Tutul Jawa di CA Nusakambangan



Gambar 22. Orangutan Kalimantan yang dipantau di TN Bukit Baka Bukit



Gambar 23. Kakatua Kecil Jambul Kuning yang dipantau di Ai Manis, TB Pulau Moyo



Gambar 24. Harimau Sumatera yang terekam kamera *trap* di TN Bukit Tiga Puluh



Gambar 25. Banteng yang dipantau di TN Kayan Mentarang

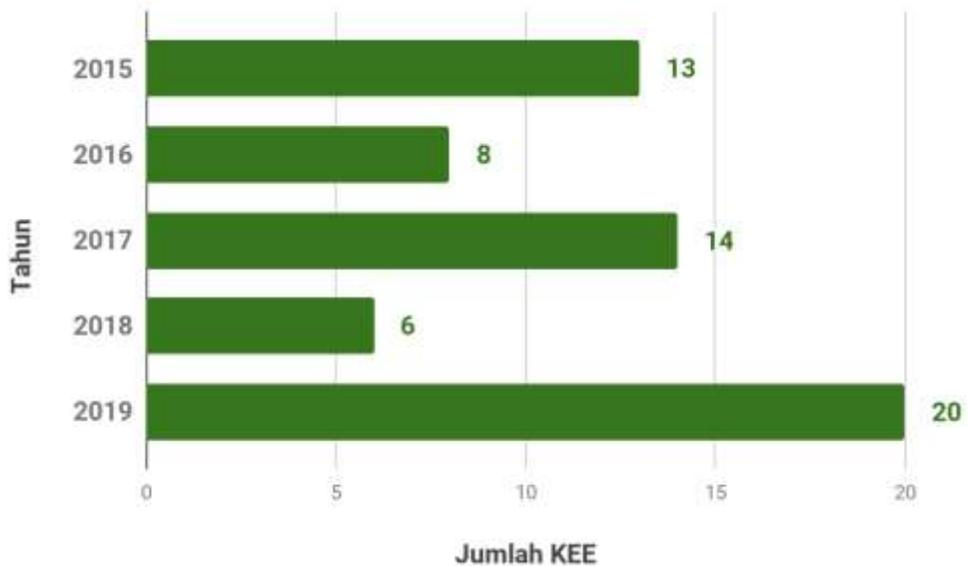
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 4

Jumlah unit kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit



Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) merupakan ekosistem diluar KSA dan atau KPA yang mempunyai nilai secara ekologis karena adanya keunikan dan keanekaragaman hayati di dalamnya sehingga penting dikelola karena keunikan, kekayaan hayati serta keterikatannya dengan ekosistem sekitar. Pengelolaan ekosistem esensial bukan hanya menjadi tanggung jawab satu sektor saja, tetapi harus melibatkan stakeholder terkait, antara lain pemerintah daerah, lintas Kementerian, LSM, perguruan tinggi dan sektor swasta. Pengelolaan yang dilakukan secara terpadu terutama bertujuan untuk menyamakan pandangan dan persepsi terhadap pengelolaan ekosistem esensial, mensinkronisasikan program agar mendapatkan manfaat yang optimal dan lestari. Untuk itu, Direktorat Jenderal KSDAE perlu memfasilitasi pembentukan kelembagaan kawasan ekosistem esensial sebagai upaya untuk mengelola dan menjaga keberlanjutan kawasan ekosistem esensial.

Tahun 2019 telah terbentuk 20 KEE yang memiliki kelembagaan dari target sebanyak 5 unit, sehingga capaian kinerjanya 280% (pembatasan nilai maksimal capaian kinerja 150,00%). Target pembentukan kelembagaan KEE yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2015-2019 sebanyak 48 KEE, sampai dengan akhir periode renstra KEE yang telah terbentuk dan dikelola sebanyak 61 KEE (127,08%). KEE yang terbentuk terdiri atas 29 Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati), 12 Mangrove, 5 Karst, 5 Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT), 2 KEE lahan basah, serta 8 koridor hidupan liar. Hal-hal yang mendukung keberhasilan capaian IKP ini yaitu: 1). Dukungan dan komitmen pemerintah daerah terhadap pembentukan KEE meskipun peraturan terkait perlindungan KEE belum disahkan, 2). Tersedianya anggaran pembentukan KEE pada UPT KSDAE, 3). Inisiatif pihak swasta dalam pembentukan KEE, 4). Terciptanya koordinasi antara Direktorat Jenderal KSDAE dengan pemerintah daerah. Berikut adalah capaian pembentukan KEE selama 5 tahun.



Gambar 26. Capaian Pembentukan KEE Tahun 2015-2019
(Sumber: Direktorat. BPEE, 2019)

KEE yang telah terbentuk pada tahun 2019 sebanyak 20 KEE adalah sebagai berikut:

1. Taman Kehati Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat

Taman Kehati Kota Cirebon telah ditetapkan lokasi dan pengelolaannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Cirebon nomor 660/Kep.143-DLH/2017 tentang Penetapan lokasi dan pengelolaan Taman Kehati Kota Cirebon. Taman Kehati seluas 4,7 Ha ini berlokasi di Kebon Pelok, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Selain penetapan lokasi, telah ditetapkan juga pengelola Taman Kehati ini, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.

2. Taman Kehati Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat

Taman Kehati Kabupaten Karawang telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Karawang Nomor: 188/ Kep.370-Huk/2014 tentang Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa di Kawasan Karawang International Industrial City (KIIC) Kabupaten Karawang. Taman Kehati yang terletak di Kawasan KIIC di Desa Sukaluyu, Desa Puseurjaya dan Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, mempunyai luas 22,67 Ha. Untuk operasional pengelolaan Taman Kehati ini, anggaran dibebankan kepada anggaran perusahaan di Kawasan KIIC.

3. Taman Kehati PT. Semen Tonasa, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

Taman Kehati PT Semen Tonasa ditetapkan oleh SK Direksi PT. Semen Tonasa dengan nomor 47/ST/PR.00/21.00/01-2018 tentang Penetapan Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Hayati PT. Semen Tonasa. Dijelaskan juga dalam SK ini menetapkan sebagian area tambang tanah liat Bontoa milik PT. Semen Tonasa di Bulu Sipong sebagai Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Hayati perusahaan seluas 31,64 Ha dengan jenis yang ditanam adalah Eboni (*Diospyros celebica*). Selain tanaman, terdapat juga situs purbakala di dalamnya yang sudah terdaftar di Balai Pelestarian Cagar Budaya. Berdasarkan SK tersebut juga disebutkan bahwa koordinator pengelolaan Taman Kehati adalah Kepala Biro Tambang PT. Semen Tonasa. Tim ini memiliki fungsi membantu direksi dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati di PT Semen Tonasa.

4. Taman Kehati PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat

PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) VI Balongan memiliki Taman Kehati yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Indramayu dengan Nomor:660.1/Kep.64.A.21-BLH/2016 tentang penunjukan lokasi Taman Kehati di Kabupaten Indramayu. Lokasi Taman Kehati yang memiliki luas 10 Ha ini terletak di kompleks Bumi Patra Pertamina Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, sedangkan pengelolanya adalah PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) VI Balongan.

5. Mangrove Pantai Cemara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi

Forum kolaborasi pengelola Mangrove Pantai Cemara ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 398/Kep.Gub/ Dishut-3.3/2019 tentang Pembentukan forum kolaborasi pengelola Kawasan ekosistem esensial pantai cemara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

6. Mangrove Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung

Pembentukan Forum di Kabupaten Lampung Timur ditetapkan berdasarkan SK Bupati Lampung Timur Nomor B.360/08-SK/2019 tentang pembentukan forum kolaborasi pengusulan Kawasan ekosistem esensial mangrove Desa Margasari dan Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

7. Mangrove Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Forum kolaborasi Mangrove Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 522.52/32 tahun 2019 tentang pembentukan forum kolaborasi pengelolaan Kawasan ekosistem esensial mangrove di Provinsi Jawa Tengah. Lokasi KEE yang diberi nama KEE Pasarbanggi dan Tireman ini terletak di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Di dalam SK ditetapkan ketua forum kolaborasi ini yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

8. Mangrove Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Rembang menetapkan forum kolaborasi KEE berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 522.52/32 tahun 2019 tentang pembentukan forum kolaborasi pengelolaan Kawasan ekosistem esensial mangrove di Provinsi Jawa Tengah. KEE dengan nama Muara Kali Ijo Pantai Ayah ini terletak di Desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Sesuai SK yang menjadi ketua dari forum kolaborasi ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

9. Mangrove Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kawasan Mangrove Lampu telah ditetapkan KEE dan pengelolaannya berdasarkan SK Bupati Bima Nomor : 188.45/ 551/07.1 tahun 2019 tentang pembentukan forum pelestari mangrove di desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Dalam SK ini juga memuat jika kepala BAPPEDA Kabupaten Bima ditunjuk sebagai Ketua dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima sebagai wakil ketua.

10. Karst Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat

Kawasan Karst di Kabupaten Ciamis telah ditetapkan sebagai KEE berdasarkan SK Bupati Ciamis Nomor 660.1/kpt.590-Huk/2019 tentang penetapan kawasan ekosistem esensial Karst Kabupaten Ciamis. Kawasan Karst ini berada di 9 Kecamatan dan 61 desa dengan jumlah luasan 1580,79 Ha untuk fungsi budidaya dan 20.138,92 Ha sebagai fungsi lindung. Pada SK lain yang berhubungan dengan penetapan KEE ini ditetapkan pula forum kolaborasi pengelola karst berdasarkan SK Bupati Ciamis Nomor 660.1/kpt.591-Huk/2019 tentang pembentukan forum kolaborasi pengelolaan Kawasan ekosistem esensial karst Kabupaten Ciamis.

11. ABKT Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

ABKT Kabupaten Tanah Laut terletak di Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari dan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung merupakan habitat satwa liar Bekantan (*Nasalis larvatus*) yang berada di luar kawasan konservasi dan berpotensi menimbulkan konflik antara satwa liar dan manusia. Dalam rangka pengelolaan populasi dan habitat satwa liar Bekantan yang berada di luar kawasan konservasi yang merupakan satu kesatuan bentang alam perlu dilakukan secara bersama-

sama para pihak yang berkepentingan di bentang alam tersebut. Bupati Tanah Laut telah menerbitkan SK Nomor 188.45/711-KUM/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem esensial Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari dan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

12. ABKT Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah

ABKT Kabupaten Tojo Una-Una adalah Air Terjun Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una yang berada di luar kawasan konservasi. Air Terjun ini memiliki potensi untuk pengembangan ekowisata yang terintegrasi dengan pengembangan agrowisata bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Air Terjun Kajulangko sebagai tujuan wisata telah ditetapkan Forum Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Air Terjun Kajulangko dengan SK Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45/22.a/ADM.SDA/2019 dengan susunan keanggotaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta LSM.

13. Lahan Basah Habitat Kura-Kura Leher Ular Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Lahan Basah Rote Ndao terletak di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan habitat satwa liar endemik Kura-Kura Leher Ular Rote (*Chelodina mccordi*), memiliki potensi untuk pengembangan ekowisata bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam rangka perlindungan Lahan Basah Rote Ndao sebagai habitat Kura-Kura Leher Ular Rote, kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial melalui SK Gubernur NTT Nomor 204/KEP/HK/2019. Pengelola KEE ini didasarkan pada SK Nomor 311/KEP/HK/2019 tentang Forum Kolaborasi Pengelola KEE Lahan Basah Sebagai Habitat Kura-Kura Leher Ular Rote (*Chelodina mccordi*) di Kabupaten Rote Ndao Provinsi NTT, yang beranggotakan pemerintah daerah, tokoh agama/tokoh masyarakat, Lembaga adat dan pemerhati/Lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.

14. Lahan Basah Danau Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

Lahan Basah Suwi dan Danau Mesangat merupakan habitat Buaya Badas Hitam (*Crocodylus siamensis*) dan Buaya Supit (*Tomistoma schlegelii*). Dalam rangka pengelolaan populasi dan habitat satwa liar, baik yang berada di hutan, areal perkebunan sawit dan areal penggunaan lainnya yang merupakan satu kesatuan ekosistem lahan basah perlu dilakukan secara bersama-sama pihak terkait dan berkepentingan di kawasan tersebut. Untuk itu telah dibentuk Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Danau Mesangat di Kecamatan Long Mesangat dan Kenohan Suwi di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur melalui SK Bupati Kutai Timur Nomor 031/K.667/2016.

15. Mangrove Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara

Dalam rangka perlindungan kawasan ekosistem mangrove Kao di Kabupaten

Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara telah dibentuk forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial Kao, Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara melalui SK Bupati Halmahera Utara Nomor : 031/267/HU/2019 tanggal 25 September 2019. Pengelolaan KEE kao sesuai dengan prinsip konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dan dilaksanakan secara kolaborasi dalam suatu forum. Pada SK tersebut telah ditunjuk Kepala Desa Kao sebagai ketua forum.

16. ABKT Tanjung Maleo Negeri Kailolo, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku

Kawasan Tanjung Maleo di wilayah Negeri Kailolo Kecamatan Pulau Haruku kabupaten Maluku Tengah merupakan tempat bertelurnya burung gosong Maluku yang dilindungi sehingga dapat dijadikan KEE yang bernilai penting secara ekologis, ekonomis dan sosial budaya. Untuk melindungi kawasan tersebut, Bupati Maluku Tengah menetapkan Kawasan Tanjung Maleo Negeri Kailolo sebagai KEE Kabupaten Maluku Tengah melalui SK Nomor 522.5.572 Tahun 2019, serta pembentukan pengelola tanjung maleo negeri Kailolo melalui SK Bupati Maluku Tengah Nomor : 800.05-524 tahun 2019.

17. Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara

Kawasan Tanjung Binerean merupakan area migrasi dan aktivitas satwa liar yang dapat dijadikan sebagai KEE. Mengingat pentingnya kawasan Tanjung Binerean maka Bupati Bolaang Mongondow Selatan menetapkan kawasan tersebut melalui SK Nomor 289 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean. Luas Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean seluas ± 3.384 hektar, yang dikelola dengan prinsip konservasi, dan diselenggarakan secara kolaboratif oleh Forum Kolaborasi dengan para pihak yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

18. Lahan Basah Danau Bagantung, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

Danau Bagantung terletak di Desa Taruna, Toponimi Tanjung Pusaka, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau dengan luas 51,3 Ha. Kawasan ini merupakan kawasan perlindungan tumbuhan dan satwa terutama satwa dilindungi yaitu Orangutan (*Pongo Pygmaeus*) yang berada didalam dan sekitarnya, serta merupakan areal yang mendukung daya tampung air, areal mata pencarian lokal terbatas terutama satwa air atau ikan dan mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Kawasan ini ditetapkan sebagai KEE melalui SK Bupati Pulang Pisau Nomor 445 Tahun 2019. Pembentukan forum pengelola KEE Lahan Basah Danau Bagantung ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 446 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019.

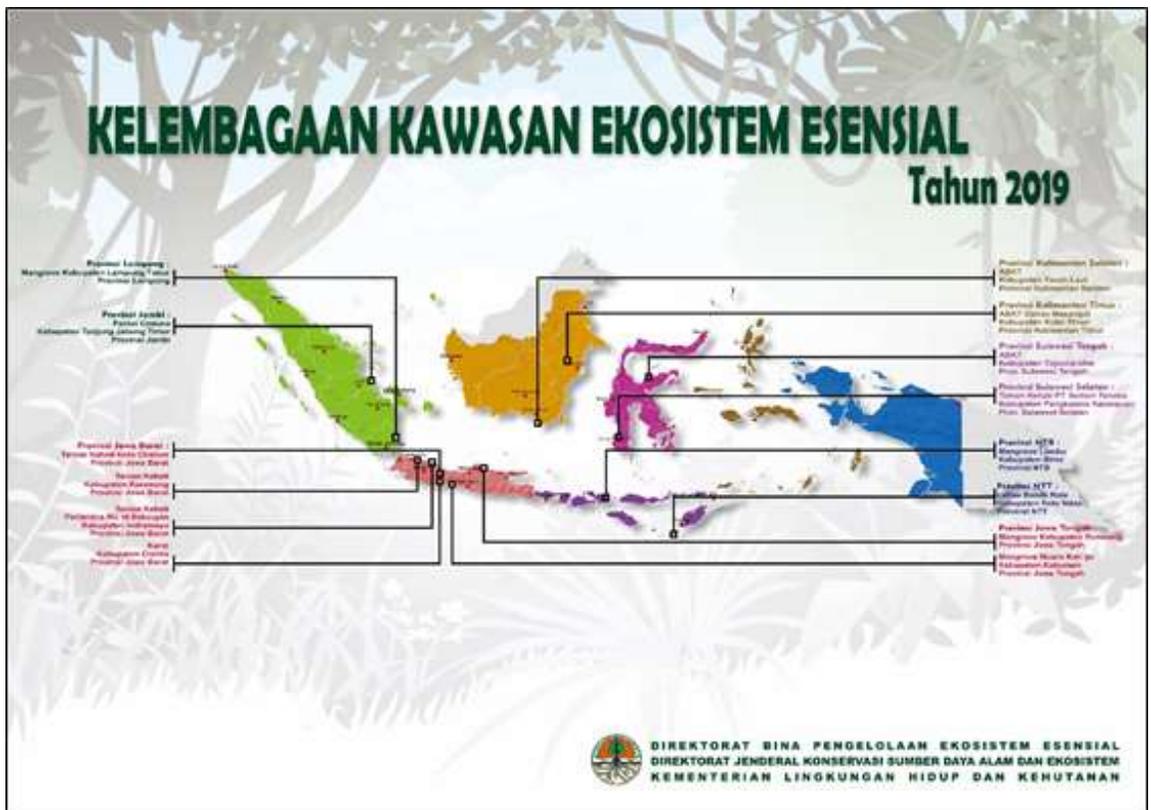
19. Mangrove Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan Pongok, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kawasan Ekosistem Mangrove Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan Pongok terletak di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kawasan ini dibentuk menjadi Kawasan Ekosistem Esensial dengan forum kolaborasi yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/949/DISHUT/2019

tanggal 25 Oktober 2019.

20. ABKT Penyu, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat

ABKT Penyu, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan melalui SK Bupati Lombok Utara Nomor 372/52/DLH-PKP/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Ekosistem Esensial Penyu Seluas 32,5 Hektar di Kabupaten Lombok Utara. Penetapan KEE Penyu di Kabupaten Lombok Utara ditindaklanjuti dengan pembentukan forum pelestari penyu. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan ekosistem penyu dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyu di Kabupaten Lombok Utara, melalui SK Bupati Lombok Utara Nomor 374.4/52.4/DLHPKP/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dibentuk Forum dan Sekretariat Forum Pelestari Penyu Kabupaten Lombok Utara.



Gambar 27. Lokasi KEE Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 5

Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa

Tenggara, Maluku, dan Papua)



Keanekaragaman hayati (kehati) di Indonesia sangat luar biasa jumlahnya, pada tahun 2014 berdasarkan keanekaragaman jenis yang telah diketahui ada sebanyak 1.500 jenis alga, 80.000 jenis tumbuhan berspora, 595 jenis lumut kerak, 2.197 jenis paku-pakuan serta 30.000–40.000 jenis flora tumbuhan berbiji, 8.157 jenis fauna vertebrata (mamalia, burung, herpetofauna, dan ikan) dan 1.900 jenis kupu-kupu (LIPI, 2014). Data dan informasi kehati perlu terus diupayakan untuk dilengkapi untuk dapat memetakan dan mengeksplorasi kekayaan hayati bangsa Indonesia. Banyaknya manfaat yang didapatkan dari kehati di Indonesia, salah satunya yaitu potensi untuk dijadikan obat yang dapat digunakan pada bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang *valid* dan *reliable* pada 7 wilayah biogeografi pada tahun 2019 mencapai 7 paket data dari target yang ditetapkan sebesar 7 paket data dari 7 ekoregion, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Bentuk data dan informasi yang disampaikan dapat berupa data dan informasi terkait tanaman obat, tanaman bioprospecting dan dokumen profil kehati daerah. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2019 tetap atau tidak mengalami kenaikan dan penurunan.

Hasil kegiatan yang telah direalisasikan pada tahun 2019 meliputi pengumpulan data dan informasi potensi identifikasi potensi *bioprospecting* (tanaman obat) di kawasannya. Pemenuhan data potensi tanaman obat/ tanaman *bioprospecting* tahun 2019 pada UPT lingkup Ditjen KSDAE yang mewakili masing-masing ekoregion, antara lain:

1. Balai Besar KSDA Papua Barat
2. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat
3. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
4. Balai KSDA Kalimantan Tengah
5. Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti
6. Balai Taman Nasional Meru Betiri
7. Balai Taman Nasional Ujung Kulon
8. Balai Taman Nasional Togean
9. Balai Taman Nasional Takabonerate
10. Balai Taman Nasional Kayan Mentarang
11. Balai Taman Nasional Manusea

Selain dari UPT Direktorat Jenderal KSDAE, pengumpulan data dan informasi keanekaragaman hayati juga dilakukan dengan permintaan data ke Dinas Lingkungan

Hidup Provinsi/ Kabupaten. Pada tahun 2019 Saat ini telah terkumpul 3 buku Profil Keanekaragaman Hayati Daerah. Pemenuhan data profil kehati daerah telah dilaporkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/ Kabupaten yang berasal dari 2 ekoregion yaitu Sumatera dan Jawa, yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan Provinsi Kepri
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang

Tabel 5. Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman Spesies dan Genetik 2019

No	Ekoregion/ Dinas LH/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi Bioprospecting Lainnya	Dokumen Profil Kehati Daerah
A Ekoregion Sumatera				
1	DLH Kabupaten Bintan			Profil Keanekaragaman Hayati Daerah Tahun 2018
2	Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat	-	Data spasial Tumbuhan Bioprospecting Kerinci Seblat	
B Ekoregion Jawa				
1	DLH DKI Jakarta		Film Dokumenter Lembaga Desa	Profil Keanekaragaman Hayati DKI Jakarta Tahun 2018
2	DLH Kabupaten Sumedang			Profil Keanekaragaman Hayati Sumedang Tahun 2018
3	BTN Meru Betiri	Data Potensi Bioprospeksi Tumbuhan Obat TN. Meru Betiri Triwulan I 2019	Identifikasi Biota Potensi Bioprospeksi (Lamun, alga, molusca, echinodermata)	
4	BTN Ujung Kulon	Data Spasial Tanaman Obat TN Ujung Kulon		
5	BBTN Bromo Tengger Semeru		Anggrek	
C Ekoregion Sulawesi				
1	BTN Togean	Potensi Tanaman Obat BTN Togean		
2	BTN Takabonerate		Identifikasi Biota Laut Potensi Bioprospecting Cagar Biosfer	
D Ekoregion Kalimantan				

No	Ekoregion/ Dinas LH/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi Bioprospecting Lainnya	Dokumen Profil Kehati Daerah
1	BKSDA Kalimantan Tengah	Tanaman Obat CA TWA Bukit Tangkiling		
2	BTN Kayan Mentarang	Identifikasi Biota Potensi Bioprospecting Cagar Biosfer		
E Ekoregion Bali dan Nusra				
1	BTN Matalawa		Sebaran Keanekaragaman Hayati Spesies Julang Sumba di TN. MATALAWA	
F Ekoregion Papua				
1	BBKSDA Papua Barat		Keanekaragaman Anggrek (Orchidaceae) di Taman Wisata Alam Sorong, Kota Sorong, Papua Barat	
G Ekoregion Maluku				
1	BTN Manusela	Data Sebaran Tanaman Obat Manusela	-	

(Sumber: Direktorat. KKH, 2019)

Target jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan *reliable* selama periode Renstra 2015-2019 sebanyak 7 paket yang terbagi atas 7 wilayah biogeografi. Sampai dengan tahun 2019, seluruh data dan informasi sebaran keanekaragaman hayati dan genetik pada 7 wilayah biogeografi tersebut telah tersedia, sehingga capaian kinerjanya yaitu 100%. Capaian IKP ini selama 5 tahun disajikan pada grafik berikut.



Gambar 28. Capaian jumlah paket data 2015-2019



Gambar 29. Dokumentasi Tim Survey Tanaman Obat Balai KSDA Kalimantan Tengah Tahun 2019

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKP ini antara lain 1). belum adanya regulasi yang mengatur terkait pengembangan *bioprospecting* sehingga UPT KSDAE kesulitan dalam melakukan aktivitas di lapangan. 2). tidak adanya juknis yang mengatur bisnis proses pelaksanaan pengambilan data dan informasi tersebut. 3). keterbatasan anggaran sehingga belum semua UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE dan Dinas Lingkungan Hidup yang mengalokasikan anggaran untuk identifikasi jenis tanaman obat dan tanaman yang memiliki prospek tinggi secara komersial (*bioprospecting*), dan atau menyusun dokumen profil kehati.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal KSDAE untuk mengatasi kendala yang dihadapi antara lain 1) Sosialisasi peraturan terkait akses SDG yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 tentang Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya. 2) melakukan komunikasi dengan UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE dan Dinas LH Provinsi/ Kabupaten, serta melakukan rekapitulasi data dan informasi terkait kehati yang telah disampaikan sehingga dapat dilakukan analisis sesuai kebutuhan.

Julang Sumba di TN Matalawa

Burung Julang Sumba merupakan 1 dari 13 jenis julang yang ditemukan di Indonesia. Satwa yang dikenal masyarakat lokal dengan sebutan Gonggali ini merupakan salah satu burung endemik Pulau Sumba. Habitatnya berada jauh dari daratan yang menjadi habitat julang lain serta tidak ditemukan di pulau-pulau lain di kepulauan nusa tenggara. *Rhyticeros everetti*, nama latin untuk burung ini sangat tergantung terhadap hutan primer dan hutan sekunder tua di pulau tersebut (Bashari dan Wungo, 2011). Dalam upaya menghimpun data perkembangan populasi Julang Sumba, TN Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (Matalawa) melakukan monitoring potensi keberadaan Gonggali. Hal ini dilakukan untuk melengkapi data dan informasi terkait populasi, sebaran dan tren populasinya. Monitoring dilakukan pada 6 site monitoring dengan 3 kali ulangan. Hasilnya, diperkirakan terdapat 103 ekor Julang Sumba pada lokasi monitoring. Tren perjumpaan Julang Sumba dalam 6 tahun (2014-2019) terjadi peningkatan, dari yang semula terdapat 31 ekor pada tahun 2014 menjadi 103 ekor pada tahun 2019 (BTN Matalawa, 2019).



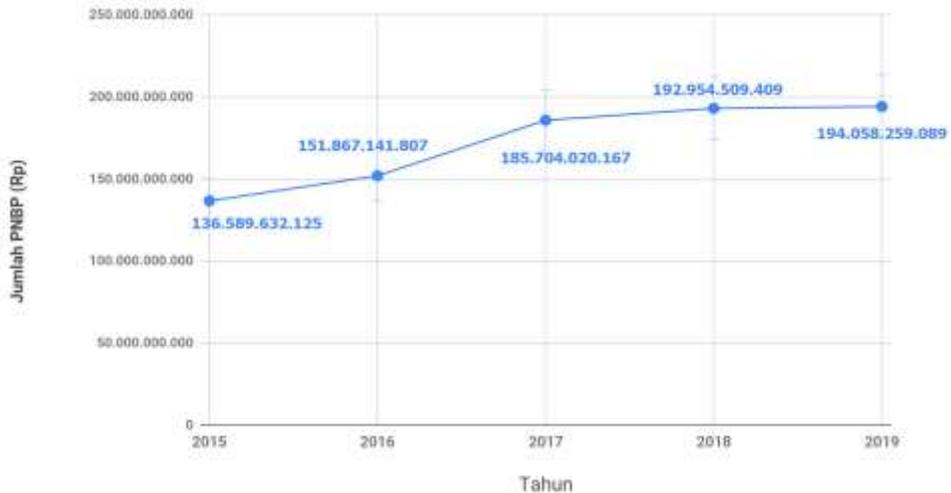
@Heri Andri



Gambar 30. Julang Sumba dan peta sebaran

Sasaran 2. Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNBP dari pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati

Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada kawasan konservasi bukan sesuatu yang dilarang, sepanjang pemanfaatan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dilakukan melalui pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL). Pemanfaatan jasa lingkungan dilakukan harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan fungsi kawasan. Sedangkan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar harus memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar tersebut.

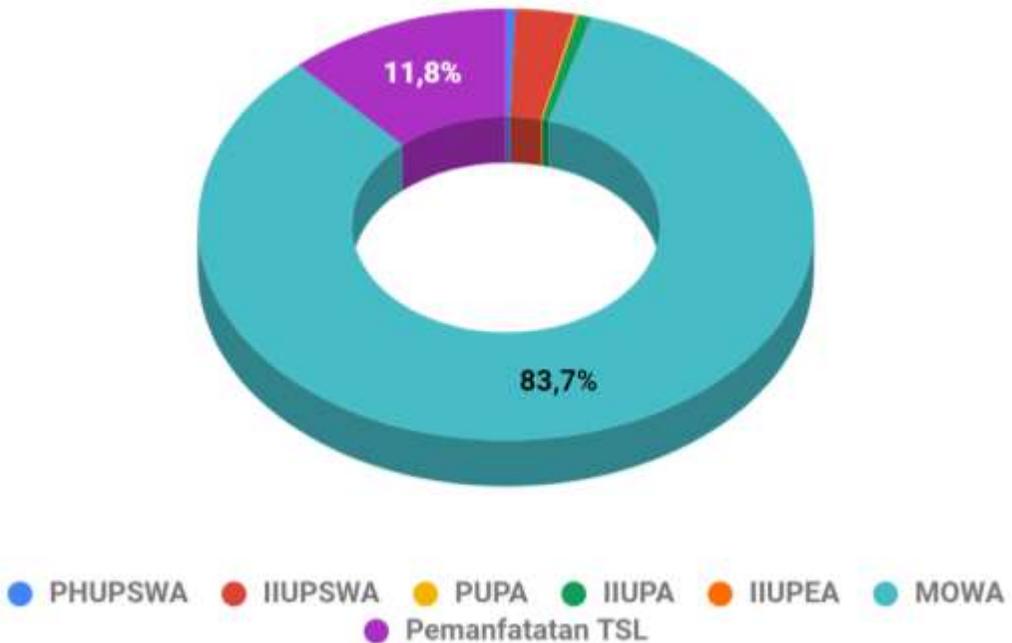


Gambar 31. Perkembangan PNBP Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL Tahun 2015-2019

(Sumber: Direktorat. PJKH dan Direktorat. KKH, 2019)

Pemanfaatan jasa lingkungan dan jenis tumbuhan dan satwa liar menghasilkan manfaat secara langsung yaitu PNBP Ditjen KSDAE. PNBP Ditjen KSDAE pada tahun 2019 yang berasal dari pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan TSL sebesar Rp. 194.058.259.089,-. PBNP pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan TSL tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,57% apabila dibandingkan dengan PNBP tahun 2018 atau sebesar Rp. 1.103.749.680,-.

PNBP pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan TSL berasal dari 7 jenis penerimaan yaitu Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (PHUPSWA) sebesar Rp.914.316.191,- (0,47%); Iuran Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IIUPSWA) sebesar Rp.6.138.289.826,- (3,16%); Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) sebesar Rp.284.436.778,- (0,15%); Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Air (IIUPA) sebesar Rp.1.324.037.000 (0,68%); Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IIUPEA) sebesar Rp.21.150.000 (0,01%); Masuk Obyek Wisata Alam (MOWA) atau tiket wisata sebesar Rp.162.503.366.750,- (83,74%) serta Pemanfaatan TSL sebesar Rp.22.872.662.544,- (11,79%).



Gambar 32. Jenis Penerimaan PNBP Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL Tahun 2019
(Sumber: Dit. PJLHK dan Dit. KKH, 2019)

Sasaran Program Ditjen KSDAE yang kedua terdiri atas 4 IKP, dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 150%. Dibandingkan tahun 2018, rata-rata capaian kinerja sasaran ini mengalami peningkatan sebanyak 10,49%, hal tersebut terjadi karena target pada 2 IKP lebih rendah dibandingkan target tahun 2018, serta masing-masing IKP realisasinya jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing IKP dibatasi 150% untuk menghindari bias perhitungan rata-rata capaian kinerja sasaran.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 1

Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp 25 Trilyun



Pemanfaatan jenis TSL harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan dasar-dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi. Dalam pemanfaatan TSL harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Ketentuan perdagangan TSL diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL, disamping itu terdapat pula beberapa regulasi teknis di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur perdagangan TSL.

Ekspor TSL Indonesia terbagi dalam ekspor jenis-jenis yang termasuk dalam daftar Apendiks CITES dan yang tidak termasuk dalam daftar Apendiks CITES (*Non Apendiks*). Pengiriman spesimen TSL ke luar negeri (ekspor) wajib diliput dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL dan Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (PE-TASL) dari Kementerian Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dan Termasuk Dalam Daftar Apendiks CITES.

Nilai ekspor pemanfaatan TSL dan bioprospecting pada tahun 2019 mencapai Rp. 10.037.487.412.147, - atau 200,75% dari target yang telah ditetapkan (Rp 5 T/tahun). Selama periode Renstra 2015-2019 nilai ekspor pemanfaatan TSL dan bioprospecting secara kumulatif sebesar Rp.43.315.440.283.865,- apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan selama 5 tahun sebesar 25 T maka capaian kinerjanya sebesar 173,26%. Selama kurun waktu 5 tahun (2015-2019) nilai ekspor pemanfaatan TSL dan bioprospecting mengalami fluktuasi, kenaikan mulai tahun 2015- 2018 nilai ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp.13.162.172.774.826. Pada tahun 2019 nilai ekspor mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp.3.124.685.362.679,-. Penurunan tersebut terjadi karena:

1. Berapa komoditi TSL ekspor yang tidak mewajibkan lagi penggunaan SATS-LN dalam pengiriman dan peredarannya, misalnya barang jadi berupa alat-alat musik dari kayu sonokeling.
2. Ekspor karang hias (koral) belum dapat dilaksanakan karena masih terkendala penerbitan *health certificate* oleh Kementerian Pertanian RI.

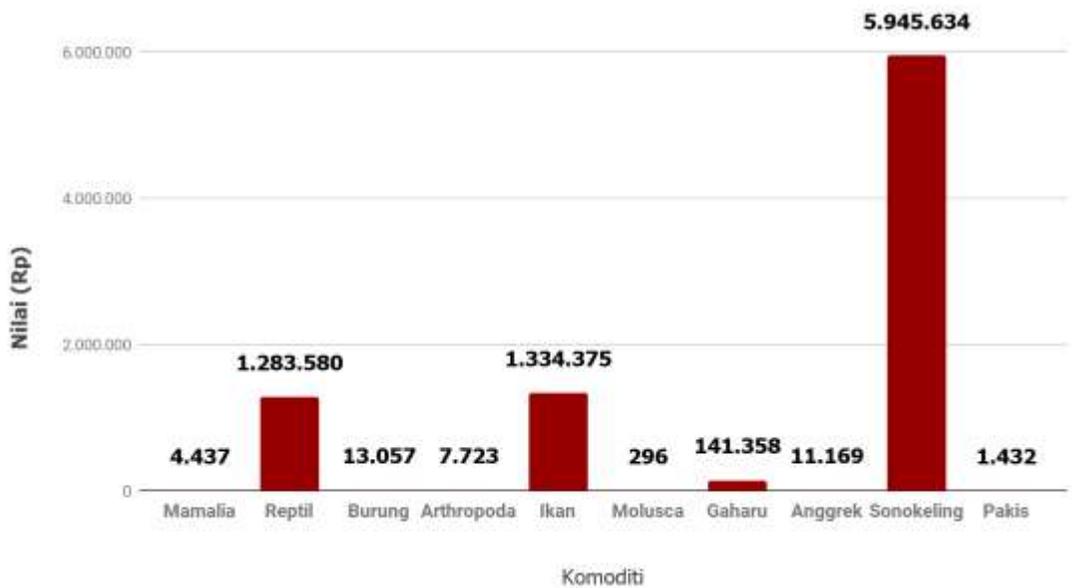


Gambar 33. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dan Bioprospecting 2015 (dalam Trilyun Rupiah) (Sumber: Direktorat KKH, 2019)



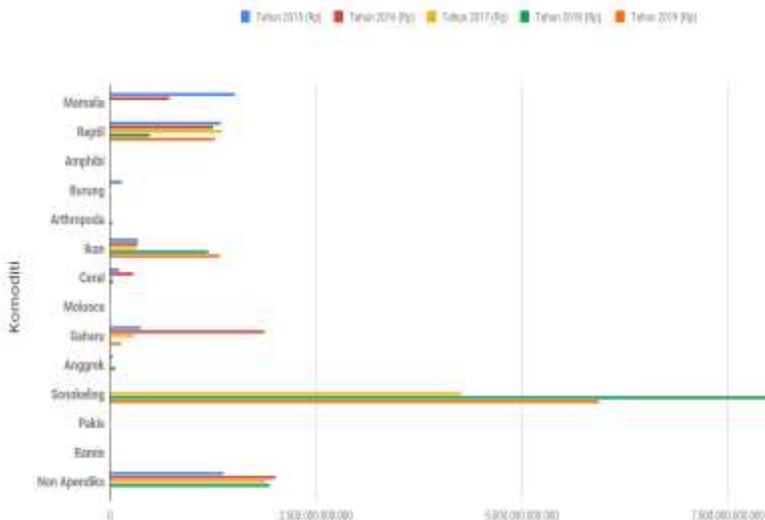
Gambar 34. Capaian Nilai Ekspor 2015-2019 (Sumber: Direktorat KKH, 2019)

Nilai ekspor pemanfaatan TSL yang termasuk apendiks CITES tahun 2019 dihasilkan dari 10 jenis komoditi yang terdiri atas 6 komoditas dari kelompok satwa dan 4 komoditas dari kelompok tumbuhan. Sonokeling menempati urutan terbesar penyumbang nilai ekspor TSL tahun 2019 (59,23%), nilai ekspor tahun 2019 per komoditas disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 35. Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL Perkomoditas Tahun 2019
(sumber: Direktorat KKH, 2019)

Selama periode 2015-2019 lima komoditas yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap nilai ekspor pemanfaatan TSL dan bioprospecting adalah Sonokeling (Rp. 19,57 T), Reptil (Rp. 5,742 T), Ikan (Rp. 3,54 T), Gaharu (Rp.2,7 T) dan mamalia (Rp. 2,27 T). Perbandingan nilai ekspor per komoditi selama 5 tahun terakhir disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 36. Perbandingan Nilai Ekspor pemanfaatan TSL dan bioprospecting Per-Komoditi Tahun 2015-2019
(Sumber: Direktorat KKH, 2019)

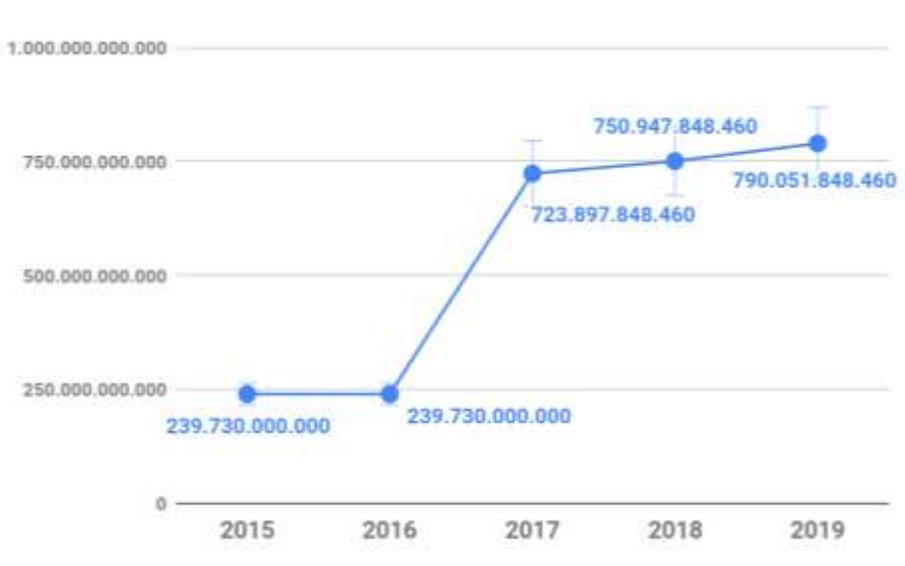
Secara keseluruhan Negara China merupakan tujuan utama ekspor TSL terutama untuk komoditas sonokeling, ikan, reptil, karang hias dan buaya. Negara Singapura merupakan negara tujuan ekspor TSL untuk komoditi Reptil, Ikan Hias, Gaharu, Buaya, Anggrek dan Arthropoda. Negara Saudi Arabia merupakan negara tujuan utama komoditi Gaharu baik dalam bentuk chip, block, dan abu. Negara Amerika negara tujuan ekspor komoditi karang hias, arthropoda, sonokeling, reptil, mamalia dan moluska. Selanjutnya Negara Taiwan merupakan tujuan ekspor untuk komoditi ikan, gaharu dan pakis. Berikut tabel 5 besar negara importir TSL periode tahun 2015 s/d 2019:

Tabel 6. Negara importir TSL periode tahun 2015 s/d 2019

No	Negara	Komoditi
1	China	Sonokeling, Ikan, Reptil, Karang Hias, Buaya
2	Singapura	Reptil, Ikan, Gaharu, Buaya, Anggrek, Arthropoda
3	Saudi Arabia	Gaharu
4	Amerika	Karang Hias, Arthropoda, Sonokeling, Reptil, Mamalia, Molusca
5	Taiwan	Ikan, Gaharu, Pakis

Sumber: Direktorat KKH, 2019

Usaha pada bidang pemanfaatan TSL memerlukan investasi yang tidak sedikit, nilai investasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan. Peningkatan jumlah pemegang Izin sehingga menyebabkan adanya penambahan jumlah pelaku usaha untuk tiap-tiap komoditi dan nilai investasi juga semakin meningkat. Masuknya Sonokeling dalam Appendiks CITES (Apendiks II) di akhir tahun 2016 menyebabkan ekspor Sonokeling harus sesuai dengan ketentuan CITES, regulasi nasional dalam pengaturan ekspor TSL mewajibkan mekanisme perizinan sehingga pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang signifikan.



Gambar 37. Jumlah Investasi Usaha Ekspor Bidang Pemanfaatan TSL 2015-2019

Sumber: Direktorat KKH, 2019



Gambar 38. Pemanfaatan TSL Gaharu



Gambar 39. Pemanfaatan TSL Sonokeling



Gambar 40. Pemanfaatan TSL Buaya, Arwana dan Katak sawah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 2

Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun



Kawasan konservasi di Indonesia bukan hanya menyimpan potensi keanekaragaman hayati, akan tetapi juga menyimpan potensi keindahan alam yang dapat dimanfaatkan menjadi obyek dan daya tarik wisata alam. Wisata alam di kawasan konservasi telah berkembang pesat dan memberikan dampak yang positif bagi negara, pengelola wisata maupun masyarakat sekitar lokasi wisata. Berbagai upaya promosi dan publikasi lokasi wisata di kawasan konservasi telah dilakukan dengan tujuan untuk menarik wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) untuk berkunjung, karena dengan banyaknya kunjungan wisatawan dapat memberikan dampak positif terhadap pemerintah, pengelola wisata dan masyarakat sekitar kawasan wisata. PNBP dari tiket masuk obyek wisata alam, pada tahun 2019 mencapai Rp.162.503.366.750,-, selain itu, bagi pemerintah daerah adanya kunjungan wisatawan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan secara tidak langsung juga dapat memberikan kesempatan penyerapan tenaga kerja di bidang wisata alam. Manfaat tidak langsung bagi masyarakat luas berupa kesempatan berusaha di bidang jasa-jasa wisata alam antara lain jasa transportasi, jasa informasi wisata, jasa pemandu, jasa penyediaan makanan/minuman, jasa penyediaan souvenir, dan lain-lain sebagainya.

Jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 466.460 orang atau 186,58% dari target yang ditentukan pada tahun 2019 yaitu 250.000 orang. Dibandingkan tahun 2018, jumlah kunjungan wisman tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 19.780 orang atau 20,19%. Adanya penutupan sementara beberapa obyek wisata akan berpengaruh pada penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung, contohnya pada TWA Tangkuban Perahu mengalami erupsi dan pendakian Gunung Semeru di TN Bromo Tengger Semeru karena adanya kebakaran hutan dan lahan pada kawasan tersebut. Perbandingan jumlah dan pertumbuhan (kenaikan dan penurunan) wisman ke kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 11 dan gambar 6.

Tabel 7. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Wisman (Orang)	% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2015	210.136	- 59,21
2016	481.518	+ 129,15
2017	414.989	- 13,82
2018	486.240	+ 17,17
2019	466.460	- 4,07
Jumlah	2.059.343	
Rata-Rata/ Thn	411.869	

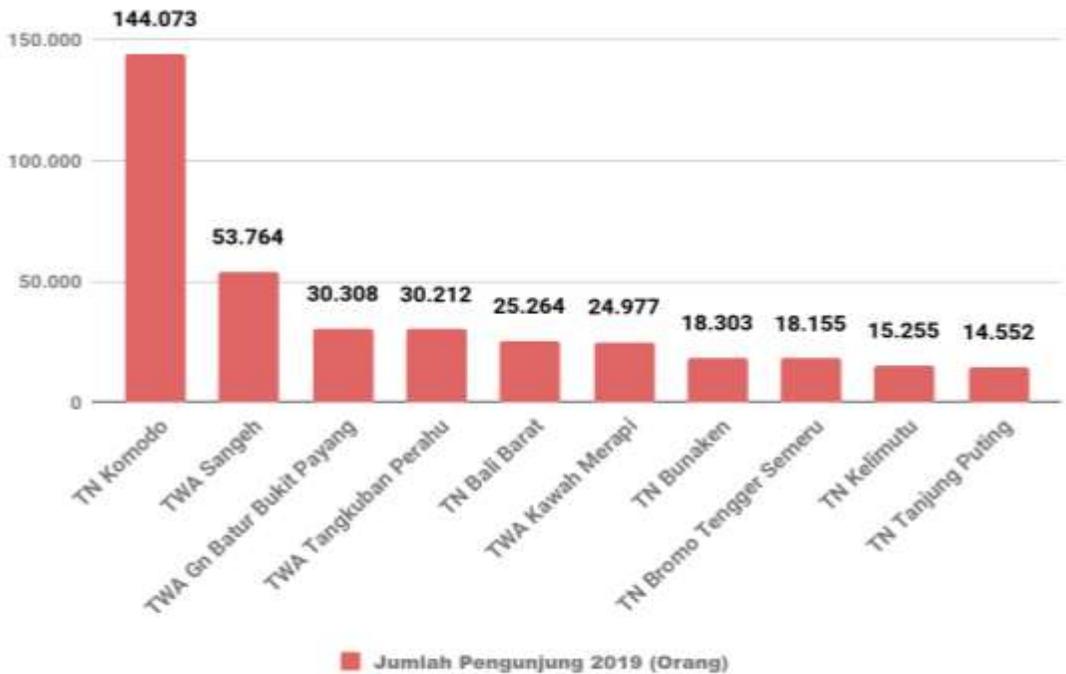
Sumber: Direktorat PJLHK, 2019

Berdasarkan data wisman selama 5 tahun (2015-2019), jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi sebanyak 2.059.343 orang atau 137,29% dari target yang telah ditetapkan di Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 sebesar 1.500.000 orang. Rata-rata kunjungan wisman ke kawasan konservasi setiap tahunnya sebesar 411.689 orang, dengan rata-rata pertumbuhan kenaikan wisman per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 13,84 % per tahun. Selama 5 tahun, kunjungan wisman terbanyak terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 486.240 orang dan terendah pada tahun 2015 sebesar 210.136. Beberapa faktor yang mempengaruhi banyaknya jumlah kunjungan wisman pada kawasan konservasi tahun 2019 yaitu 1). Trend masyarakat untuk wisata alam (*back to nature*); 2). Kemudahan mendapatkan informasi tentang destinasi wisata alam baik melalui media sosial, elektronik maupun cetak; 3). Sudah memadainya sarana prasarana pariwisata di beberapa destinasi; 4). Adanya kebijakan bebas visa kunjungan ke Indonesia dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016.



Gambar 41. Perbandingan Jumlah Wisman yang Berkunjung di Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019
(Sumber: Direktorat PJLHK, 2019)

Sepuluh kawasan konservasi yang paling banyak dikunjungi wisman pada tahun 2019 disajikan pada grafik berikut:



Gambar 42. Sepuluh Kawasan Konservasi Terbanyak yang Dikunjungi Wisman 2019
(Sumber: Direktorat PJLHK, 2019)

Tahun 2019, kunjungan wisman ke TWA Sangheh menempati urutan kedua setelah TN Komodo. Kawasan wisata yang berada Kabupaten Badung-Bali ini dikenal dengan julukan Sangheh Monkey Forest. Julukan ini tidak lain karena mudahnya satwa monyet ekor panjang yang dapat dijumpai pada kawasan tersebut Bagi masyarakat bali, primata ini merupakan salah satu satwa yang disakralkan. Pohon pala yang mendominasi kawasan membuat areal ini terasa sejuk, serta adanya beberapa pura tempat ibadah menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. TWA dgn luas 13,91 Ha ini berhasil menarik wisman sebanyak 53.764 org sepanjang tahun 2019, terjadi peningkatan sebanyak 459 orang dibanding tahun sebelumnya. Selain TWA Sangheh, TWA Gunung Batur Bukit Payang yang merupakan bagian dari kawasan BKSDA Bali yang mempunyai jumlah kunjungan wisman terbanyak ketiga yaitu sebesar 30.308 orang. Faktor letak kawasan konservasi di Bali berpengaruh terhadap besarnya jumlah pengunjung wisata, lokasi TWA berdekatan dengan beberapa obyek wisata lainnya seperti kawasan wisata Bedugul dan kawasan wisata Kintamani yang merupakan obyek-obyek wisata favorit di Bali.



Dalam pencapaian kinerja jumlah kunjungan wisman ini tidak lepas dari berbagai permasalahan, antara lain 1). Banyaknya akses jalan menuju kawasan konservasi yang tidak layak; 2). Terbatasnya sumber daya manusia yang handal seperti dalam penguasaan bahasa serta teknik interpretasi; 3). Kunjungan wisman tidak merata pada semua kawasan konservasi dan masih terfokus di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; 4). Belum semua kawasan konservasi melakukan kajian daya dukung kawasan; 5). Belum optimalnya kualitas pelayanan dan keselamatan pengunjung di kawasan konservasi; dan 6). Belum optimalnya penanganan dampak negatif aktivitas pengunjung seperti sampah dan lain sebagainya. Solusi yang telah dilakukan Ditjen KSDAE untuk mengatasi permasalahan diatas adalah: 1). Meningkatkan promosi melalui berbagai media 2). Menambah sarana dan prasarana pendukung pariwisata alam; 3). Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti Kementerian Pariwisata dalam promosi; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) dalam pembangunan akses jalan di beberapa kawasan konservasi; 6). Melakukan penyusunan maupun revisi terhadap sejumlah peraturan terkait pelayanan pengunjung; 7). Melakukan kajian daya dukung pengunjung pada 2 destinasi prioritas nasional; dan 8). Mengembangkan destinasi wisata alam baru pada kawasan-kawasan konservasi yang berpotensi untuk didatangi wisman selain di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 3

Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun

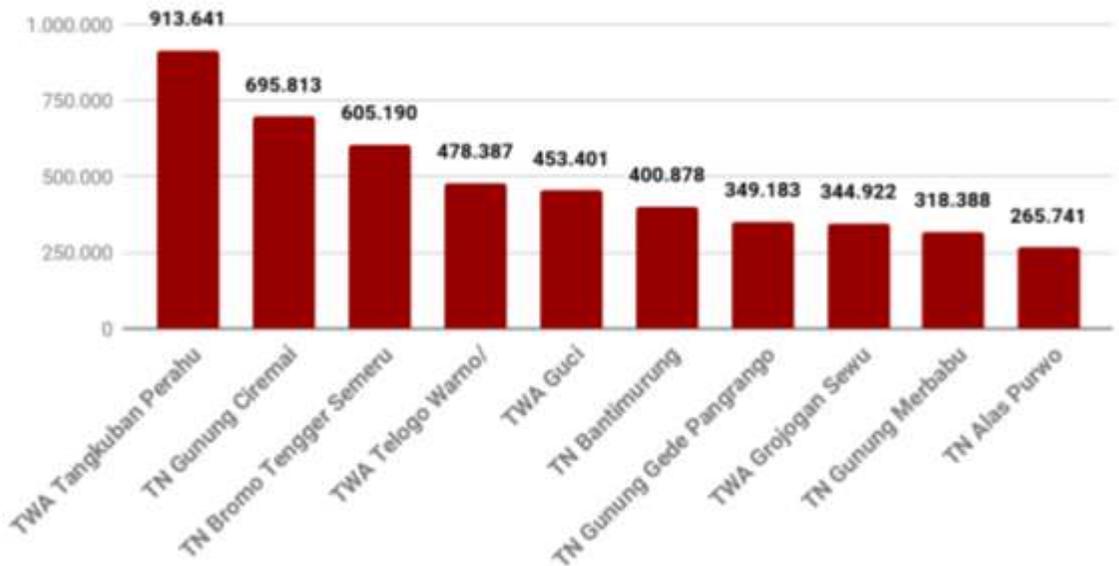


Kunjungan wisata nusantara (wisnus) pada kawasan konservasi dapat dijadikan kekuatan dalam pengembangan wisata alam di Indonesia, karena jumlah wisnus selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dan melebihi target yang telah ditentukan. Pada tahun 2019 jumlah wisnus pada kawasan konservasi mencapai 7.464.028 Orang, yang berarti meningkat sebesar 7,88% atau 544.920 Orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2019 target jumlah wisnus yang berkunjung pada kawasan konservasi yang ditetapkan Ditjen KSDAE sebanyak 4.500.000 Orang, sampai akhir tahun 2019 jumlah wisnus telah mencapai 7.464.028 orang atau 165,87% dari target. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 sebesar 20 juta wisnus, maka sampai dengan tahun kelima masa renstra tersebut jumlah wisnus telah mencapai 31.873.624 orang (capaian kinerja 159,37%) dengan rata-rata kunjungan 6.374.725 orang per tahun. Berdasarkan data kunjungan wisnus selama 5 tahun (2015-2019) menunjukkan adanya fluktuasi, dengan jumlah kunjungan terendah tahun 2015 dan kunjungan tertinggi pada tahun 2016.



Gambar 43. Jumlah Wisnus Tahun 2015-2019
(Sumber: Direktorat PJLHK, 2019)

Wisnus yang berkunjung ke kawasan konservasi pada tahun 2019 tidak tersebar secara merata pada 54 kawasan Taman Nasional (48 UPT TN), 131 TWA dan 11 TB (26 UPT KSDA). Sepuluh kawasan konservasi yang mendapat jumlah kunjungan wisnus terbesar tahun 2019 disajikan pada grafik berikut.



Gambar 44. Sepuluh Kawasan Konservasi Terbanyak yang Dikunjungi Wisnus pada Tahun 2019

Terpikat pada Pesona Keindahan TN Gunung Ciremai



Aliran Air Curug
Ipukan_@BTN G.Ciremai

Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) saat ini menjadi salah satu lokasi tujuan wisata yang cukup menarik bagi wisatawan nusantara, hal tersebut ditengarai dengan TNGC menempati urutan kedua dengan jumlah kunjungan wisnus terbanyak tahun 2019 yaitu sebanyak 695.813 orang (meningkat 76,41% dibanding tahun sebelumnya). Banyaknya keindahan alam yang dikembangkan menjadi obyek wisata di TNGC menambah pilihan bagi masyarakat untuk berwisata. Sampai dengan tahun 2019 terdapat 42 lokasi dari 69 obyek wisata yang telah dikembangkan, hal tersebut juga memberikan kontribusi PNBPN bagi negara dan kontribusi perekonomian bagi masyarakat sekitar maupun perusahaan swasta/daerah yang mengelola. PNBPN TNGC tahun 2019 dari sektor wisata mencapai Rp2.404.205.000,- atau meningkat 41,67% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (BTNGC, 2019).

Kaki Gunung
Ciremai_@BTN
Gunung Ciremai



Keindahan Curug
Putri_@BTN G.Ciremai

Sawah Pertanian
Sehat_@BTN G.Ciremai

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 4

Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 25 unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal sebanyak 5 unit)



IKP kemitraan pengelolaan kawasan konservasi terdiri atas 3 IKK yaitu Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013; Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit; serta Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit. Tahun 2019 telah terealisasi 142 unit kemitraan pengelolaan kawasan konservasi, apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 27 unit maka persentase capaian kinerjanya 150%. Tahun 2018-2019, realisasi IKP ini melebihi target yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pembatasan capaian kinerja sebanyak 150%, oleh karena itu capaian kinerja selama 2 tahun tetap.



Gambar 45. Rincian Jumlah Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi per-ICK Tahun 2019

(Sumber: Direktorat PJLHK, 2019)

Usaha Pemanfaatan Pariwisata Alam

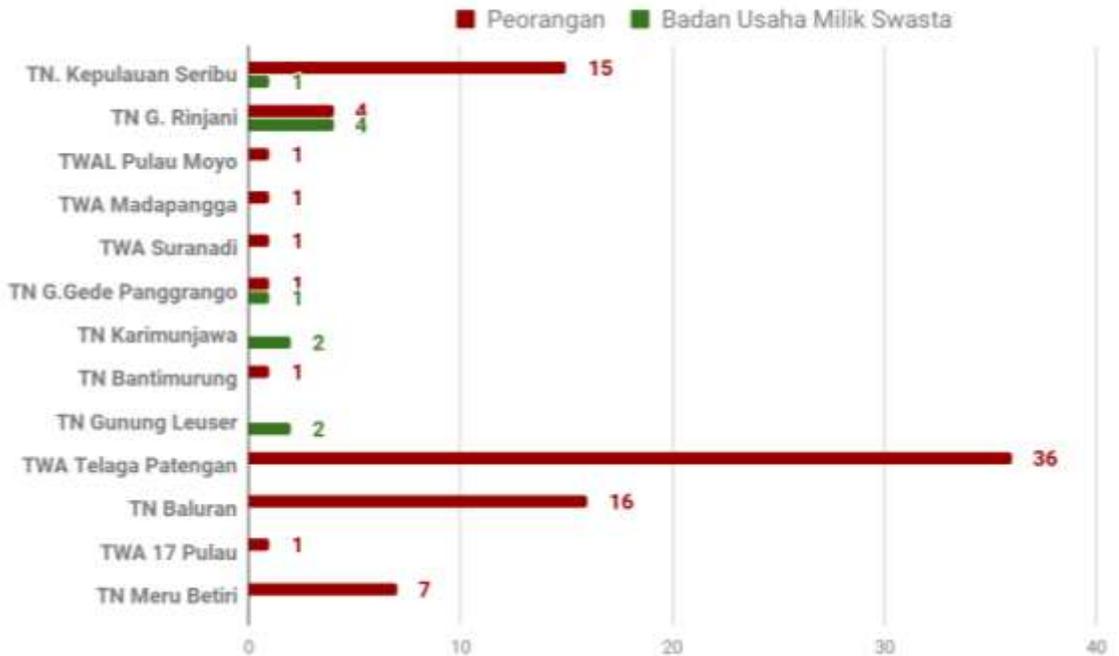
Izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam disebut dengan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA). IPPA dibagi menjadi 2 jenis yaitu Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam; dan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanan pada kegiatan pariwisata alam.

Pada tahun 2019 jumlah unit izin usaha pemanfaatan wisata alam yang diterbitkan sebanyak 98 unit yang terdiri atas 2 unit IUPSWA dan 96 unit IUPJWA. Jumlah unit usaha pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar sebanyak 53 unit dibandingkan tahun 2018 (117,78%). IUPSWA yang diterbitkan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. PT. Eigerindo Multi Produk Industri di TN Gunung Gede Pangrango
2. PT. NoorAlif Bencoolen di TWA Pantai Panjang dan Pulau Baai, Balai KSDA Bengkulu Lampung

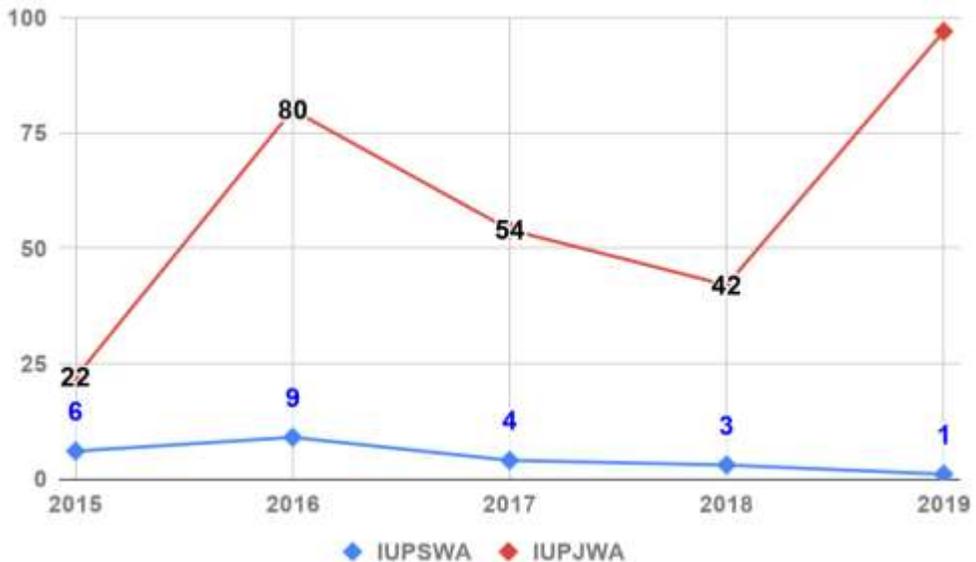
Sedikitnya IUPSWA yang diterbitkan karena beberapa hal berikut: 1) Adanya perubahan sistem perizinan yang semula melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai dengan Permenhut nomor P.01/Menhut-II/2015 atas perubahan Permenhut nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang LHK dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Kepala BKPM yang dialihkan pada sistem *Online Single Submission* (OSS); 2) Prakondisi lahan yang belum *clear and clean*; 3) Belum dipenuhi kewajiban/komitmen berupa izin lingkungan dari pemerintah daerah setempat.

Pengajuan IUPJWA dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha milik swasta, dan koperasi. Pada tahun 2019, 90% IUPJWA yang diterbitkan merupakan IUPJWA perorangan, dan 10% IUPJWA yang diajukan oleh swasta. Hal ini menunjukkan bahwa IUPJWA yang secara mandat diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat terealisasi cukup baik. Keikutsertaan masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan pariwisata alam sebagai tenaga kerja juga menjadi salah satu aktivitas peningkatan ekonomi masyarakat tersebut dan hal tersebut juga seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kawasan. Kegiatan pariwisata alam di kawasan konservasi sampai dengan tahun 2019 terdapat 1.853 tenaga kerja pada bidang IUPSWA dan terdapat 180 tenaga kerja pada bidang IUPJWA. Pencapaian kinerja IUPSWA dan IUPJWA serta kegiatan wisata alam lainnya memberikan kontribusi PNBPN kepada Negara sebesar Rp. 7.052.606.017,- Rincian 96 unit IUPJWA setiap kawasan konservasi disajikan pada grafik berikut.



Gambar 46. Sebaran Lembaga Usaha Jasa yang Izinnya Telah Diterbitkan pada Tahun 2019 pada setiap UPT
(Sumber: Direktorat PJLHK, 2019)

Selama periode Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 izin usaha pemanfaatan wisata alam yang telah diterbitkan sebanyak 318 unit terdiri atas 24 IUPSWA dan 294 IUPJWA, sehingga tercapai kinerja sebesar 318% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 100 unit.



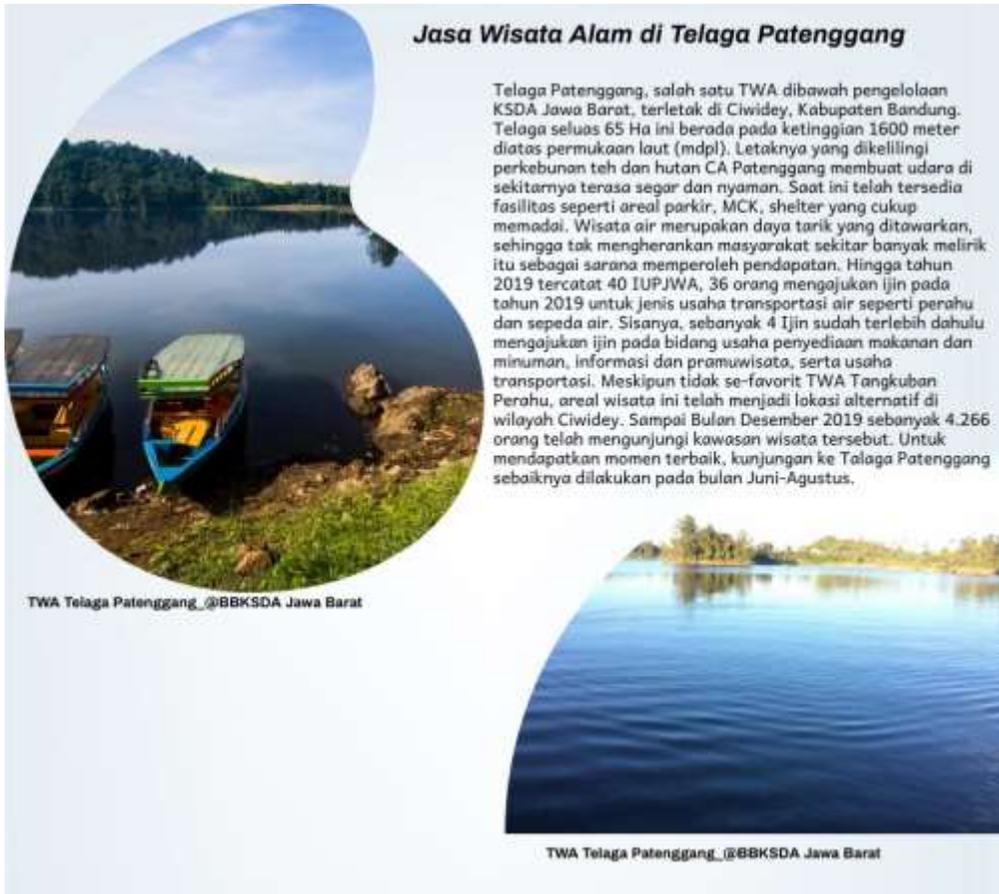
Gambar 47. Perkembangan IUPSWA dan IUPJWA Tahun 2015-2019

Hal-hal yang mendukung kinerja penerbitan izin usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi pada tahun 2019 yaitu:

1. Peran aktif seluruh UPT KSDAE dalam mempersiapkan pra kondisi kawasan seperti Rencana Pengelolaan, Penataan Zonasi/Bloking dan Desain Tapak sehingga kawasan tersebut siap untuk dipromosikan kepada para investor untuk melakukan investasi di kawasan dengan pengembangan pengusahaan pariwisata alam baik sarana untuk perusahaan dan jasa untuk masyarakat.
2. Upaya pihak UPT/Pusat dalam memberikan pelayanan dan informasi terkait perizinan jasa di kawasan hutan konservasi (TN dan TWA).
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya masyarakat sekitar kawasan dalam pengelolaan pariwisata alam berbasis masyarakat
4. Meningkatnya minat investor dalam menjalankan usaha di bidang pariwisata alam dikarenakan melihat trend pariwisata alam yang semakin berpotensi besar khususnya di kawasan hutan konservasi (TN dan TWA). Namun, terkadang masih terdapat investor yang kurang optimalnya penyelesaian kewajiban pengajuan perizinan pihak perusahaan, yang memperlambat proses penerbitan izin dan atau penolakan izin. Hal ini dapat diminimalisir dengan adanya penjelasan pihak UPT dan monitoring pihak pusat dalam mengevaluasi dan memonitoring perizinan khususnya jenis usaha IUPSWA.
5. Koordinasi antara UPT dan Direktorat dalam koordinasi informasi dan data.
6. Tersedianya sistem berbasis website dalam monitoring informasi dan data aspek PNPB, monitoring IPPA, pengendalian dan pemantauan IUPSWA dan Informasi potensi SM dan TB.
7. Penyusunan buku pedoman pengelolaan pariwisata alam berkelanjutan berbasis taman nasional.

Namun, disamping keberhasilan pencapaian di tahun 2019 ada beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian dalam pencapaian kinerja mendatang antara lain:

1. Penerbitan SK IUPJWA/IUPSWA yang perlu disampaikan dengan tepat waktu pada Direktorat Teknis dan instansi terkait;
2. Prakondisi kawasan untuk akomodir pengusahaan pariwisata alam harus sudah clean and clear
3. Mekanisme perizinan melalui sistem OSS perlu dikaji lebih lanjut terkait posisi pengawasan dan posisi UPT dalam penerbitan perizinan bidang wisata alam di kawasan konservasi.
4. Penyesuaian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) lingkup Direktorat Jenderal dengan aturan di atasnya.
5. Masih belum tersosialisasikannya aturan terkait pengusahaan pariwisata alam di tingkat tapak, khususnya terkait perizinan melalui lembaga OSS.



Jasa Wisata Alam di Telaga Patenggang

Telaga Patenggang, salah satu TWA dibawah pengelolaan KSDA Jawa Barat, terletak di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Telaga seluas 65 Ha ini berada pada ketinggian 1600 meter diatas permukaan laut (mdpl). Letaknya yang dikelilingi perkebunan teh dan hutan CA Patenggang membuat udara di sekitarnya terasa segar dan nyaman. Saat ini telah tersedia fasilitas seperti areal parkir, MCK, shelter yang cukup memadai. Wisata air merupakan daya tarik yang ditawarkan, sehingga tak mengherankan masyarakat sekitar banyak melirik itu sebagai sarana memperoleh pendapatan. Hingga tahun 2019 tercatat 40 IUPJWA, 36 orang mengajukan ijin pada tahun 2019 untuk jenis usaha transportasi air seperti perahu dan sepeda air. Sisanya, sebanyak 4 Ijin sudah terlebih dahulu mengajukan ijin pada bidang usaha penyediaan makanan dan minuman, informasi dan promuwisata, serta usaha transportasi. Meskipun tidak se-favorit TWA Tangkuban Perahu, areal wisata ini telah menjadi lokasi alternatif di wilayah Ciwidey. Sampai Bulan Desember 2019 sebanyak 4.266 orang telah mengunjungi kawasan wisata tersebut. Untuk mendapatkan momen terbaik, kunjungan ke Talaga Patenggang sebaiknya dilakukan pada bulan Juni-Agustus.

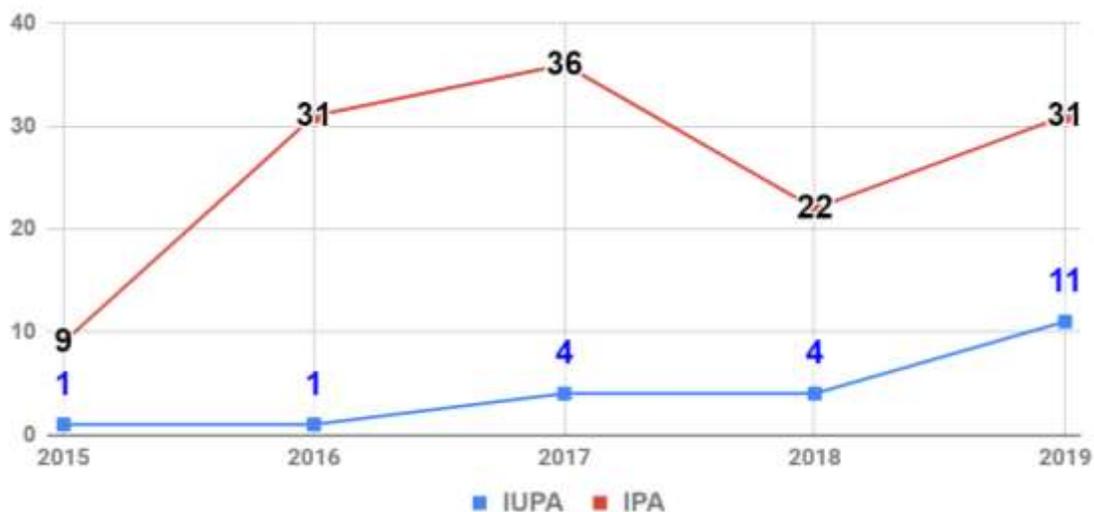
Gambar 48. Taman Wisata Alam Telaga Patenggang

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air

Pemanfaatan jasa lingkungan air dapat dilakukan pada areal yang telah ditetapkan sebagai Areal Pemanfaatan Air. Sampai Desember 2019, Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE berjumlah 33 unit pada 38 lokasi, yaitu 12 lokasi di TWA, 3 SM, 22 TN, dan 1 Tahura. Izin pemanfaatan jasa lingkungan air terdiri atas 2 izin yaitu Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) untuk kepentingan komersial dan Izin Pemanfaatan Air (IPA) untuk kepentingan non komersial. Pada tahun 2019 izin pemanfaatan jasa lingkungan air yang telah dikeluarkan sebanyak 42 unit, yaitu 11 unit IUPA dan 31 IPA. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebanyak 5 unit, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 840% (pembatasan nilai maksimal capaian kinerja 150,00%). IUPA sebanyak 11 unit semuanya berlokasi di TN Gunung Ciremai, sedangkan IPA sebanyak 31 unit berlokasi di TN Gunung Rinjani (1 unit), TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (1 unit), TN Gunung Gede Pangrango (23 unit), TN. Gunung Bromo Tengger Semeru (5 unit) , dan TN Bukit Tigapuluh (1 unit).

Pencapaian kinerja pemanfaatan jasa lingkungan air tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 61,54% apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu

sebanyak 16 unit. Realisasi pemanfaatan jasa lingkungan air selama periode Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 sebanyak 150 unit yang terdiri atas 21 IUPA dan 129 IPA, dengan capaian kinerja 600% dibandingkan dengan target 25 unit selama 5 tahun.



Gambar 49. Perkembangan IUPA dan IPA Tahun 2015-2019
(Sumber: Direktorat PJLHK, 2019)

Tabel 8. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Kawasan Konservasi 2015-2019

Tahun	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air (Unit)	% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2015	10	
2016	32	+244,44
2017	40	+37,93
2018	26	-38,89
2019	42	+61,54
Jumlah	150	
Rata-rata/ Thn	30	

Sumber: Direktorat PJLHK, 2019

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air khususnya kegiatan non komersial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk

keperluan sehari-hari. Jumlah Kepala Keluarga yang terpenuhinya kebutuhan air dari adanya IPA kurang lebih 89.852 KK di sekitar kawasan. Pada tahun 2019, kegiatan ini memberikan kontribusi PNPB untuk kepada Negara sebesar Rp. 1.608.473.778,- yang terdiri dari Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) sebesar Rp. 284.436.778,-; Iuran Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) sebesar Rp.1.324.037.000.

Dalam pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari permasalahan, antara lain: 1). Prakondisi kawasan konservasi terkait inventarisasi potensi dan penetapan areal pemanfaatan air masih terbatas hanya beberapa UPT (baru 33 UPT dari 74 UPT). Untuk mengatasi permasalahan ini, Direktorat PJLHK telah intensif melakukan bimbingan teknis dan memberi pengetahuan teknis melalui peningkatan kapasitas SDM bagi petugas UPT yang memiliki potensi jasa lingkungan air dan membuat surat edaran ke UPT terkait hal tersebut dijadikan prioritas; 2). Adanya usaha pemanfaatan air yang sudah *eksisting* di kawasan konservasi masih belum mengajukan izin, hal ini telah diberikan bimbingan teknis dan surat edaran ke UPT untuk memfasilitasi pemanfaatan air di wilayah kerjanya. 3). Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menyebutkan pada pasal 33 setiap orang dilarang melakukan pendayagunaan air di kawasan KSA dan KPA sehingga menimbulkan terhentinya permohonan usaha pemanfaatan air dan energi air untuk sementara waktu.

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

Kawasan konservasi mampu memasok energi terbarukan untuk kebutuhan manusia, salah satunya dengan adanya panas bumi yang ada didalamnya. Untuk mendukung kebijakan nasional dalam rangka kemandirian energi, khususnya pemanfaatan energi panas bumi di kawasan konservasi, Direktorat Jenderal KSDAE berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk/Setjen/Kum.15/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, berkomitmen memanfaatkan jasa lingkungan panas bumi di kawasan pelestarian alam dilaksanakan secara bijak dan terkendali dengan tetap mempertimbangkan prinsip konservasi.

Potensi tersebut tersebar di berbagai fungsi kawasan konservasi, antara lain:

- a. Taman Nasional (TN): TN Gn Leuser, TN Kerinci Seblat, TN Batang Gadis, TN Bukit Barisan Selatan, TN Gn Halimun Salak, TN Gn Gede Pangrango, TN Gn Ciremai, TN Gn Rinjani, TN Bogani Nani Wartabone, TN Lore Lindu, dan TN Kelimutu.
- b. Taman Hutan Raya (Tahura): Tahura Pocut Meurah Intan, Tahura Wan Abdur Rahman, Tahura GPAA Mangkunegara I, dan Tahura R Soeryo.
- c. Taman Wisata Alam (TWA): TWA Sibolangit, TWA Sijaba Hutaginjang, TWA Danau Tes, TWA Bukit Kaba, TWA Gn Tangkuban Perahu, TWA Cimanggu, TWA Kamojang, TWA Gunung Papandayan, TWA Gn Guntur, TWA Telaga Bodas, TWA Gn Tampomas, TWA Telaga Patengan, TWA Gn Pancar, TWA Telaga Warna, TWA Telogo Warno Pengilon, TWA Guci, TWA Grojogan Sewu, TWA Kawah Ijen, TWA Tretes, TWA Buyan Tamblingan, TWA Gn Ambang, TWA Ruteng, dan TWA Wera.

Jumlah Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) di kawasan konservasi yang diterbitkan pada tahun 2019 dengan jumlah target sebanyak 2 unit, sehingga apabila dibandingkan dengan target tahun 2019, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 100%. Selama 5 tahun periode Renstra 2015-2019 telah

disahkan 4 IPJLPB yang berada di kawasan konservasi dari target yang telah ditetapkan sebanyak 5 izin, sehingga capaian kinerjanya sebesar 80%. Capaian IPJLPB di kawasan konservasi selama 5 tahun dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 9. Jumlah IPJLPB di Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah IPJLPB (Unit)	% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2015	0	0
2016	1	+100
2017	1	0
2018	0	-100
2019	2	+200
Jumlah	4	

Sumber: Direktorat PJLHK, 2019

Lokasi IPJLPB yang diterbitkan pada tahun 2019 yaitu :

1. PT. Pertamina Geothermal Energy seluas 56,85 Hektar pada Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Kawah Kamojang, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, sesuai Surat Keputusan Nomor SK. 405/ Menlhk/ Setjen/ KSA.3/ 6/ 2019 tanggal 28 Juni 2019.
2. PT. Pertamina Geothermal Energy – Star Energy Geothermal Darajat II LTD, seluas 26 Hektar pada Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, sesuai Surat Keputusan Nomor SK.635/Menlhk/Setjen/KSA.3/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019.

IPJLB pada kawasan konservasi yang telah dikeluarkan pada periode Renstra 2015-2019 yaitu:

- a. PT. Pertamina Geothermal Energy – Chevron Geothermal Salak, Ltd. pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dengan Areal Kegiatan Usaha seluas 228,69 Hektar di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 1/1/IPJLPB/PMDN/2016 tanggal 12 Agustus 2016) dengan kapasitas terpasang sebesar 197 MW; dan
- b. PT. Indonesia Power pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Halimun Salak seluas 13,725 Hektar di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 1/1/IPJLPB/PMDN/2017 tanggal 17 Januari 2017) dengan kapasitas terpasang sebesar 180 MW.
- c. PT. Pertamina Geothermal Energy pada Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Kawah Kamojang seluas 56,85 Hektar, di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, sesuai Surat Keputusan Nomor SK. 405/ Menlhk/ Setjen/ KSA.3/ 6/ 2019 tanggal 28 Juni 2019.
- d. PT. Pertamina Geothermal Energy – Star Energy Geothermal Darajat II LTD, pada Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan, seluas 26 Hektar , di

Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, sesuai Surat Keputusan Nomor SK.635/Menlhk/Setjen/KSA.3/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019.

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi selain dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan tersedianya energi listrik, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi PNBPN kepada Negara dari iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi setelah proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. Pada tahun 2019 ini Direktorat PJLHK telah berhasil merumuskan besaran tarif iuran dan pungutan izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan yang selanjutnya akan diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Besaran tarif iuran dan pungutan IPJLPB yang diusulkan oleh Direktorat PJLHK adalah sebagai berikut :

- a. Iuran Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IIPJLPB). Iuran IPJLPB dikenakan 1 kali berdasarkan luasan areal kerjanya selama tahap eksplorasi dan/atau tahap eksploitasi dan pemanfaatan dengan besaran tarif sebesar Rp. 50.000.000,- per hektar per izin.
- b. Pungutan Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (PIPJLPB). Pungutan IPJLPB dikenakan berdasarkan resiko kerusakan atas pemanfaatan panas bumi. Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dalam perhitungan pungutan IPJLPB dipakai 4 komponen, yaitu nilai keanekaragaman hayati, nilai pengaturan tata air, nilai pelepasan karbon dan nilai perosotan karbon. Pungutan ini dikenakan tiap tahun pada tahap eksploitasi dan pemanfaatan sesuai luasan areal kegiatan usaha dalam mata uang Dollar Amerika dengan pertimbangan nilainya *automatically adjusted*.

PENYERAPAN TENAGA KERJA

Bidang usaha wisata alam dan pemanfaatan TSL secara ekonomi bukan hanya bermanfaat langsung pada negara dengan adanya PNBPN, tetapi mempunyai manfaat langsung bagi masyarakat, salah satunya adalah sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat terutama sekitar lokasi usaha. Tahun 2019 tercatat sebanyak 33.528 orang yang menjadi tenaga kerja pada usaha wisata alam dan pemanfaatan TSL. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 2.677 orang (8,68%) apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja pada tahun 2018. Penambahan jumlah pelaku usaha wisata alam dan pemanfaatan TSL mempunyai dampak yang nyata terhadap penyerapan tenaga kerja.



Gambar 50. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha Wisata Alam dan Pemanfaatan TSL Tahun 2017-2019

(Sumber: Direktorat. PJLHK dan Direktorat. KKH, 2019)

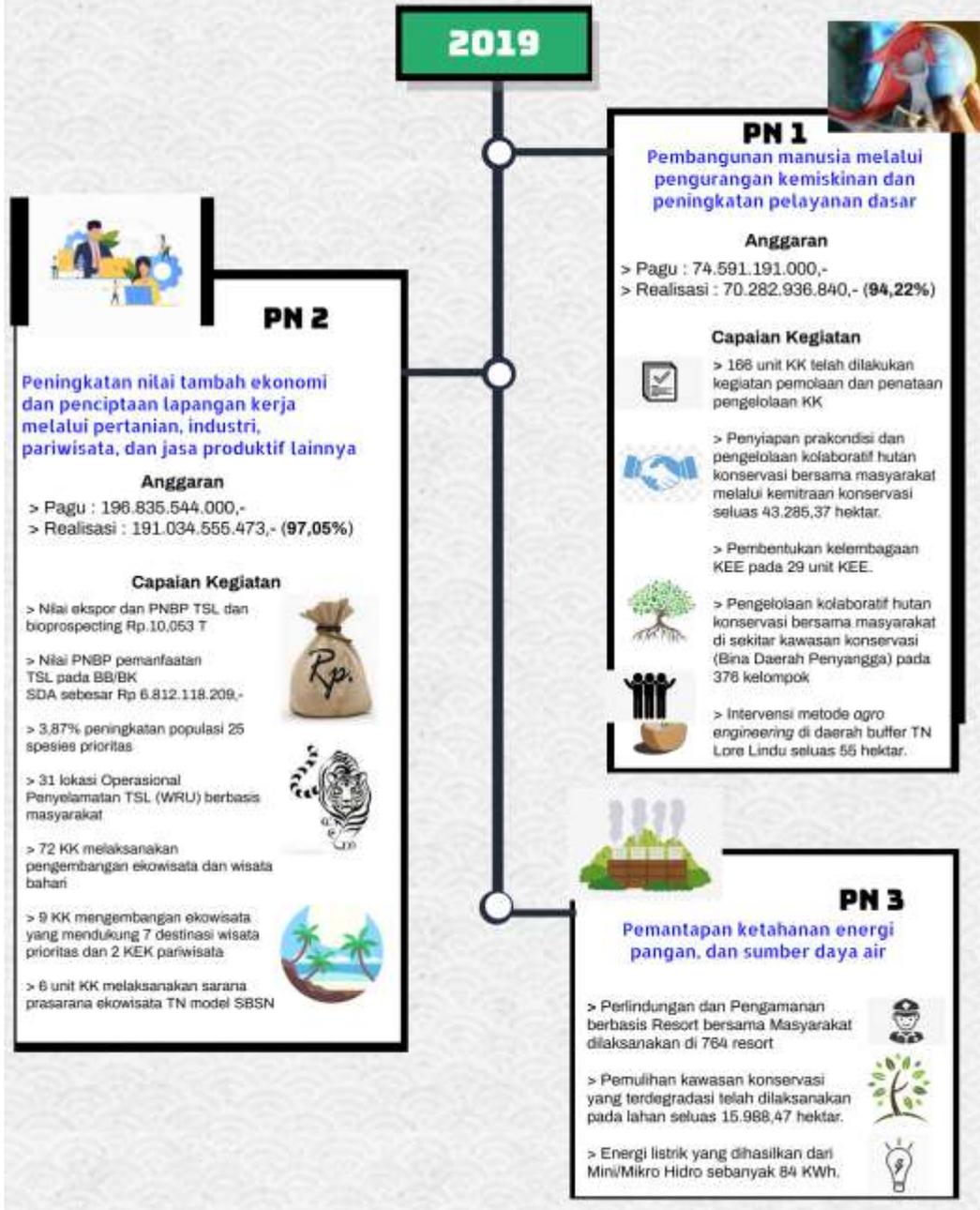
CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 disusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun yang di dalamnya memuat Proyek Prioritas Nasional (PN). Di tahun 2019, Rencana Kerja Pemerintah mengusung tema **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Dalam RKP 2019, pemerintah mencanangkan 5 Prioritas Nasional dan 24 Program Prioritas yang direncanakan hingga tingkat proyek dengan lokasinya (Provinsi/ Kabupaten/Kota) sehingga dapat lebih mudah untuk dikendalikan. Dari 5 Prioritas Nasional yang direncanakan, Direktorat Jenderal KSDAE mendapat mandat untuk melaksanakan 3 Prioritas Nasional, yaitu:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar,
2. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya, dan
3. Pemantapan ketahanan energi pangan, dan sumber daya air.

Capaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Prioritas Nasional tahun 2019 berdasarkan aplikasi SMART dan data dari Direktorat terkait, adalah sebagai berikut :

CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL



Gambar 51. Prioritas Nasional Ditjen KSDAE tahun 2019

CAPAIAN PROYEK SBSN

Sarana prasarana ekowisata Taman Nasional melalui pembiayaan SBSN dilaksanakan dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya. Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal KSDAE mendapatkan alokasi anggaran dari pembiayaan SBSN sebesar Rp 97.789.250.000,- dan telah terealisasi Rp 96.859.725.756,- atau 99,05%. Capaian proyek SBSN tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. BBTN Teluk Cendrawasih
 - a. Pembangunan *Whale Shark Center*
 - b. Pembangunan Resort Sowa Kwatisore
 - c. Pengadaan peralatan selam dan perlengkapan Resort Sowa Kwatisore
2. BTN Alas Purwo dengan dibangunnya Suaka Banteng Jawa dan sarana prasarana pendukungnya melalui kegiatan peningkatan kualitas sarana prasarana wisata di 4 lokasi yaitu Jatipapak, Trianggulasi (Sadengan), Sembulungan, dan Pancur.
3. BTN Bunaken dengan dibangunnya *Mangrove Park Mantehage Island* melalui:
 - a. Pembangunan information center dan building research
 - b. Pembangunan toilet pengunjung
 - c. Pembangunan mangrove trail sepanjang 1200 meter
 - d. Pembangunan menara pandang dan penelitian
 - e. Jaringan listrik, peralatan dan mesin
4. BTN Gunung Halimun Salak dengan dibangunnya sarana prasarana Tirta Terpadu dan pendakian gunung berbasis masyarakat melalui kegiatan pengembangan sarpras gedung bangunan, jalan dan jembatan di 4 lokasi yaitu Ciporolak, Curug Nangka, Sukamantri, dan Cimalati.
5. BTN Ujung Kulon dengan dibangunnya Pusat Konservasi Badak Jawa beserta sarpras pendukungnya antara lain dermaga, tracking mangrove, shelter panggung, dan gazebo panggung, di 5 lokasi yaitu Legon Pakis, Tanjung Lame, Pulau Handeuleum, Pulau Kalong, dan Cigenter.
6. BTN Aketajawe Lolobata dibangunnya suaka paruh bengkok.

Pagu dan Realisasi proyek SBSN Ditjen KSDAE 2019



- Lokasi: BTN Ujung Kulon
- Pembangunan Pusat Konservasi Badak dan Sarana Prasarana
- Pagu: Rp. 18.979.235.000,-
- Realisasi: Rp. 18.978.793.557,-



- Lokasi: BTN Aketajawa Lolobata
- Pembangunan Suaka Paruh Bengkok
- Pagu: Rp. 415.150.000,-
- Realisasi: Rp. 415.150.000,-



- Lokasi: BTN Bunaken
- Pembangunan Mangrove Park Mantehage Island
- Pagu: Rp. 10.967.815.000,-
- Realisasi: Rp. 10.372.687.500,-



- Lokasi: BBTN Teluk Cendrawasih
- Pembangunan Resort Sowa, Kwatisore dan Whale Shark Center
- Pagu: Rp. 33.505.000.000,-
- Realisasi: Rp. 33.464.025.000,-



- Lokasi: BTN Gunung Halimun Salak
- Pembangunan Sarana Prasarana Tirta Terpadu dan Pendakian Gunung Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Gunung Halimun Salak
- Pagu: Rp. 10.967.815.000,-
- Realisasi: Rp. 10.372.687.500,-



- Lokasi: BTN Alas Purwo
- Pembangunan Suaka Banteng Jawa dan Sarana Prasarana
- Pagu: Rp. 14.843.584.000,-
- Realisasi: Rp. 14.842.201.000,-



Gambar 52. Capaian Kegiatan SBSN Ditjen KSDAE Tahun 2019

CAPAIAN PROYEK AKSI TEMATIK

Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal KSDAE melaksanakan 2 aksi tematik yang dipantau langsung oleh Kantor Staf Presiden (KSP), yaitu tema Janji Presiden dan tema Maritim (Kebijakan Kelautan Indonesia).

Tema Janji Presiden (dokumentasi sama dengan SBSN)

Target : Pembangunan sarpras ekowisata di 3 Taman Nasional : Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan Taman Nasional Ujung Kulon.

Capaian : Telah terlaksana Pembangunan sarpras ekowisata di 3 Taman Nasional : Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan Taman Nasional Ujung Kulon.



Gambar 53. Sarana dan prasarana wisata BTN Ujung Kulon



Gambar 54. Sarana dan prasarana wisata BTN Gunung Halimun Salak



Gambar 55. Sarana dan prasarana wisata BTN Alas Purwo

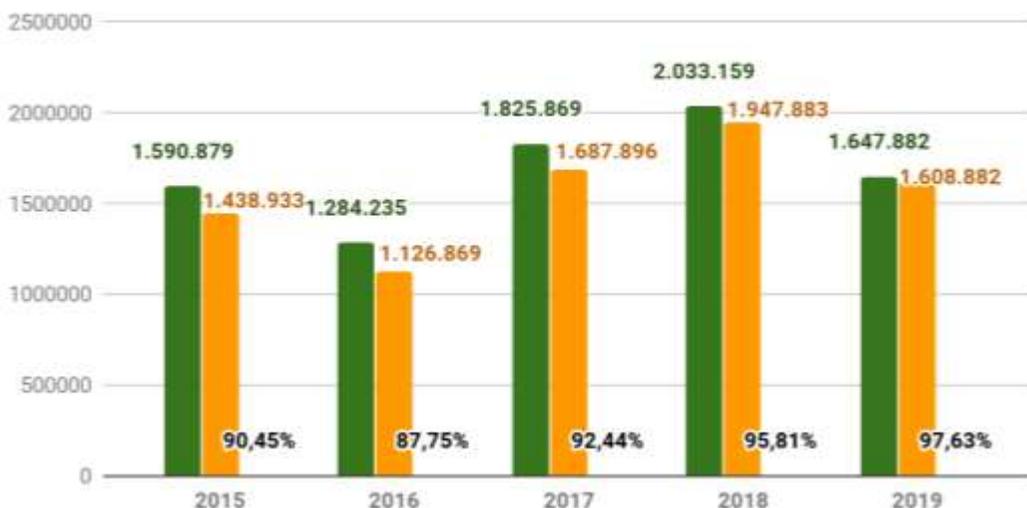
Tema Kebijakan Kelautan Indonesia

- **Pembangunan sarpras wisata bahari** (dokumentasi sama dengan SBSN)
Target : 2 Taman Nasional yaitu TN Bunaken dan TN Teluk Cenderawasih
Capaian : Telah dilaksanakan pembangunan sarpras wisata bahari di TN Bunaken dan TN Teluk Cenderawasih
- **Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut dan pesisir**
Target : 15 kawasan konservasi
Capaian : telah dilakukan kegiatan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut dan pesisir melalui penilaian METT pada 15 KK yaitu CA Pasar Talo Reg.94, CA Pulau Bokor, CA Watangan Puger I-VI, CA Pulau Sempu, CA Teluk Kelumpang, SM Muara Angke, SM Kuala Lupak, SM Pinjan/Tanjung Matop, SM Tanjung Amolengo, SM Tanjung Batikolo, TWA Sukawayana, TWA Sungai Liku, TWA Pleihari Tanah Laut, TWA Pulau Sangalaki, dan TWA Tanjung Keluang.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk membiayai kegiatan tahun 2019, pagu anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 sebesar Rp 1.647.881.906.000,-, dan telah terealisasi Rp 1.608.881.836.978,- atau 97,63% (Laporan Keuangan Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 *unaudited*). Penyerapan anggaran tahun 2019 merupakan penyerapan anggaran tertinggi selama 5 tahun terakhir. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran tahun 2015-2019 dapat dilihat sebagai berikut:

Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2015-2019 (Dalam Rp Juta)

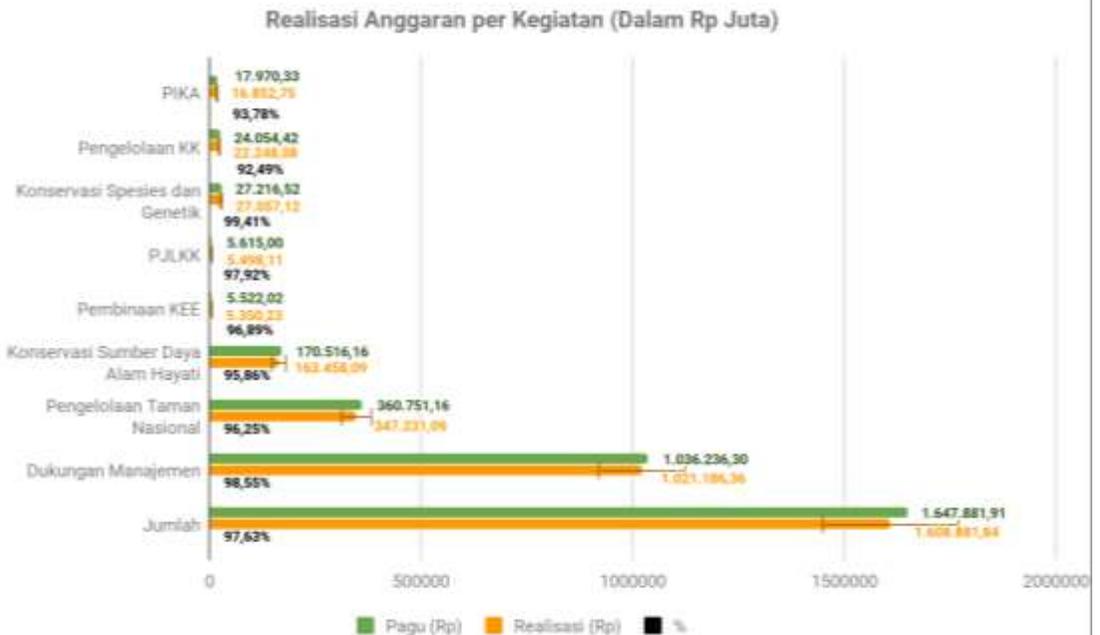


Gambar 56. Perbandingan Realisasi Ditjen KSDAE 2015-2019

Sumber: Setditjen KSDAE, 2019

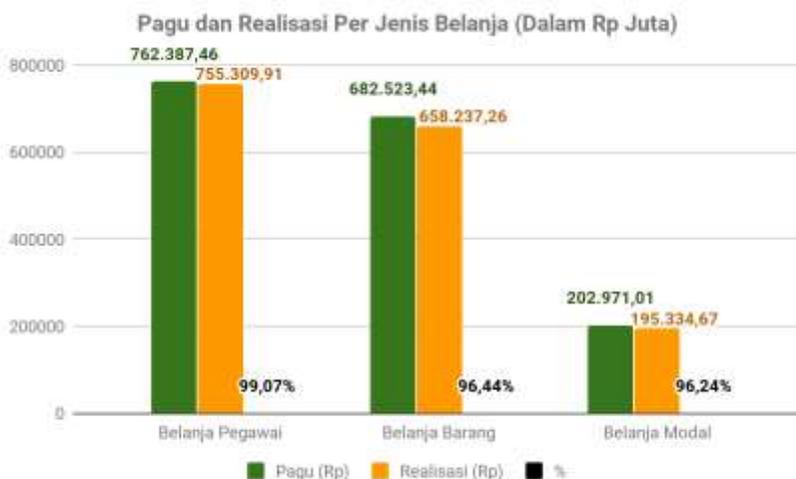
Pagu anggaran Direktorat Jenderal KSDAE selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Jika dibandingkan 2 tahun sebelumnya, pagu anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini diantaranya disebabkan alokasi pagu anggaran lingkup Kementerian LHK pada tahun 2019 difokuskan pada program Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (35,58% dari pagu total Kementerian LHK). Dan alokasi pagu anggaran Direktorat Jenderal KSDAE berada di posisi kedua (17,92%).

Sedangkan realisasi anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 merupakan realisasi anggaran tertinggi dibandingkan 5 tahun terakhir. Persentase realisasi anggaran tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 adalah sebesar 102,45%, tahun 2017 sebesar 105,71%, tahun 2016 sebesar 111,37% dan tahun 2015 sebesar 108,04%. Berdasarkan jenis kegiatannya, realisasi tertinggi adalah pada kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik (99,41%) dan terendah pada kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi (92,49%). Perbandingan pagu dan realisasi pada 8 kegiatan adalah sebagai berikut.



Gambar 57. Realisasi anggaran Ditjen KSDAE per kegiatan tahun 2019
Sumber: Setditjen KSDAE, 2019

Sedangkan jika dilihat berdasarkan jenis belanja, maka realisasi tertinggi adalah belanja pegawai (99,07%), dilanjutkan dengan belanja barang (96,44%), dan belanja modal (96,24%). Belanja pegawai digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan 6.624 orang pegawai Direktorat Jenderal KSDAE. Jumlah pegawai Direktorat Jenderal KSDAE tertinggi diantaranya Eselon I lingkup Kementerian LHK (40,14%).



Gambar 58. Realisasi Ditjen KSDAE per jenis belanja tahun 2019
Sumber: Setditjen KSDAE, 2019

Pada tahun 2019, terdapat enam jenis sumber dana yang digunakan untuk membiayai program konservasi sumber daya alam dan ekosistem, dimana alokasi pagu berdasarkan sumber dana tertinggi adalah Rupiah Murni (RM) sebesar 84,18%, selanjutnya SBSN sebesar 5,93%, dan PNBPN sebesar 4,55%. Dengan realisasi tertinggi adalah sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri (99,1%), disusul SBSN (99,05%), dan RM (98,02%).



Gambar 59. Realisasi Ditjen KSDAE per sumber dana tahun 2019
 Sumber: Setditjen KSDAE, 2019

Penyerapan anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 cukup tinggi yaitu sebesar 97,63%, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

1. Komitmen pimpinan, baik tingkat Eselon I, Satker pusat, ataupun UPT, sehingga pelaksanaan kegiatan dan anggaran dapat dioptimalkan sebagaimana yang telah direncanakan.
2. Dukungan para pihak dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem, diantaranya pada kegiatan pemulihan ekosistem pada beberapa lokasi dapat terlaksana karena adanya dukungan dari pihak ketiga.

Selain dukungan tersebut, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2019 antara lain:

1. Realisasi rendah pada kegiatan yang bersumber dana Hibah Luar Negeri (HLN), terutama pada BBTN Lore Lindu hanya terealisasi 61,35% dari pagu Rp 10,47 Miliar, hal ini disebabkan dalam setiap revisi kegiatan proses persetujuannya tidak hanya melalui konsultan lokal melainkan juga langsung melalui donatur (KfW) di Jerman, dikarenakan tidak adanya *national* dan *regional coordinator* dalam FP (*Forest Program*) III, proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama.

2. Pada belanja modal, terdapat Satker yang realisasinya rendah yaitu:
 - Direktorat Kawasan Konservasi dengan realisasi belanja modal sebesar 77,06%, dikarenakan adanya pagu yang diblokir yaitu untuk pengadaan kendaraan bermotor
 - BBTN Gunung Leuser dengan realisasi belanja modal sebesar 73,92%, yang disebabkan tidak dapat dilaksanakannya pembangunan pintu gerbang dan loket karcis di Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) Tangkahan karena lokasi yang berbatasan dengan luar kawasan konservasi.
3. Pada belanja barang, terdapat beberapa Satker yang realisasinya rendah yaitu:
 - BKSDA Kalimantan Timur dengan realisasi belanja barang sebesar 85,22%, hal ini disebabkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan penyusunan rekomendasi evaluasi fungsi kawasan karena belum ditetapkannya SK Menteri tentang Tim Teknis Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) CA Padang Luway.
 - BTN Way Kambas dengan realisasi belanja barang sebesar 88,09%, hal ini disebabkan tidak optimal realisasi pada kegiatan peningkatan populasi satwa, kemitraan konservasi, dan pemulihan ekosistem.

Jika rata-rata pencapaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 sebesar 141,67% dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 97,63%, didapatkan hasil rasio efisiensi sebesar 1,45, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 berjalan secara efisien.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Direktur Jenderal KSDAE kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas pelaksanaan kinerja program tahun 2019. Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan, rata-rata capaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2019 adalah sebesar 141,67% dengan realisasi anggaran sebesar 97,63%. Perbandingan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran adalah 1,45, hal ini menunjukkan dalam pencapaian kinerja tahun 2019 berjalan secara efisien. Sedangkan jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2018 (109,34%), maka terjadi peningkatan efektivitas pencapaian kinerja yang melampaui kinerja tahun sebelumnya.

Keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2019 didukung berbagai hal antara lain:

1. Dalam upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi didukung dari tingkat tapak (UPT), Eselon II terkait, Eselon I lainnya, pemerintah daerah serta masyarakat.
2. Dalam peningkatan populasi satwa didukung upaya konservasi sebagai intervensi pengelolaan, antara lain pembinaan habitat, penyadartahuan, perlindungan pengamanan, penanggulangan konflik, penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepasliaran.
3. Dalam peningkatan nilai ekspor TSL, jumlah pemegang izin bertambah sehingga pelaku usaha untuk tiap-tiap komoditi dan nilai investasi juga semakin meningkat.
4. Peningkatan jumlah pengunjung di kawasan konservasi dipengaruhi beberapa hal, antara lain trend masyarakat untuk wisata alam (*back to nature*), kemudahan mendapatkan informasi tentang destinasi wisata alam baik melalui media sosial, elektronik maupun cetak, dan sarpras wisata yang memadai.
5. Dalam pembentukan kelembagaan KEE didukung oleh komitmen pemerintah daerah terhadap pembentukan KEE, tersedianya anggaran pembentukan KEE pada UPT KSDAE, inisiatif pihak swasta dalam pembentukan KEE, dan terciptanya koordinasi antara Direktorat Jenderal KSDAE dengan pemerintah daerah.

Untuk senantiasa meningkatkan kinerja, kedepannya Direktorat Jenderal KSDAE akan melakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Meningkatkan kunjungan wisatawan di kawasan konservasi melalui promosi, menambah sarpras pendukung pariwisata alam, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti Kementerian Pariwisata dalam promosi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) dalam pembangunan akses jalan di kawasan konservasi, dan penyusunan maupun revisi terhadap sejumlah peraturan terkait pelayanan pengunjung.
2. Mendorong penyelesaian penyusunan *policy paper* KPHK yang akan membahas *redesign* kebijakan KPHK baik dari aspek pembentukan, kelembagaan, dan sebagainya. Hal tersebut dikarenakan dibutuhkan untuk kebijakan keberlanjutan operasional KPHK.
3. Meningkatkan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi dengan mendorong terbitnya izin usaha tepat waktu, melakukan sosialisasi terkait perizinan melalui lembaga OSS, serta melakukan kajian lebih lanjut terhadap sistem OSS yang

berkaitan dengan pengawasan dan posisi UPT dalam penerbitan perizinan bidang wisata alam di kawasan konservasi.

4. Meningkatkan upaya pemetaan dan inventarisasi data informasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik di kawasan konservasi.
5. Meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan melakukan upaya perbaikan sebagaimana yang telah direkomendasikan dari penilaian sebelumnya, antara lain melalui penataan blok/zonasi, penyusunan RPJP, RPJPn, kegiatan perlindungan pengamanan, koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat sekitar kawasan serta pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Bashari H. dan Wungo E.Y. 2011. Laporan Survey Burung di Taman Nasional Manupeu Tanadaru, Sumba, Nusa Tenggara Timur. Burung Indonesia. Sumba.

[LIPI] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2014. Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia 2014. LIPI Press, Jakarta.

[BTNGC] Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. 2020. Laporan Kinerja TN Gunung Ciremai Tahun 2019. Balai TN Gunung Ciremai. Kuningan.

[BTN Matalawa] Balai Taman Nasional Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti. 2019. Monitoring Populasi Kakatua dan Julang Sumba di Taman Nasional Matalawa. Balai TN Matalawa. Waingapu.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE 2019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. WIRATNO, M.Sc

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jakarta, Desember 2018

Pihak Pertama,

Ir. WIRATNO, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
01	02	03	04
a.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati	<p>Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dan 521 unit KK di seluruh Indonesia</p> <p>Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit</p> <p>Persentase peningkatan populasi 25 spesies satwa terancam punah prioritas (sesuai The IUCN Red List of Threatened Species) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013</p> <p>Jumlah unit kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolannya sebanyak 48 Unit</p> <p>Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua)</p>	<p>80 unit</p> <p>60 Unit</p> <p>2%</p> <p>5 Unit</p> <p>7 paket</p>
b.	Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNDP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	<p>Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp 25 Triliun</p> <p>Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun</p> <p>Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun</p> <p>Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 unit, pemanfaatan jasa lingkungan sebanyak 25 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal sebanyak 5 Unit)</p>	<p>Rp. 5 T</p> <p>250.000 Orang</p> <p>4.500.000 orang</p> <p>27 Unit</p>

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (x Rp. 1.000,-)
	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1.589.553.025
1.	Pemetaan dan Informasi Konservasi Alam	
2.	Pengelolaan Kawasan Konservasi	
3.	Konservasi Spesies dan Genetik	
4.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	
5.	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	
6.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	
7.	Pengelolaan Taman Nasional	
8.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	

Jakarta, Desember 2018

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc.

DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM


Ir. WIRATNO, M.Sc.
NIP. 19620328 198903 1 003

Lampiran 2. Data Capaian Nilai Indeks Efektivitas Peningkatan Kawasan Konservasi

Nilai METT 2015-2019

No	Fungsi Kawasan	Nama Kawasan Konservasi	Provinsi	Nilai METT
Tahun 2015				
1	TN	Bali Barat	Bali	73
2	TN	Bantimurung Bulusaraung	Sulawesi Selatan	71
3	TN	Danau Sentarum	Kalimantan Barat	70
4	TN	Gunung Gede Pangrango	Jawa Barat	80
5	TN	Gunung Halimun Salak	Banten & Jawa Barat	71
6	TN	Ujung Kulon	Banten	77
7	TN	Wasur	Papua	70
8	TN	Alas Purwo	Jawa Timur	75
9	TNL	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	70
10	TNL	Kepulauan Karimun Jawa	Jawa Tengah	73
11	TNL	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	79
Tahun 2016				
12	CA	Gunung Tangkuban Perahu	Jawa Barat	70
13	CA	Pananjung Pangandaran	Jawa Barat	70
14	TN	Baluran	Jawa Timur	71
15	TN	Bogani Nani Wartabone	Sulawesi Utara & Gorontalo	70
16	TN	Bromo Tengger Semeru	Jawa Timur	71
17	TN	Bukit Baka Bukit Raya	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah	70
18	TN	Bukit Barisan Selatan	Bengkulu, Lampung	71
19	TN	Gunung Ciremai	Jawa Barat	70
20	TN	Gunung Leuser	Aceh, Sumatera Utara	70
21	TN	Gunung Merapi	Jawa Tengah & DIY	70
22	TN	Gunung Palung	Kalimantan Barat	70
23	TN	Gunung Rinjani	Nusa Tenggara Barat	70
24	TN	Komodo	Nusa Tenggara Timur	70
25	TN	Kutai	Kalimantan Timur	70
26	TN	Manupeu Tanah Daru	Nusa Tenggara Timur	70
27	TN	Meru Betiri	Jawa Timur	70
28	TN	Tanjung Puting	Kalimantan Tengah	71
29	TWA	Lejja	Sulawesi Selatan	70

No	Fungsi Kawasan	Nama Kawasan Konservasi	Provinsi	Nilai METT
30	TN	Lore Lindu	Sulawesi Tengah	70
31	TN	Bukit Tigapuluh	Riau, Jambi	70
32	TN	Merbabu	Jawa Tengah	76
33	TN	Sebangau	Kalimantan Tengah	78
34	TNL	Teluk Cenderawasih	Papua Barat	73
35	TNL	Taka Bonerate	Sulawesi Selatan	74
36	TNL	Bunaken	Sulawesi Utara	71
37	TWA	Gunung Papandayan	Jawa Barat	74
38	TWA	Kawah Gunung Tangkuban Perahu	Jawa Barat	73
39	TWA	Pananjung Pangandaran	Jawa Barat	72
40	THR	Ir. H. Djuanda	Jawa Barat	74
Tahun 2017				
41	CA	Danau Dusun Besar Reg.61	Bengkulu	70
42	CA	Gunung Batu Gamping	DI Yogyakarta	70
43	CA	Gunung Tilu	Jawa Barat	72
44	SM	Cikepuh	Jawa Barat	70
45	CA	Pager Wunung Darupono	Jawa Tengah	73
46	CA	Karang Bolong	Jawa Tengah	72
47	CA	Cabak	Jawa Tengah	71
48	THR	R. Soeryo	Jawa Timur	72
49	CA	Gunung Celering	Jawa Tengah	71
50	CA	Pringombo I	Jawa Tengah	70
51	CA	Keling II/III	Jawa Tengah	70
52	CA	Gunung Picis	Jawa Timur	76
53	CA	Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup	Jawa Timur	72
54	CA	Gunung Sigogor	Jawa Timur	70
55	CA	Pulau Nusa Barung	Jawa Timur	70
56	CA	Kepulauan Krakatau	Lampung	75
57	CA	Waigeo Barat	Papua Barat	71
58	CA	Ponda-ponda	Sulawesi Selatan	77
59	CA	Kalaena	Sulawesi Selatan	74
60	CA	Lamedae	Sulawesi Tenggara	71

No	Fungsi Kawasan	Nama Kawasan Konservasi	Provinsi	Nilai METT
61	THR	Sinjai/Abdul Latief	Sulawesi Selatan	74
62	SM	Paliyan	DI Yogyakarta	70
63	SM	Sermo	DI Yogyakarta	71
64	SM	Pulau Bawean	Jawa Timur	75
65	SM	Tanjung Peropa	Sulawesi Tenggara	70
66	SM	Dangku	Sumatera Selatan	73
67	TWA	Pulau Weh	Aceh	73
68	TWA	Angke Kapuk	DKI Jakarta	80
69	TWA	Kerandangan	Nusa Tenggara Barat	70
70	TN	Berbak	Jambi	70
71	TWA	Grojogan Sewu	Jawa Tengah	78
72	TWA	Telogo Warno/ Telogo Pengilon	Jawa Tengah	75
73	TWA	Gunung Selok	Jawa Tengah	70
74	TWA	Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup	Jawa Timur	78
75	TWA	Gunung Tunak	Nusa Tenggara Barat	71
76	TWA	Sorong	Papua Barat	70
77	TWA	Punti Kayu	Sumatera Selatan	71
78	THR	Ngurah Rai	Bali	70
79	TN	Aketajawe Lolobata	Maluku Utara	70
80	TWA	Telaga Warna	Jawa Barat	70
Tahun 2018				
81	CA	Bantarbolang	Jawa Tengah	70
82	CA	Gunung Burangrang	Jawa Barat	74
83	CA	Dolok Sibual-buali	Sumatera Utara	70
84	CA	Durian Luncuk I	Jambi	71
85	CA	Durian Luncuk II	Jambi	73
86	CA	Gunung Raya Pasi	Kalimantan Barat	70
87	CA	Jatinegara	Jawa Tengah	70
88	CA	Ht. Bakau Pantai Timur	Jambi	70
89	CA	Kecubung Ulolanang	Jawa Tengah	71
90	CA	Sukawayana	Jawa Barat	70
91	CA	Keling I	Jawa Tengah	72
92	CA	Kembang	Jawa Tengah	70

No	Fungsi Kawasan	Nama Kawasan Konservasi	Provinsi	Nilai METT
93	CA	Moga	Jawa Tengah	70
94	CA	Nusakambangan Barat	Jawa Tengah	70
95	CA	Manggis Gadungan	Jawa Timur	72
96	CA	Mangunan/Imogiri	DI Yogyakarta	74
97	CA	Nusakambangan Timur	Jawa Tengah	71
98	CA	Pantodomas	Jawa Tengah	70
99	CA	Nyiut Panrissen	Kalimantan Barat	70
100	CA	Pinus Jantho	Aceh	70
101	CA	Pulau Bawean	Jawa Timur	70
102	CA	S Bahewo Teluk Klowe	Bengkulu	70
103	CA	Sibolangit	Sumatera Utara	71
104	CA	Telaga Patengan	Jawa Barat	72
105	CA	Taba Penanjung I	Bengkulu	70
106	CA	Telogo Dringo	Jawa Tengah	71
107	CA	Telogo Ranjeng	Jawa Tengah	70
108	CA	Telogo Sumurup	Jawa Tengah	72
109	CA	Teluk Adang	Kalimantan Timur	71
110	CA	Wijaya Kusuma	Jawa Tengah	71
111	SM	Bentayan	Sumatera Selatan	70
112	SM	Gumai Pasemah (Gumai Tebing Tinggi)	Sumatera Selatan	71
113	SM	Karang Gading/ Langkat Timur Laut	Sumatera Utara	71
114	SM	Komara	Sulawesi Selatan	71
115	SM	Lamandau	Kalimantan Tengah	70
116	SM	Padang Sugihan	Sumatera Selatan	70
117	SM	Pleihari Tanah laut	Kalimantan Selatan	72
118	SM	Pulau Kaget	Kalimantan Selatan	70
119	SM	Pulau Rambut dan Perairan dsk.	DKI Jakarta	72
120	SM	Rawa Singkil	Aceh	78
121	SM	Siranggas	Sumatera Utara	70
122	TB	Komara	Sulawesi Selatan	70
123	TN	Batang Gadis	Sumatera Utara	70
124	TN	Bukit Duabelas	Jambi	76
125	TN	Kelimutu	Nusa Tenggara Timur	75

No	Fungsi Kawasan	Nama Kawasan Konservasi	Provinsi	Nilai METT
126	TN	Laiwangi Wanggameti	Nusa Tenggara Timur	70
127	TN	Rawa Aopa Watumohai	Sulawesi Tenggara	78
128	TN	Sembilang	Sumatera Selatan	72
129	TN	Siberut	Sumatera Barat	70
130	TN	Tesso Nilo	Riau	73
131	TN	Way Kambas	Lampung	75
132	TN	Zamrud	Riau	73
133	TNL	Kepulauan Togean	Sulawesi Tengah	74
134	TWA	Air Rami I Reg.87	Bengkulu	70
135	TWA	Cimanggu	Jawa Barat	71
136	TWA	Bukit Kaba	Bengkulu	71
137	TWA	Kawah Kamojang	Jawa Barat	72
138	TWA	Linggarjati	Jawa Barat	71
139	TWA	Guci	Jawa Tengah	71
140	TWA	Gunung Baung	Jawa Timur	70
141	TWA	Gunung Meja	Papua Barat	70
142	TWA	Jantho	Aceh	72
143	TWA	Kepulauan Banyak	Aceh	71
144	TWA	Muka Kuning	Kepulauan Riau	71
145	TWA	Panelokan	Bali	70
146	TWA	Pulau Satonda	Nusa Tenggara Barat	70
147	TWA	Ruteng	Nusa Tenggara Timur	73
148	TWA	Sibolangit	Sumatera Utara	73
149	TWA	Sicikeh-cikeh	Sumatera Utara	72
150	TWA	Sidrap	Sulawesi Selatan	70
151	TWA	Sumber Semen	Jawa Tengah	70
152	TWA	Sungai Dumai	Riau	70
153	TWA	Tanjung Belimbing	Kalimantan Barat	74
154	TWA	Tretes	Jawa Timur	71
155	TWAL	Teluk Lasolo	Sulawesi Tenggara	74
Tahun 2019				
156	CA	Gunung Papandayan	Jawa Barat	70
157	CA	Kawah Kamojang	Jawa Barat	71
158	CA	Nusa Gede Panjalu	Jawa Barat	71

No	Fungsi Kawasan	Nama Kawasan Konservasi	Provinsi	Nilai METT
159	CA	Cibanteng	Jawa Barat	71
160	CA	Talaga Bodas	Jawa Barat	70
161	CA	Goa Nglirip	Jawa Timur	72
162	CA	Janggangan Rogojampi II	Jawa Timur	72
163	CA	Pancur Ijen II	Jawa Timur	71
164	CA	Pulau Sempu	Jawa Timur	73
165	CA	Saobi	Jawa Timur	72
166	CA	Sungai Kolbu Iyang Plateau	Jawa Timur	74
167	CA	Watangan Puger I-VI	Jawa Timur	73
168	CA	Hutan Bakau Maubesi	NTT	71
169	CA	Waigeo Timur	Papua Barat	74
170	CA	Pulau Berkeh	Riau	70
171	CA	Bukit Bungkuk	Riau	70
172	CA	Faruhumpenai	Sulawesi Selatan	70
173	CA	Dolok Sipirok	Sumatera Utara	73
174	CA	Dolok Tinggi Raja	Sumatera Utara	73
175	CA	Martelu Purba	Sumatera Utara	70
176	CA	Serbojadi	Aceh	74
177	CA	Batukahu I-III	Bali	70
178	CA	Kioyo I dan II	Bengkulu, Lampung	71
179	CA	Tanjung Laksaha	Bengkulu, Lampung	76
180	SM	Kerumutan	Riau	70
181	CA	Pulau Bokor	Jakarta	70
182	CA	Donoloyo	Jawa Tengah	70
183	CA	Gunung Butak	Jawa Tengah	75
184	CA	Bekutuk	Jawa Tengah	76
185	SM	Tasik Tanjung Padang	Riau	73
186	CA	Gunung Kentawan	Kalimantan Selatan	72
187	CA	Gunung Sojol	Sulawesi Tengah	70
188	TWA	Buluh Cina	Riau	70
189	CA	Kakenauwe	Sulawesi Tenggara	74
190	CA	Napabalano	Sulawesi Tenggara	73
191	CA	Pasar Ngalam Reg.92	Bengkulu, Lampung	71
192	TB	Gunung Nanua	Bengkulu, Lampung	71

No	Fungsi Kawasan	Nama Kawasan Konservasi	Provinsi	Nilai METT
193	CA	Peson Subah II	Jawa Tengah	71
194	SM	Kuala Lupak	Kalimantan Selatan	70
195	SM	Dataran Tinggi Yang	Jawa Timur	77
196	SM	Bukit Rimbang-Bukit Baling	Riau	76
197	SM	Giam Siak Kecil	Riau	72
198	SM	Bukit Batu	Riau	71
199	SM	Barumon	Sumatera Utara	73
200	SM	Dolok Surungan	Sumatera Utara	70
201	SM	Muara Angke	Jakarta	73
202	SM	Gunung Tunggangan	Jawa Tengah	71
203	SM	Pulau Kasa	Maluku	75
204	SM	Buton Utara	Sulawesi Tenggara	71
205	SM	Lambusango	Sulawesi Tenggara	73
206	SM	Tanjung Amolengo	Sulawesi Tenggara	71
207	SM	Tanjung Batikolo	Sulawesi Tenggara	71
208	SM	Isau-isau Pasemah	Sumatera Selatan	72
209	TB	Lingga Isaq	Aceh	78
210	TWA	Tanjung Keluang	Kalimantan Tengah	70
211	Tahura	Sultan Adam	Kalimantan Selatan	70
212	CA	Gunung Tinombala	Sulawesi Tengah	71
213	Tahura	Gunung Bunder	DI Yogyakarta	73
214	Tahura	Gunung Tumpa H.V. Worang	Sulawesi Utara	76
215	Tahura	Lapak Jaru	Kalimantan Tengah	70
216	CA	Pamona	Sulawesi Tengah	73
217	Tahura	KGPAA Mangkunegoro I	Jawa Tengah	70
218	SM	Bakiriang	Sulawesi Tengah	75
219	TWA	Pulau Pasoso	Sulawesi Tengah	73
220	TWA	Wera	Sulawesi Tengah	71
221	TN	Betung Kerihun	Kalimantan Barat	76
222	TN	Kerinci Seblat	Jambi	72
223	TN	Kayan Mentarang	Kalimantan Utara	72
224	TWA	Lembah Harau	Sumatera Barat	71
225	TN	Lorentz	Papua	70

No	Fungsi Kawasan	Nama Kawasan Konservasi	Provinsi	Nilai METT
226	TN	Tambora	NTB	72
227	TN	Manusela	Maluku	77
228	TWA	Sukawayana	Jawa Barat	71
229	TWA	Gunung Pancar	Jawa Barat	70
230	TWA	Telaga Patengan	Jawa Barat	70
231	TWA	Lau Debuk-debuk	Sumatera Utara	70
232	TWA	Danau Buyan-Danau Tamblingan	Bali	74
233	TWA	Gunung Batur bukit Payang	Bali	70
234	TWA	Sangeh	Bali	71
235	TWA	Air Hitam	Bengkulu, Lampung	70
236	TWA	Baning	Kalimantan Barat	70
237	TWA	Bukit Kelam	Kalimantan Barat	71
238	TWA	Pulau Bakut	Kalimantan Selatan	71
239	Tahura	Banten	Banten	71
240	TWA	Pulau Sangalaki	Kalimantan Timur	70
241	TWA	Gunung Api Banda	Maluku	75
242	TWA	Suranadi	NTB	74
243	Tahura	Lati Petangis	Kalimantan Timur	70
244	Tahura	Murhum/Nipa-Nipa	Sulawesi Tenggara	70
245	TWA	Mangolo	Sulawesi Tenggara	71
246	TWA	Tirta Rimba/Air Jatuh	Sulawesi Tenggara	73
247	Tahura	Sulteng	Sulawesi Tengah	71
248	TWA	Camplong	NTT	71
249	TWA	Menipo	NTT	71
250	Tahura	Wan Abdul Rachman	Lampung	70
251	TWA	Pulau Kasa	Maluku	71
252	TWA	Pulau Marsegu	Maluku	74
253	TWA	Pulau Pombo	Maluku	70
254	TWA	Kepulauan Padamarang	Sulawesi Tenggara	77
255	CA	Muara Kendawangan	Kalimantan Barat	70

Lampiran 3. Data Capaian KPHK Non TN yang beroperasi 2015-2019

Daftar KPHK Non Taman Nasional yang terbentuk dan beroperasi sampai dengan tahun 2019

No	UPT	Nama KPHK	SK Penetapan KPHK	Tanggal	Luas (ha)
1	BKSDA Sumatera Barat	Arau Hilir	SK.982/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	10.537.500
2	BKSDA Sumatera Selatan	Dangku Bentayan	SK.983/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	8.957.400
3	BBKSDA Jawa Barat	Guntur-Papandayan	SK.984/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	1.531.800
4	BKSDA Kalimantan Barat	Gunung Melintang	SK.987/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	2.512.700
5	BBKSDA Riau	Kerumutan	SK.981/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	12.000.000
6	BBKSDA Sulawesi Selatan	Towuti	SK.989/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	18.500.000
7	BKSDA Sulawesi Utara	Nantu	SK.990/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	3.121.500
8	BKSDA Aceh	Rawa Singkil	SK.980/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	10.250.000
9	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Ruteng	SK.986/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	3.224.800
10	BBKSDA Papua Barat	Bolmalit-Maghlit	SK.450/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	919.400
11	BBKSDA Papua Barat	Sorong-Klamono	SK.456/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	299.000
12	BBKSDA Papua Barat	Gunung Meja Sidei Kaironi	SK.457/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	96.800
13	BBKSDA Papua Barat	Arfak	SK.458/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	6.832.500
14	BBKSDA Papua Barat	Waigeo	SK.459/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	26.407.300
15	BKSDA Sulawesi	Pamona Bancaea	SK.462/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	3.512.500

No	UPT	Nama KPHK	SK Penetapan KPHK	Tanggal	Luas (ha)
	Tengah	Tomata			
16	BKSDA Sulawesi Tengah	Pangi Binangga	SK.463/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	7.099.700
17	BKSDA Sulawesi Tengah	Gunung Tinombala	SK.464/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	3.860.800
18	BKSDA Sulawesi Tengah	Gunung Dako Pinjan Tanjung Matop Dolangon	SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	2.165.900
19	BKSDA Kalimantan Selatan	Kuala Lupak	SK.466/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	400.800
20	BBKSDA Riau	Giam Siak Kecil-Bukit Batu	SK.467/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	9.985.800
21	BKSDA Jawa Tengah	Pati Barat	SK.471/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	142.600
22	BKSDA Jawa Tengah	Cilacap	SK.472/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	98.200
23	BKSDA Kalimantan Tengah	Pararawen	SK.473/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	585.500
24	BKSDA Kalimantan Tengah	Sei Lamandau	SK.474/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	6.142.500
25	BKSDA Bali	Bedugul-Sangah	SK.475/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	363.500
26	BKSDA Bali	Kintamani	SK.476/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	264.900
27	BBKSDA Sumatera Utara	Barumon	SK.694/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	3.626.100
28	BBKSDA Sumatera Utara	Sicike Cike	SK.724/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	614.400
29	BKSDA Bengkulu	Enggano	SK.723/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	928.100
30	BBKSDA Jawa Timur	Kawah Ijen	SK.725/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	257.500
31	BBKSDA Jawa	Dataran Tinggi Yang	SK.726/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2017	20 September 2016	1.286.500

No	UPT	Nama KPHK	SK Penetapan KPHK	Tanggal	Luas (ha)
	Timur				
32	BBKSDA Papua	Cycloops Youtefa	SK.727/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2017	20 September 2016	3.328.900
33	BKSDA DKI Jakarta	Jakarta	SK.731/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	24.200
34	BKSDA Sulawesi Tenggara	Lambusango	SK.733/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	2.859.500
35	BKSDA Sulawesi Tenggara	Peropa	SK.734/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	4.401.200
36	BKSDA Kalimantan Barat	Muara Kendawangan	SK.737/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	14.761.400
37	BKSDA Kalimantan Barat	Gunung Nyiut	SK.738/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	9.175.900
38	BBKSDA Jawa Barat	Simpang Tilu	SK.739/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	2.335.600
39	BBKSDA Jawa Barat	Burangrang Tangkuban Perahu	SK.740/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	477.200
40	BKSDA Sumatera Selatan	Padang Sugihan	SK.743/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	8.814.800
41	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Harlu	SK.744/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	368.100
42	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Gunung Mutis	SK.745/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	1.231.500
43	BKSDA Aceh	Pulau Weh	SK.746/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	648.100
44	BKSDA Aceh	Lingga Isaq	SK.747/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	8.663.400
45	BKSDA Sulawesi Utara	Tangkoko	SK.748/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	854.500
46	BKSDA DI Yogyakarta	Yogyakarta	SK.749/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	63.200
47	BKSDA Sulawesi Tengah	Morowali	SK.460/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	21.690.800

No	UPT	Nama KPHK	SK Penetapan KPHK	Tanggal	Luas (ha)
48	BKSDA Sulawesi Tengah	Bakiriang	SK.461/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	1.747.900
49	BBKSDA Riau	Bukit Rimbang Bukit Baling	SK.468/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	14.215.600
50	BKSDA Bengkulu	Bukit Kaba	SK.469Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	1.513.300
51	BKSDA Kalimantan Timur	Muara Kaman Sedulang	SK.728/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	6.544.500
52	BKSDA Maluku	KPHK Gunung Sahuwai	SK.729/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	3.247.600
53	BKSDA Maluku	Taliabu	SK.730/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	1.311.400
54	BKSDA Lampung	Kepulauan Krakatau	SK.732/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	1.336.500
55	BKSDA Jambi	Durian Luncuk	SK.735/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	11.100
56	BKSDA Jambi	KPHK Hutan Bakau Pantai Timur	SK.736/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	487.200
57	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Moyo	SK.741/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	3.094.500
58	BKSDA Nusa Tenggara Barat	KPHK Gunung Tunak	SK.742/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	222.500
59	BBKSDA Sumatera Utara	Karang Gading-Langkat Timur Laut	SK.410/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	1.347.400
60	BBKSDA Sumatera Utara	Sibolangit	SK.411/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	59.600
61	BBKSDA Sumatera Utara	Sipiriok	SK.412/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	1.533.000
62	BBKSDA Sumatera Utara	Dolok Tinggi Raja	SK.413/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	40.800
63	BBKSDA Sumatera Utara	Dolok Surungan	SK.414/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	2.224.100
64	BBKSDA	Holiday Resort	SK.415/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	210.000

No	UPT	Nama KPHK	SK Penetapan KPHK	Tanggal	Luas (ha)
	Sumatera Utara				
65	BBKSDA Sumatera Utara	Pulau Pini	SK.416/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	832.500
66	BBKSDA Sumatera Utara	Sijaba Hutaginjang	SK.417/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	41.600
67	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Semongkat	SK.418/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	178.300
68	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Taliwang	SK.419/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	660.820
69	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Suranadi	SK.420/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	44.800
70	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Sangiang	SK.421/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	1.154.600
71	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Tuti Adegae	SK.422/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	770.000
72	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Ndeta Kilikima	SK.423/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	184.700
73	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Wae Wuul	SK.424/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	148.500
74	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Teluk Maumere	SK.425/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	901.300
75	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Riuang	SK.426/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	1.182.900
76	BBKSDA Nusa Tenggara	Kateri	SK.427/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	794.500

No	UPT	Nama KPHK	SK Penetapan KPHK	Tanggal	Luas (ha)
	Timur				
77	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Camplong	SK.428/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	101.500
78	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Ale Aisio	SK.429/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	982.500
79	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Watu Ata	SK.430/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	489.900
80	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Teluk Kupang	SK.431/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	6.762.800
81	BBKSDA Papua	Nabire-Tanjung Wiy	SK.432/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agustus 2017	446.200
82	BKSDA Aceh	Jantho	SK.123/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	19.487
83	BKSDA Aceh	Pulau Banyak	SK.124/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	205.720
84	BKSDA Sumatera Barat	Lima Puluh Kota	SK.125/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	10.829
85	BKSDA Bengkulu	Seblat	SK.126/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	8.139
86	BKSDA Bengkulu	Pantai Panjang	SK.127/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	1.559
87	BKSDA Sumatera Selatan	Gumai Pasemah	SK.128/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	46.123
88	BKSDA Sumatera Selatan	Gunung Raya	SK.129/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	44.996
89	BKSDA Jawa Tengah	Sablokare	SK.130/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	292
90	BBKSDA Jawa Timur	Nusa Barung-Watangan-Curah	SK.131/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	7.655
91	BBKSDA Jawa Timur	Pulau Sempu	SK.132/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	977
92	BBKSDA	Pulau Saobi	SK.133/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	437

No	UPT	Nama KPHK	SK Penetapan KPHK	Tanggal	Luas (ha)
	Jawa Timur				
93	BBKSDA Jawa Timur	Baung-Abang-Tretes	SK.134/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	266
94	BBKSDA Jawa Timur	Picis-Sigogor-Nglirip-Manggis	SK.135/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	245
95	BKSDA Kalimantan Barat	Kepulauan Karimata	SK.136/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	190.745
96	BKSDA Kalimantan Barat	Kelam Komplek	SK.137/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	1.334
97	BKSDA Kalimantan Barat	Mandor Pasi	SK.138/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	6.064
98	BKSDA Kalimantan Tengah	Tanjung Keluang	SK.139/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	2.478
99	KSDA Kalimantan Selatan	Tanah Laut-Gn Kentawan	SK.140/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	8.404
100	BKSDA Sulawesi Tenggara	Mangolo	SK.141/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	4.567
101	BKSDA Sulawesi Tenggara	Buton Utara	SK.142/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	91.025
102	BBKSDA Sulawesi Selatan	Mario	SK.143/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	5.334
103	BBKSDA Sulawesi Selatan	Komara	SK.144/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	10.196
104	BBKSDA Jawa Timur	Bawean-Noko Nusa	SK.299/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2018	5 Juli 2018	4.561
105	BKSDA Jawa Tengah	Pewoba	SK.301/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2018	5 Juli 2018	382
106	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Pelangan	SK.302/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2018	5 Juli 2018	2.600

Lampiran 4. Data peningkatan populasi 25 satwa prioritas

Populasi 25 satwa Prioritas 2015-2019

No.	Satwa	Jumlah Populasi				
		2015	2016	2017	2018	2019 *)
1	Harimau Sumatera	35	72	67	196	122
2	Gajah Sumatera	52	75	468	642	344
3	Badak	75	23	100	92	90
4	Banteng	47	313	297	356	321
5	Owa	25	165	378	1.107	1.236
6	Orangutan	102	2.451	2.183	4.933	2.408
7	Bekantan	458	930	1.238	3.402	2.892
8	Komodo	22	2.100	26	2.915	2.932
9	Jalak Bali	8	30	61	88	105
10	Maleo	994	828	3.319	3.037	2.816
11	Babi Rusa	33	77	565	571	551
12	Anoa	33	128	439	375	285
13	Elang	11	62	105	124	108
14	Kakatua	-	954	5.526	5.887	12.042
15	Macan Tutul Jawa	-	13	58	65	49
16	Rusa Bawean	-	303	311	307	304
17	Cendrawasih	-	46	51	148	93
18	Surili	-	114	196	218	27
19	Tarsius	86	90	106	104	108
20	Monyet Hitam Sulawesi	34	35	141	147	469
21	Julang sumba	-	32	16	76	92
22	Kasturi Tengku Ungu	-	9	14	13	12
23	Penyu	-	2.834	7.300	7.334	7.467
24	Kanguru Pohon	-	10	0	22	2
25	Celepuk Rinjani	-	260	155	268	263

Lampiran 5. Data Kawasan Ekosistem Esensial

Kawasan Ekosistem Esensial yang Terbentuk Tahun 2015-2019

No	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Taman Kehati Prov Jawa Barat	Taman Kehati Pelawan, Kab. Bangka Tengah, Kep Bangka Belitung	Taman Kehati Hutan Monumental Nyaru Menteng, Kalteng	Taman Kehati Univ Negeri Manado, Sulut	Taman Kehati Kota Cirebon, Jawa Barat
2	Taman Kehati Prov Sumatera Barat	Taman Kehati Kokolomboi, Kab. Banggai Kep, Sulteng	Taman Kehati Puti Saloati, Sumbar	Taman Kehati Kab. Bandung, Jabar	Taman Kehati Kab. Karawang, Jawa Barat
3	Taman Kehati DIY	Taman Kehati Bedegung, Muara Enim, Sumsel	Taman Kehati Padang Pariaman, Sumbar	Taman Kehati Kab. Ponorogo, Jatim	Taman Kehati PT. Semen Tonasa, Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan
4	Taman Kehati Kab. Jombang	Taman Kehati Univ. Tadulako, Palu, Sulteng	Taman Kehati Oheo, Sultra	Koridor harimau sumatera dan satwa liar lainnya di Kab. Solok Selatan dan Kab. Dharmasraya, Sumbar	Taman Kehati PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) VI Balongan, Kab. Indramayu, Jawa Barat
5	Taman Kehati Kab. Belitung	Karst Maros Pangkep, Sulsel	Taman Kehati PT Pupuk Kujang, Jabar	Karst Maros Pangkajene Kep, Sulsel	Mangrove Pantai Cemara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi
6	Taman Kehati Kab. Sumedang	Mangrove Desa Mojo, Pemalang, Jateng	Taman Kehati Baubau, Sultra	Karst Kab. Banggai Kep, Sulteng	Mangrove Kab. Lampung Timur, Lampung
7	Taman Kehati Kab. Kuningan	Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay, Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau, Kaltim	Taman Kehati Kab. Muna, Sultra		Mangrove Kab. Kebumen, Jawa Tengah
8	Taman Kehati Kab. Lampung Barat	Koridor Penyu Kab. Lombok Barat, NTB	Taman Kehati Kab. Blitar, Jatim		Mangrove Kab. Rembang, Jawa Tengah
9	Taman Kehati Kab. Sekadau		Mangrove Torosiaje, Gorontalo		Mangrove Lambu, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat
10	Taman Kehati Kota Banjar Baru		Mangrove Kab. Lombok Barat, NTB		Mangrove Kao, Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara

No	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
11	Karst Sangkulirang Mangkalihat, Kaltim		Koridor Gajah Kab. Bener Meriah, Aceh		Mangrove Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan Pongok, Kab. Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung
12	Mangrove Teluk Pangpang, Jatim		Koridor Orangutan kalimantan, Kab. Ketapang, Kalbar		Karst Kab. Ciamis, Jawa Barat
13	Mangrove Jaring Halus, Sumut		Koridor Orangutan dan bekantan, Kab. Kayong Utara, Kalbar		ABKT Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
14			Koridor Gajah sumatera landskap Seblat Prov Bengkulu		ABKT Kab. Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah
15					ABKT Tanjung Maleo Negeri Kailolo, Kab. Maluku Tengah, Maluku
16					ABKT Penyu, Kab. Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat
17					Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara
18					Lahan Basah Habitat Kura-Kura Leher Ular Rote, Kab. Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur
19					Lahan Basah Danau Mesangat, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur
20					Lahan Basah Danau Bagantung, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Lampiran 6. Data dan Informasi Keanekaragaman Spesies dan Genetik

Data Informasi Sebaran Keanekaragaman Spesies dan Genetik

No	Ekoregion/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi Bioprospecting Lainnya	Dokumen Profil Kehati Daerah
A. Ekoregion Sumatera				
1.	BKSDA JAMBI	-	Buku informasi satwa liar yang diperdagangkan di Jambi	
2.	BKSDA SUMATERA SELATAN	Laporan Identifikasi Potensi KSA/KPA Bangka Belitung	Buletin Rimau Kito	
3.	BKSDA ACEH	Pengetahuan dan Pemanfaatan Tumbuhan Obat di Sabang, Pulau Weh, Nanggroe Aceh Darussalam	Jenis tumbuhan anggrek epifit di kawasan CA Jantho, Kab. Aceh Besar	
4.	BBTN GUNUNG LEUSER	Daftar jenis tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa Ketambe, kecamatan Badar - Aceh Tenggara		
5.	BBTN BUKIT BARISAN SELATAN	Keanekaragaman Jenis Tumbuhan di kawasan Hutan Krui TN BBS Lampung Barat	Seminar Nasional HUT Kebun Raya Cibodas ke 150 Buletin Siamang edisi 1	
6.	BTN BATANG GADIS	Daftar Data Informasi Tanaman Obat sebagai Potensi Bioprospeksi di TN Batang Gadis		
7.	BTN BERBAK DAN SEMBILANG	Eksplorasi Tumbuhan Obat di TN Berbak	Orchid of Jambi (Anggrek Alam Jambi) Studi Keanekaragaman Jenis Kantong Semar di TN Berbak	
8.	BTN BUKIT TIGA PULUH	Laporan Identifikasi Pemanfaatan TSL oleh Suku Talang Mamak di TN Bukit Tiga puluh (Suku Talang Mamak di desa Rantau Langsung Resort Siambul)		
9.	BTN BUKIT DUA BELAS	Buku Pengenalan Tumbuhan Obat TN Bukit Dua Belas		

No	Ekoregion/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi Bioprospecting Lainnya	Dokumen Profil Kehati Daerah
		Laporan Identifikasi Tumbuhan Obat di Kawasan TN Bukit Dua Belas Provinsi Jambi		
10.	DLH Kabupaten Bintan			Profil Keaneekaragaman Hayati Daerah Tahun 2018
11.	Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat	Data spasial Tumbuhan Bioprospecting Kerinci Seblat		
B. Ekoregion Jawa				
1.	BBKSDA JAWA BARAT	Studi Potensi Tumbuhan Obat di CA dan TWA Pananjung Pangandaran		
		Pemanfaatan Tradisional Tumbuhan Obat oleh Masyarakat Sekitar Kawasan CA Gunung Tilu, Jawa Barat		
		Pemanfaatan Tumbuhan Berkhasiat Obat oleh Masyarakat Sekitar CA Gunung Simpang, Jawa Barat		
		Pembuatan Plot Sampel Permanen Tanaman Anggrek di CA Gunung Tilu		
2.	BBKSDA JAWA TIMUR	Daftar Jenis Potensi Tanaman Obat di CA P. Sempu		
		Daftar Jenis Potensi Tanaman Obat di SM Dataran Tinggi Yang		
		Daftar Jenis Potensi Tanaman Obat di CA Gunung Sigogor		
		Daftar Jenis Potensi Tanaman Obat di Hutan Lindung Sigogor,		
3.	BKSDA JAKARTA		Informasi Kawasan Konservasi SM Pulau Rambut	

No	Ekoregion/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi Bioprospecting Lainnya	Dokumen Profil Kehati Daerah
			Informasi Potensi Perairan SM Pulau Rambut	
			Film Dokumenter Ramsar Site SM Pulau Rambut	
4.	BKSDA JATENG		Film Dokumenter Lembaga Desa Konservasi Pulau Untung Jawa	
5.	BKSDA YOGYAKARTA	Inventarisasi Tanaman Obat di Kawasan Karst Kabupaten Gunungkidul		
6.	BBTN GUNUNG GEDE PANGRANGO	Tanaman Obat TN Gunung Gede Pangrango		
7.	BBTN BROMO TENGGER SEMERU	Penelitian Mahasiswa dengan judul "Etnobotani Masyarakat Suku Tengger: Studi Kasus di Desa Ranu Pane Wilayah Enclave TN Bromo Tengger Semeru, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang"		
		Anggrek		
8.	BTN UJUNG KULON	Daftar Jenis Tanaman Obat di TN Ujung Kulon		
		Data Spasial Tanaman Obat TN Ujung Kulon		
9.	BTN GUNUNG HALIMUN SALAK	Laporan Eksplorasi: Potensi Lamiaceae, Begoniaceae dan Rubiaceae sebagai bahan baku obat dan aspek konservasinya	Keragaman Bryophyta TN Gunung Halimun Salak	
			Eksplorasi Keragaman Lumut (Bryophyta) di Resort Cidahu, Gunung Halimun Salak, TN Gunung Halimun Salak	
			A Photographic Guide to the Common Insects of Gunung Halimun Salak National Park	

No	Ekoregion/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi Bioprospecting Lainnya	Dokumen Profil Kehati Daerah
			Five Hundred Plants Species in Gunung Halimun Salak National Park, West Java	
			Jenis-jenis Anggrek TN Gunung Halimun	
			Serangga TN Gunung Halimun Jawa Bagian Barat	
			Spesies dan Functional Diversity of Soil Microflora at Gunung Halimun National Park	
			Mamals of Gunung Halimun national Park, West Java	
10.	BTN MERU BETIRI	Inventarisasi, Identifikasi dan Pemetaan Potensi Wanafarma Propinsi Jawa Timur : TN. Bromo Tengger Semeru, TN. Meru Betiri, TN Baluran dan TN Alas Purwo	Laporan Inventarisasi Anggrek TNMB	
		Buku Informasi Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna TNMB		
		Hasil Penelitian Skripsi		
		Data Potensi Bioprospeksi Tumbuhan Obat TN. Meru Betiri Triwulan I 2019	Identifikasi Biota Potensi Bioprospeksi (Lamun, alga, molusca, Echinodermata)	
11.	BTN GUNUNG CIREMAI	Daftar Jenis Potensi Tanaman Obat di Taman Nasional Gunung Ciremai	Daftar Jenis Potensi Tanaman Hias di TN Gunung Ciremai	
			Daftar Jenis Kantong Semar/ Nepenthes di TN Gunung Ciremai	
12.	BTN ALAS PURWO		Seri buku informasi dan promosi pengelolaan bambu TN Alas Purwo	

No	Ekoregion/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi Bioprospecting Lainnya	Dokumen Profil Kehati Daerah
			Seri buku informasi dan promosi mangrove TN Alas Purwo	
			Seri buku informasi dan promosi burung air TN Alas Purwo	
			Panduan Lapangan Mamalia TN Alas Purwo	
			Panduan Lapangan Herpetofauna (Amphibi dan Reptil) TN Alas Purwo	
13.	DLH DKI Jakarta		Film Dokumenter Lembaga Desa	Profil Keanekaragaman Hayati DKI Jakarta Tahun 2018
14.	DLH Kabupaten Sumedang			Profil Keanekaragaman Hayati Sumedang Tahun 2018
C. Ekoregion Sulawesi				
1.	BBKSDA SULAWESI SELATAN	Tanaman obat	Inventarisasi Anggrek di CA. Faruhumpenai	
			Inventarisasi Anggrek di SM. Komara	
			Inventarisasi Anggrek di TWA Malino	
			Inventarisasi Rusa di SM Komara	
			Monitoring Rusa di SM Komara	
			Monitoring Rusa (<i>Cervus timorensis</i>) di SM Komara	
			Inventarisasi Eboni di CA. Kalena	
			Inventarisasi Eboni di CA. Kalena di CA Ponda-Ponda	

No	Ekoregion/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi Bioprospecting Lainnya	Dokumen Profil Kehati Daerah
			Inventarisasi Eboni di CA. Kalena di SM Komara	
			Inventarisasi dan Identifikasi jenis satwa burung di SM Mampie	
			Inventarisasi Maleo (Macrocephalon maleo) di Desa Kambunong, Kab. Mamuju	
			Inventarisasi Anoa di CA Faruhumpenai	
			Inventarisasi Macaca maura di TWALeja	
			Identifikasi jenis ikan Introduksi pada TWA Danau Matano	
2.	BKSDA SULTENG		Laporan Hasil Kegiatan Identifikasi Potensi Anggrek di CA Gunung Dako	
			Laporan Identifikasi Potensi Anggrek di CA Gunung Tinombala Kabupaten Parigi Moutong	
3.	BTN LORE LINDU	Statistik BTN Lore Lindu		
4.	BTN WAKATOBI	Identifikasi Tanaman Obat	Monitoring Burung Pantai	
			Monitoring Mangrove	
			Monitoring Lamun	
			Monitoring Cetacea	
			Monitoring Penyu	
			Monitoring Karang	
			Monitoring SPAGs	
5.	BTN BOGANI NANI WARTABONE	Identifikasi Potensi Tanaman Obat Indonesia di Bolonsio dan Toraut di Balai TN Bogani Nani Wartabone		

No	Ekoregion/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi Bioprospecting Lainnya	Dokumen Profil Kehati Daerah
6.	BTN BANTIMURUNG BULUSARAUNG	Laporan Identifikasi dan Sebaran Tanaman Obat di Dusun Pattiro, Desa Labuaja dan Dusun Pattunuang, Desa Samangki di TN Bantimurung Saraung	Identifikasi Anggrek Alam di TN Bantimurung Bulusaraung	
		Identifikasi dan Pemetaan Tanaman Obat di Resort Pattunuang	Identifikasi Keragaman Kupu-Kupu (Papilionoidea) di TN Bantimurung Bulusaraung	
7.	BTN BUNAKEN	Pemanfaatan tumbuhan obat di Kecamatan bunaken, Kota manado, provinsi sulawesi utara		
		Potensi Spons Petrosia sp Sebagai Bahan Antikanker		
8.	BTN Togean	Potensi Tanaman Obat BTN Togean		
9.	BTN Takabonerate		Identifikasi Biota Laut Potensi Bioprospecting Cagar Biosfer	
D. Ekoregion Kalimantan				
1.	BKSDA KALTENG	Data potensi bioprospeksi Balai KSDA Kalteng, hasil inventarisasi dan identifikasi tanaman obat di TWA Bukit Tangkiling, TWA Tanjung Keluang, SM Lamandau dan CA Pararawen pada tahun 2011)		
		Tanaman Obat CA TWA Bukit Tangkiling		
2.	BKSDA KALSEL		Inventarisasi Tanaman Jenis Rhododendron sp di Pegunungan Meratus	
			Inventarisasi Anggrek Alam di CA Gunung Kentawan	
			Survey Anggrek Dilindungi di Pelaihari Tanah Laut	

No	Ekoregion/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi Bioprospecting Lainnya	Dokumen Profil Kehati Daerah
			Survei Anggrek Dilindungi di Meratus Hulu Sungai Tengah	
			Identifikasi Anggrek di Calon Taman Nasional Meratus Hulu Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel	
			Identifikasi Rotan Di Calon Taman Nasional Meratus Hulu Barabai	
3.	BKSDA KALBAR	Laporan identifikasi dan analisis tumbuhan obat dan TWA Bukit Kelam, Kabupaten Sintang		
4.	BTN SEBANGAU	Laporan Penelitian Flora Taman Nasional Sebangau (penelitian LIPI)		
5.	BTN BUKIT BAKA BUKIT RAYA	Data base potensi keanekaragaman hayati tahun 2010 - 2014 TN BBR		
6.	BTN GUNUNG PALUNG	Daftar Jenis Tumbuhan Obat di Stasiun Penelitian Cabang Panti, Kawasan Taman Nasional Gunung Palung, Kabupaten Kayong Utara, Skripsi Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Kalbar		
7.	BTN Kayan Mentarang	Identifikasi Biota Potensi Bioprospecting Cagar Biosfer		
E. Ekoregion Nusa Tenggara				
1.	BTN BALI BARAT	Buku Informasi Tumbuhan Obat di TN Bali Barat	Buku Informasi Keanekaragaman Hayati TN Bali Barat	
			Burung-burung TN Bali Barat	
2.	BKSDA NTB	Tabel Data Potensi Tanaman Obat di SM dan TWA		
3.	BTN MANUPEU TANAH BARU	Kajian Etnobotani Dan Keragaman Jenis Tumbuhan Obat dalam Kawasan Taman Nasional	Sebaran Keanekaragaman Hayati Spesies Julang Sumba di TN.	

No	Ekoregion/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi Bioprospecting Lainnya	Dokumen Profil Kehati Daerah
		Manupeu Tanah Daru	MATALAWA	
4.	BTN GUNUNG RINJANI	Tanaman Obat Kawasan TNGR (draft)	Anggrek TN Gunung Rinjani	
			Mushrooms Kawasan TN Gunung Rinjani	
5.	BTN KELIMUTU	Kajian Potensi Tanaman Obat di Kawasan TN Kelimutu	Kajian Potensi Tanaman Obat di Kawasan TN Kelimutu	
F. Ekoregion Papua				
1.	BBKSDA PAPUA BARAT	CA. Waigeo Timur	CA. Teluk Bintuni	
		CA. Pegunungan Arfak	CA. Peg. Kumawa	
			Keanekaragaman Anggrek (Orchidaceae) di Taman Wisata Alam Sorong, Kota Sorong, Papua Barat	
2.	BTN TELUK CENDRAWASIH	Identifikasi dan Inventarisasi Tanaman Obat Masyarakat Tradisional Isenebual Distrik Rumberopon, Kab. Teluk Wondama	Inventarisasi dan Identifikasi Jenis Anggrek di Kampung Yopanggar pada BPTN Wilayah II Wasior	
		Identifikasi dan Inventarisasi Tanaman Obat di Kampung Aisandami BPTN Wil II Wasior	Inventarisasi dan Identifikasi Jenis Anggrek di Kampung Waprak pada BPTN Wilayah III Ransiki	
		Identifikasi dan Inventarisasi Tanaman Obat di Waprak Pulau Roswar, Distrik Roswar, Kab. Teluk Wondama	Inventarisasi dan Identifikasi Jenis Anggrek di Pulau Anggromeos pada BPTN Wilayah I Nabire	
3.	BTN LORENTZ		Flora dan Fauna TN Lorentz	
			Mengenal Burung Langka Macgregoria pulchra	

No	Ekoregion/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi Bioprospecting Lainnya	Dokumen Profil Kehati Daerah
			Burung Migran Taman Nasional Lorentz	
G. Ekoregion Maluku				
1.	BTN Manusela	Survey tanaman obat di hutan mangga dua Resort Saunulu Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Tehoru BTN Manusela Tahun 2012	-	
2.		Survey tanaman obat di hutan mangga dua Resort Saunulu Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Tehoru BTN Manusela Tahun 2017	-	
		Data Sebaran Tanaman Obat Manusela		

Lampiran 7. Pagu dan Realisasi Anggaran Satker Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2019 (Berdasarkan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2019 *unaudited*)

Pagu dan realiasi Ditjen KSDAE tahun 2019 *unaudited*

NO	SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	SATUAN KERJA PUSAT			
1	DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL	6.630.020.000	6.425.813.651	96,92
2	DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI	26.319.415.000	24.457.131.682	92,92
3	DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI	29.345.516.000	29.186.117.591	99,46
4	DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI	7.499.000.000	7.325.592.398	97,69
5	DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM	19.509.334.000	18.325.250.193	93,93
6	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	69.198.957.000	67.480.079.397	97,52
	JUMLAH	158.502.242.000	153.199.984.912	96,65
	BALAI/BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM			
7	BBKSDA JAWA BARAT	40.008.000.000	39.416.921.270	98,52
8	BBKSDA JAWA TIMUR	32.993.514.000	32.586.262.229	98,77
9	BBKSDA NUSA TENGGARA TIMUR	29.365.685.000	28.738.898.763	97,87
10	BBKSDA PAPUA	31.619.285.000	31.346.720.698	99,14
11	BBKSDA PAPUA BARAT	21.290.983.000	21.249.104.525	99,80
12	BBKSDA RIAU	29.196.183.000	29.016.603.222	99,38
13	BBKSDA SULAWESI SELATAN	26.531.702.000	25.852.710.487	97,44
14	BBKSDA SUMATERA UTARA	31.399.651.000	31.179.826.358	99,3
15	BKSDA BALI	15.637.938.000	15.483.205.822	99,01
16	BKSDA BENGKULU	30.346.662.000	29.128.060.280	95,98
17	BKSDA D.I YOGYAKARTA	12.198.500.000	12.045.609.244	98,75
18	BKSDA DKI JAKARTA RAYA	15.703.000.000	15.615.610.533	99,44

NO	SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
19	BKSDA JAMBI	17.310.047.000	16.884.177.579	97,54
20	BKSDA JAWA TENGAH	21.075.189.000	20.563.368.487	97,57
21	BKSDA KALIMANTAN BARAT	18.260.672.000	17.314.588.274	94,82
22	BKSDA KALIMANTAN SELATAN	16.892.239.000	16.652.297.364	98,58
23	BKSDA KALIMANTAN TENGAH	17.281.808.000	16.519.228.325	95,59
24	BKSDA KALIMANTAN TIMUR	17.719.559.000	16.433.914.879	92,74
25	BKSDA MALUKU	17.682.559.000	17.273.366.807	97,69
26	BKSDA NANGROE ACEH DARUSSALAM	22.463.009.000	22.172.545.889	98,71
27	BKSDA NUSA TENGGARA BARAT	18.975.559.000	18.451.897.154	97,24
28	BKSDA SULAWESI TENGAH	21.735.341.000	20.890.610.294	96,11
29	BKSDA SULAWESI TENGGARA	16.973.700.000	16.856.577.919	99,31
30	BKSDA SULAWESI UTARA	11.891.000.000	11.635.189.674	97,85
31	BKSDA SUMATERA BARAT	18.971.000.000	18.412.150.286	97,05
32	BKSDA SUMATERA SELATAN	29.576.408.000	28.549.948.142	96,53
	JUMLAH	583.099.193.000	570.269.394.504	97,8
	BALAI/BALAI BESAR TAMAN NASIONAL			
33	BBTN BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM	28.955.959.000	27.971.313.635	96,60
34	BBTN BROMO TENGGER SEMERU	24.979.580.000	24.631.545.818	98,61
35	BBTN BUKIT BARISAN SELATAN	25.250.047.000	24.844.310.862	98,39
36	BBTN GUNUNG GEDE PANGRANGO	23.337.797.000	22.978.880.872	98,46
37	BBTN GUNUNG LEUSER	30.802.759.000	29.329.248.787	95,22
38	BBTN KERINCI SEBLAT	40.413.922.000	39.544.597.105	97,85
39	BBTN LORE LINDU	38.082.558.000	32.852.346.189	86,27
40	BBTN TELUK CENDERAWASIH	55.673.382.000	55.543.974.893	99,77
41	BTN AKETAJAWE-LOLOBATA	11.019.954.000	10.914.729.569	99,05
42	BTN ALAS PURWO	30.349.913.000	30.180.932.270	99,44

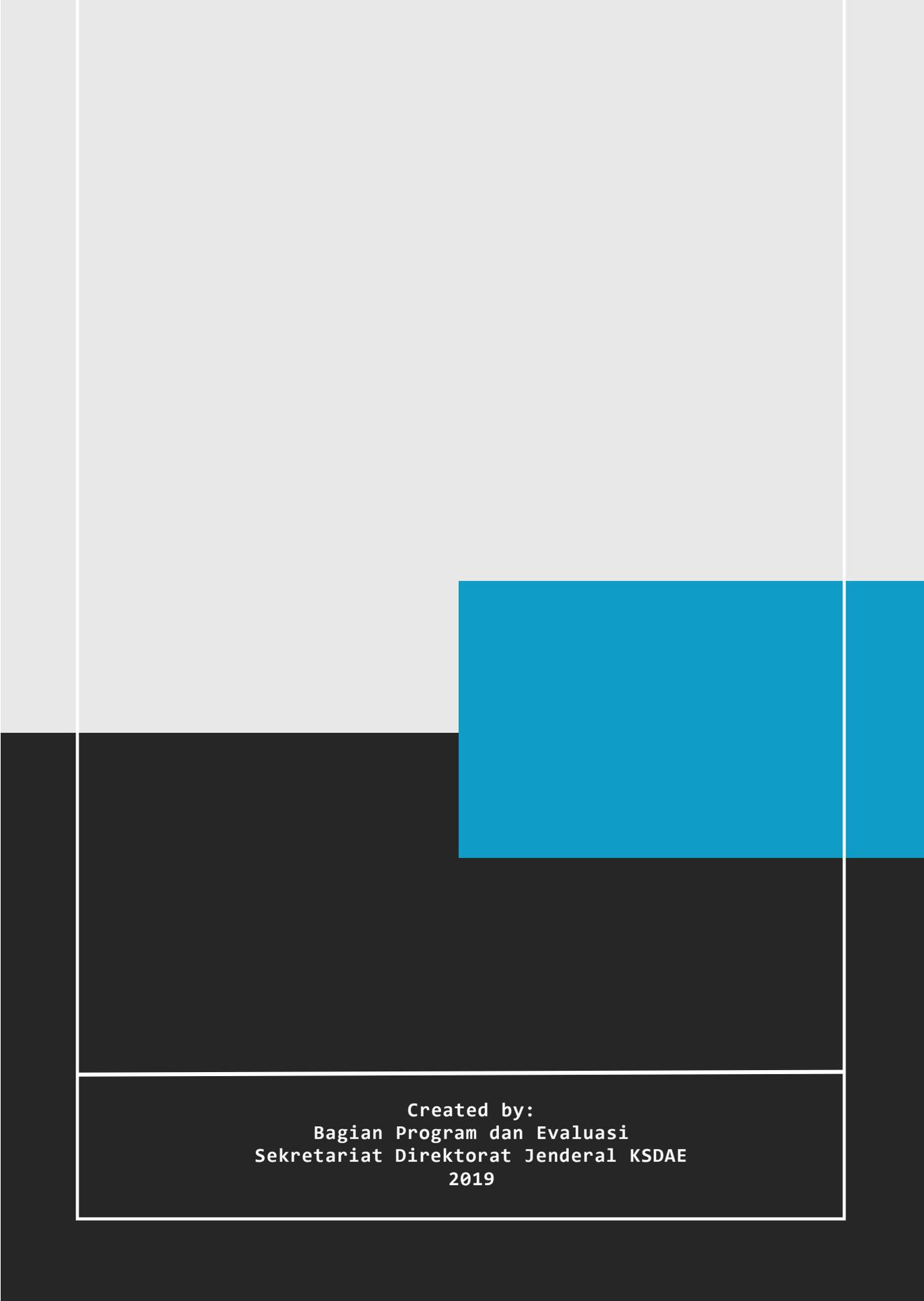
NO	SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
43	BTN BALI BARAT	17.688.390.000	17.507.350.625	98,98
44	BTN BALURAN	15.297.929.000	14.874.038.968	97,23
45	BTN BANTIMURUNG-BULUSARAUNG	14.518.040.000	14.422.501.195	99,34
46	BTN BATANG GADIS	10.274.404.000	10.082.495.456	98,13
47	BTN BERBAK DAN SEMBILANG	16.963.995.000	16.262.899.410	95,87
48	BTN BOGANI NANI WARTABONE	16.818.792.000	16.660.971.383	99,06
49	BTN BUKIT 12	10.334.876.000	10.288.706.218	99,55
50	BTN BUKIT BAKA BUKIT RAYA	12.005.450.000	11.517.161.227	95,93
51	BTN BUKIT TIGA PULUH	13.476.357.000	13.167.434.318	97,71
52	BTN BUNAKEN	22.119.465.000	21.420.431.967	96,84
53	BTN GUNUNG CEREMAI	14.233.365.000	13.704.072.820	96,28
54	BTN GUNUNG HALIMUN	38.140.326.000	37.884.613.919	99,33
55	BTN GUNUNG MERAPI	13.359.250.000	13.095.162.095	98,02
56	BTN GUNUNG MERBABU	10.681.720.000	10.631.786.297	99,53
57	BTN GUNUNG PALUNG	11.757.210.000	11.726.574.556	99,74
58	BTN GUNUNG RINJANI	18.577.382.000	18.126.433.038	97,57
59	BTN KARIMUN JAWA	15.367.787.000	14.966.380.522	97,39
60	BTN KAYAN MENTARANG	10.420.000.000	10.308.095.109	98,93
61	BTN KELIMUTU	8.859.745.000	8.757.776.289	98,85
62	BTN KEP. SERIBU	14.584.702.000	14.136.958.111	96,93
63	BTN KEPULAUAN TOGEAN	11.396.344.000	11.373.730.693	99,8
64	BTN KOMODO	20.717.500.000	19.806.359.469	95,6
65	BTN KUTAI	16.331.559.000	16.023.558.554	98,11
66	BTN LORENTZ	12.522.618.000	12.485.371.815	99,70
67	BTN MANUPEU TANAH DARU DAN LAIWANGI WANGGAMETI	17.416.881.000	17.297.758.009	99,32
68	BTN MANUSELLA	10.788.518.000	10.688.194.898	99,07

NO	SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
69	BTN MERU BETIRI	14.613.170.000	14.578.585.543	99,76
70	BTN RAWA AOPA WATUMOHAI	14.985.298.000	14.983.226.718	99,99
71	BTN SEBANGAU	12.096.443.000	12.004.782.915	99,24
72	BTN SIBERUT	12.229.911.000	12.147.720.990	99,33
73	BTN TAKA BONERATE	12.155.157.000	12.035.085.975	99,01
74	BTN TAMBORA	9.297.752.000	9.156.224.981	98,48
75	BTN TANJUNG PUTING	17.607.114.000	16.819.386.522	95,53
76	BTN TESSO NILO	12.211.559.000	11.936.212.165	97,75
77	BTN UJUNG KULON	36.518.065.000	36.274.651.594	99,33
78	BTN WAKATOBI	14.865.617.000	14.843.489.106	99,85
79	BTN WASUR	13.066.304.000	12.717.806.870	97,33
80	BTN WAY KAMBAS	33.115.605.000	31.906.587.222	96,35
	JUMLAH	906.280.471.000	885.412.457.562	97,7
	TOTAL PAGU DIREKTORAT JENDERAL KSDAE	1.647.881.906.000	1.608.881.836.978	97,63

Lampiran 8. Capaian Prioritas Nasional Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2019

No	Prioritas Nasional	Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Penyerapan Anggaran	Target Volume Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	% Realisasi Volume Keluaran
1	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Pemolaan dan Penataan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat (Unit KK)	18.396.401.000	18.341.092.908	99,70%	153	154	100,65%
		Penyiapan prakondisi dan pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat melalui kemitraan konservasi (Hektar)	30.449.387.000	29.766.237.633	97,76%	25.839,00	44.727,37	173,10%
		Kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi (Unit KEE)	9.399.980.000	8.745.661.725	93,04%	24	29	120,83%
		Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan konservasi (Bina Daerah Penyangga) (Kelompok)	15.745.423.000	15.307.094.839	97,22%	299	341	114,05%
		Intervensi metode agroengineering di daerah buffer TN Lore Lindu (Hektar)	600.000.000	589.860.000	98,31%	55	55	100,00%
2	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan	Jumlah Nilai Ekspor dan PNBP dari Pemanfaatan TSL dan Bioprospecting (Trilyun Rupiah)	445.000.000	444.787.938	99,95%	5	10,06	201,20%
		Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan TSL (Juta Rupiah)	1.560.110.000	1.474.800.277	94,53%	6036,12	11901,47	197,17%
		Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah (%)	25.315.663.000	24.608.218.129	97,21%	144	448,76	311,64%

No	Prioritas Nasional	Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Penyerapan Anggaran	Target Volume Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	% Realisasi Volume Keluaran
	Jasa Produktif Lainnya	Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi (Kawasan Konservasi)	38.916.043.000	37.606.853.975	96,64%	61	72	118,03%
		Operasional Penyelamatan TSL (WRU) berbasis masyarakat (Lokasi)	12.998.250.000	12.170.206.261	93,63%	29	31	106,90%
		Pengembangan ekowisata pada Kawasan Konservasi yang mendukung 7 Destinasi Wisata Prioritas dan 2 KEK Pariwisata (Kawasan Konservasi)	19.811.228.000	19.246.846.919	97,15%	9	9	100,00%
		039. Sarana Prasarana Ekowisata Taman Nasional Model SBSN (Unit)	97.789.250.000	96.859.725.756	99,05%	7	7	100,00%
3	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	011. Perlindungan dan Pengamanan berbasis Resort bersama Masyarakat untuk perlindungan kawasan dan sumber air (Resort)	110.941.896.000	108.792.614.071	98,06%	756	764	101,06%
		013. Pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi untuk perlindungan sumber air (Hektar)	30.174.312.000	29.289.476.669	97,07%	11902,03	15988,47	134,33%
		029. Energi listrik yang dihasilkan dari Mini/Mikro Hidro di sekitar dan di dalam Kawasan Konservasi (KWatt)	2.100.000.000	2.061.901.431	98,19%	70	84	120,00%



Created by:
Bagian Program dan Evaluasi
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
2019